

**LAPORAN KINERJA 2023**

Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara  
Bandung



# LAPORAN KINERJA

Kantor Regional III Badan  
Kepegawaian Negara Bandung

# 2023



**BerAKHLAK**  **#bangga  
melayani  
bangsa**

Kepala Kantor  
Regional III BKN

**HERI  
SUSILOWATI**



# KATA PENGANTAR

## "Kita semua satu, Kanreg III BKN Bandung"

Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (Kanreg III BKN) Bandung dapat menjalankan program-program yang telah direncanakan pada tahun 2023 dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pegawai Kanreg III BKN Bandung yang telah menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik selama tahun 2023.

Berdasarkan analisis data dan evaluasi objektif pada capaian kinerja Kanreg III BKN Bandung tahun 2023 melalui Laporan Kinerja ini, kami berharap dapat mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas kinerja di seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dalam wilayah kerja Kanreg III pada tahun-tahun selanjutnya baik pada internal maupun para stakeholders, sehingga dapat mendukung kinerja Kanreg III secara keseluruhan dalam mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Saya berharap kedepannya, kita terus beradaptasi, dan berinovasi mencari cara baru, dan berkolaborasi untuk saling memberikan yang terbaik bagi Bangsa dan Negara

Kepala Kantor Regional III BKN

±

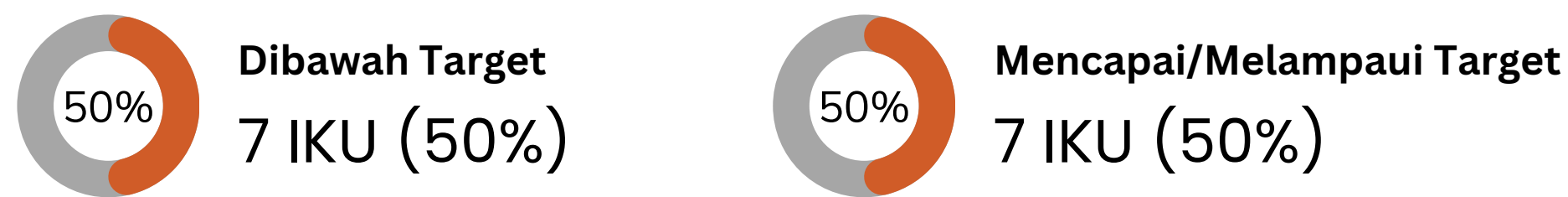
Dra. Heri Susilowati, MM

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Regional III BKN Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Kantor Regional III BKN Tahun 2023 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kanreg III BKN Bandung telah menetapkan Rencana Strategis tahun 2020-2024 dengan 7 (Tujuh) Sasaran Strategis (SS) dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan metode balance scorecard yaitu pembobotan pada target IKU yang dikombinasikan pada Nilai Kinerja Organisasi.

Kanreg III BKN Bandung telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 yang didasari oleh Rencana Strategis Kanreg III BKN Bandung 2020-2024. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan.

Capaian kinerja Kantor Regional III BKN Tahun 2023 secara keseluruhan dinyatakan "berhasil", dengan NPSS (Nilai Pencapaian Sasaran Strategis), yaitu sebesar 128,54, melampaui target kinerja normal yaitu 100. Meskipun beberapa indikator masih belum berhasil mencapai target, dengan uraian di bawah ini:



Berdasarkan perhitungan capaian kinerja Kanreg III BKN Bandung, terdapat 7 IKU yang capaiannya berhasil melampaui/mencapai target ialah IKU 1, IKU 2, IKU 5, IKU 6, IKU 8, IKU 9, IKU 13, dan IKU 14. Kemudian untuk IKU lainnya yang belum mencapai target adalah IKU 3, IKU 4, IKU 10, IKU 11, dan IKU 12. Namun secara umum, seluruh IKU yang belum mencapai tersebut jika dihitung dari segi kinerjanya memiliki persentase diatas 90 kecuali IKU 12 yang memiliki persentase kinerja sebesar 87.50%

Jika dilihat dari sisi sasaran strategis maka dari tujuh sasaran strategis, terdapat 3 sasaran strategis yang nilainya mencapai 100 yaitu sasaran strategis 3 "Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN", sasaran strategis 4 "Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN", dan sasaran strategis 6 yaitu "Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN". Data keseluruhan terkait capaian kinerja disajikan pada tabel berikut.

NPSS: 129,88

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Target Tahun	Realisasi	%	Status	NSS	Status NSS	Skor SS	NKP	Status NKP
<b>Stakeholder Perspective</b>										
								100,00	33,00	
<b>SS.1. Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN</b>										
IKU 1.	Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di Wilayah Kantor Regional III BKN Bandung	100%	100%	100,00%	100,00%					
IKU 2.	Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Kantor Regional III BKN Bandung	100%	100%	100%	100,00%					
<b>Customer Perspective</b>										
								98,13	32,38	
<b>SS.2. Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima</b>										
IKU 3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung	97	97	96,34	99,32%					
IKU 4.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung	95	95	92,1	96,95%					
<b>Internal Process Perspective</b>										
								97,90	32,31	
<b>SS.3. Terwujudnya Pemenuhan Kebijakan Teknis Manajemen ASN</b>										
IKU 5.	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional III BKN Bandung	100%	100%	100%	100,00%					
<b>SS.4. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN</b>										
IKU 6.	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di Kantor Regional III BKN Bandung	100%	100%	100%	100,00%					
<b>SS.5. Terwujudnya Peningkatan Digitalisasi Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN</b>										
IKU 7.	Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional III BKN Bandung	100%	100%	92%	91,60%					
<b>SS.6. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN</b>										
IKU 8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di Kantor Regional III BKN Bandung	100%	100%	100%	100,00%					
<b>Learn and Growth Perspective</b>										
								97,54	32,19	
<b>SS.7. Terwujudnya Manajemen internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel</b>										
IKU 9.	Indeks Profesionalitas ASN BKN Kanreg III BKN Bandung	80	80	87,72	109,65%					
IKU 10.	Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang tersetandar di Kantor Regional III BKN Bandung	100%	100%	95%	94,63%					
IKU 11.	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Regional III BKN Bandung	83	83	77,29	93,12%					
IKU 12.	Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di Kantor Regional III BKN Bandung	80	80	70	87,50%					
IKU 13.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional III BKN Bandung	93	93	93	100,37%					
IKU 14.	Persentase Tindak lanjut Temuan Hasil Audit Pemeriksaan BPK/ Inspektorat di Kantor Regional III BKN Bandung	100%	100%	100%	100,00%					

KATA PENGANTAR - i

RINGKASAN EKSEKUTIF- ii

DAFTAR ISI - iv

**Bab I PENDAHULUAN - 1**

1.1 Latar Belakang - 2

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi - 3

1.3 Struktur Organisasi -4

1.4 Sumber Daya Aparatur - 7

1.5 Lokasi dan Wilayah Kerja - 9

1.7 Sistematika Laporan - 10

**Bab II PERENCANAAN KINERJA - 11**

2.1 Perencanaan Strategis - 12

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis - 14

2.3 Perencanaan Kinerja 2020 -2024 - 15

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 - 17

2.5 Rencana Kerja dan Anggaran 2023 - 18

**Bab III AKUNTABILITAS KINERJA - 21**

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022 - 22

3.2 Pengukuran Kinerja - 23

3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya - 26

3.4 Capaian Kinerja Lainnya - 34

**Bab IV PENUTUP - 119**

4.1 Kesimpulan - 120

4.2 Rekomendasi - 121



# BAB I PENDAHULUAN



## 1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perwujudan integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang mana diselaraskan dengan sistem akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditetapkanlah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai lembaga pemerintahan non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional melakukan penyusunan SAKIP sebagai salah satu upaya mewujudkan good governance.

Laporan Kinerja merupakan bagian dari elemen SAKIP yang memuat informasi mengenai capaian kinerja, kunci kesuksesan, kendala, serta usulan rekomendasi serta saran perbaikan. Penyusunan SAKIP dilakukan secara simultan dan sistematis setiap tahun sehingga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kanreg III BKN Bandung serta dapat menindaklanjuti dan mengimplementasi rekomendasi dari tahun sebelumnya. Seluruh informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja dibandingkan dengan target kinerja, sebagai implementasi Rencana Strategis tahun 2020 - 2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung tahun 2023.

Kanreg III BKN Bandung setiap tahun melaporkan kinerjanya melalui Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan salah satu dokumen pendukung dalam SAKIP yang menggambarkan capaian kinerja instansi dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Riviur Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Manajemen kinerja diharapkan dapat mendorong penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada capaian hasil serta berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

## 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara merupakan instansi Badan Kepegawaian di daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Adapun tugas pokok dan fungsi Kantor Regional III BKN berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020, yaitu:

**“MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BKN DI BIDANG PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI WILAYAH KERJANYA, YANG KEWENANGANNYA MASIH MELEKAT PADA PEMERINTAH SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**

## Fungsi

- Koordinasi, bimbingan, serta pemberian petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian NSPK Manajemen ASN
- Pemberian pertimbangan pensiun pegawai dan janda/dudanya PNS instansi Pusat/Daerah dan penetapan status kepegawaian di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pemberian pertimbangan dan/ atau penetapan perpindahan Pemberian pertimbangan dan/atau penetapan pengadaan ASN instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku antar instansi , kenaikan pangkat dan status kepegawaian bagi PNS instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pemberian pertimbangan dan/atau penetapan pengadaan ASN instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Penyelenggaraan dan pemeliharaan sistem informasi data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat atau instansi daerah di wilayah kerjanya

- Pengelolaan teknologi informasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya
- Pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya
- Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan implementasi NSPK Manajemen ASN di wilayah kerjanya
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

## 1.3 Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam UU. Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, berikut adalah susunan organisasi Kantor Regional III BKN Bandung:

### a. Kepala Kantor Regional

### b. Bagian Tata Usaha (dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha)

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi Kantor Regional III BKN Bandung. Bagian Tata Usaha terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Subbagian Kepegawaian; dan
3. Subbagian Umum.

### c. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian (dipimpin oleh Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian)

### d. Bidang Pengangkatan dan Pensiun (dipimpin oleh Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun)

### e. Bidang Informasi Kepegawaian (dipimpin oleh Kepala Bidang Informasi Kepegawaian)

### f. Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian (dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian)

# STRUKTUR ORGANISASI

# KANREG III BKN BANDUNG



# 1.4 Sumber Daya Aparatur

Berikut ini adalah data terkait sumber daya aparatur di Kanreg III BKN per bulan Desember 2023

**JUMLAH PEGAWAI: 107**

## JENIS KELAMIN



46.7%

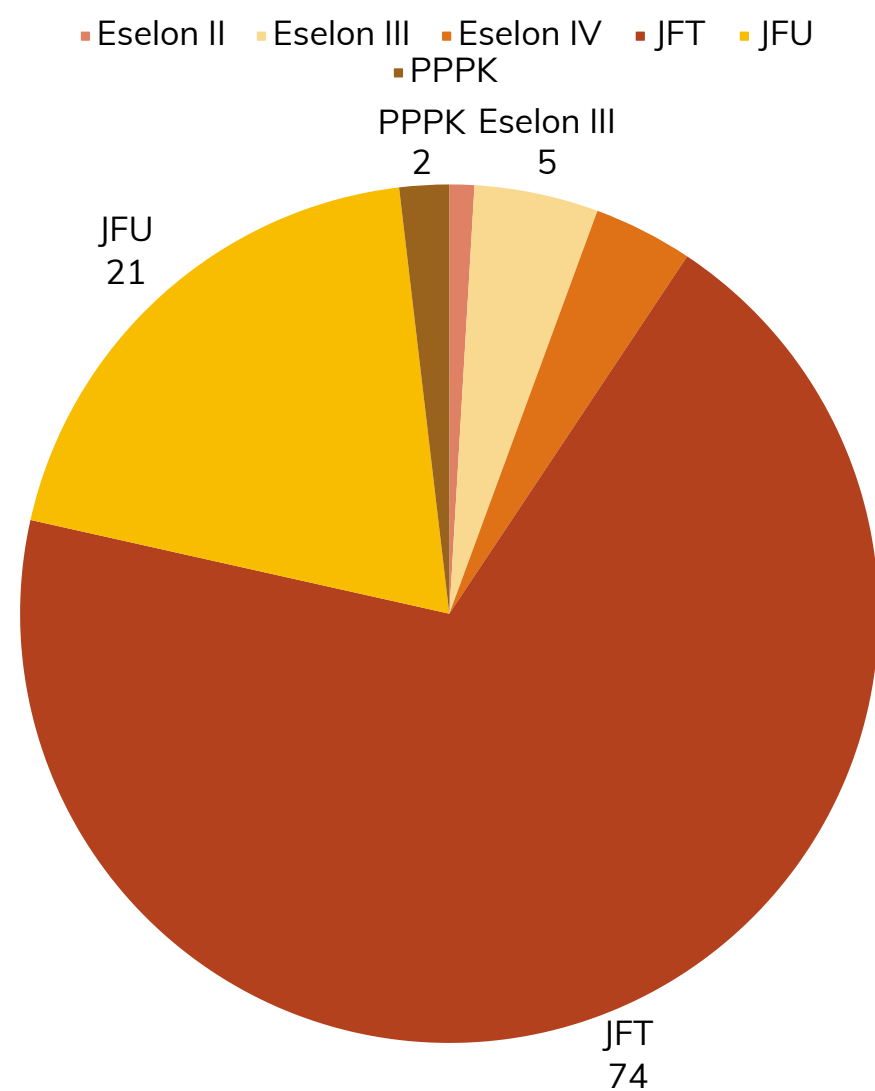
Pegawai Wanita



53.3%

Pegawai Pria

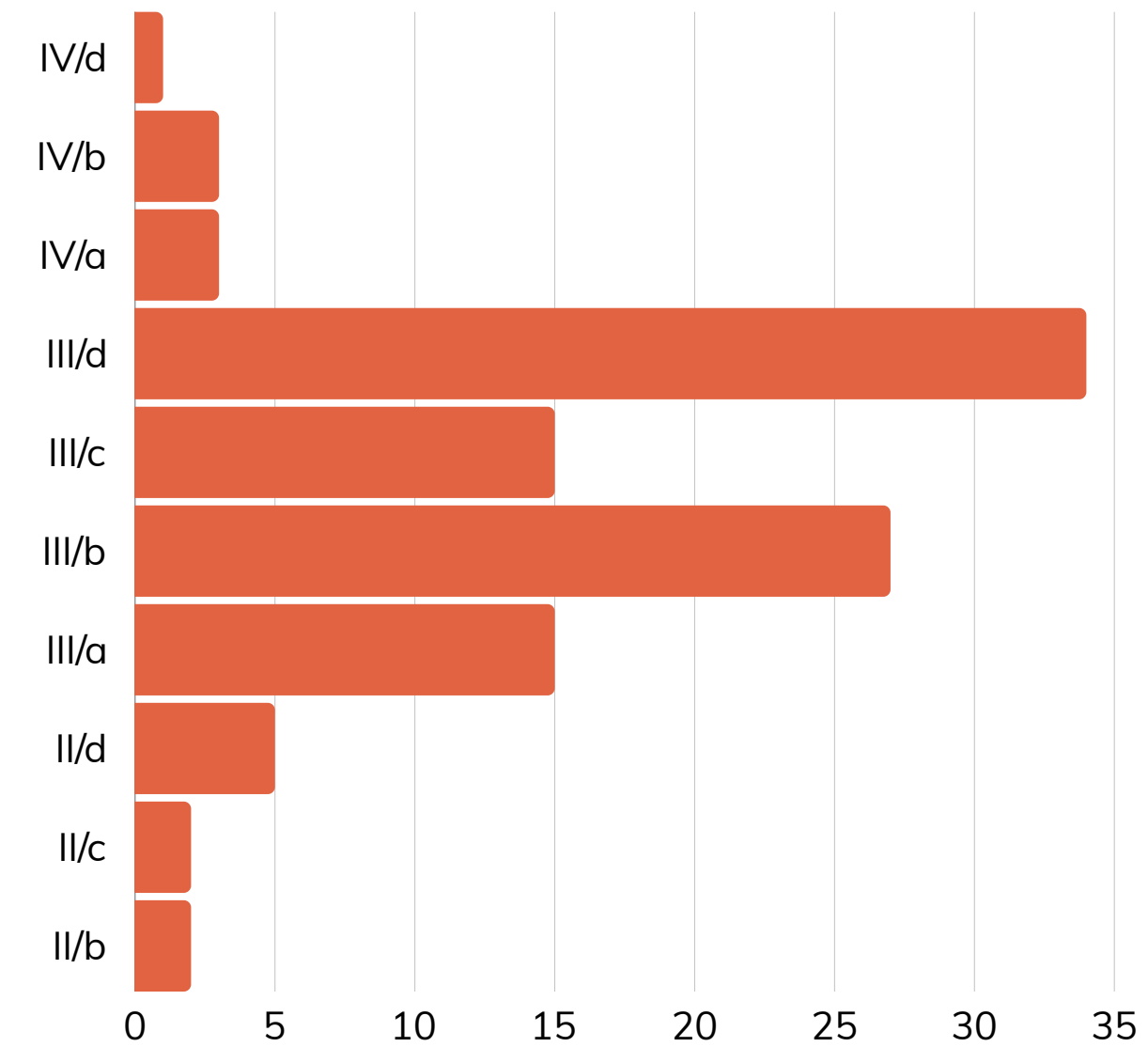
## JENIS JABATAN



## JENJANG PENDIDIKAN

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
S2	11
S1/DIV	52
DIII	12
SLTA/SEDERAJAT	32

## TINGKAT GOLONGAN





# 1.5 Lokasi dan Wilayah Kerja

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020, Kanreg III BKN Bandung berlokasi di Bandung, Jawa Barat dengan cakupan wilayah kerja yang terdiri dari 2 provinsi (Jawa Barat dan Banten). Pada wilayah kerja Provinsi Jawa Barat terdapat 28 (dua puluh delapan) instansi (meliputi: 1 instansi Pemerintah Provinsi, 18 Pemerintah Kabupaten dan 9 Pemerintah Kota), sedangkan pada Provinsi Banten, terdiri atas 9 (sembilan) instansi (meliputi: 1 Pemerintah Provinsi, 4 Pemerintah Kabupaten dan 4 Pemerintah Kota).



**415.680\***  
Total ASN instansi daerah yang dikelola oleh Kanreg III BKN Bandung di Jawa Barat

**306.785\***  
Total PNS instansi daerah yang dikelola oleh Kanreg III BKN Bandung

**108.895\***  
Total PPPK yang dikelola oleh Kanreg III BKN Bandung

\*Berdasarkan data per Desember 2023

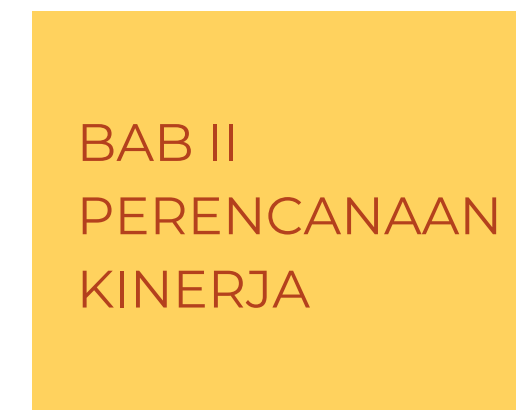
# 1.6 Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan laporan kinerja Kantor Regional III BKN Bandung tahun 2023 adalah sebagai berikut:



## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi dan peran strategis Kanreg III BKN Bandung



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, dan renja tahun 2023 serta rencana kerja dan anggaran serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.



## BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya



# BAB II PERENCANAAN KINERJA



## 2.1 Perencanaan Strategis

Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara sebagai lembaga penyelenggara manajemen kepegawaian negara berkomitmen untuk memajukan dan mengembangkan sistem manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kualitas pelayanan publik sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Kantor Regional III BKN menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kantor Regional III BKN Tahun 2020-2024 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan gambaran tujuan, sasaran strategis dan target hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan tugas dan fungsi, serta peran Kantor Regional III BKN sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Selanjutnya, Renstra Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara yang merupakan dokumen perencanaan Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Rencana kerja Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Selain itu, dalam mewujudkan *good governance*, Badan Kepegawaian Negara telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi *good governance*. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang terarah dan bertolak ukur yang jelas. Laporan akuntabilitas kinerja tidak hanya memuat hasil capaian organisasi tetapi juga sebagai sarana evaluasi yang digunakan untuk perbaikan guna meningkatkan pelayanan terhadap publik. Capaian pada laporan kinerja ini merupakan cerminan keberhasilan dari sasaran yang tertulis pada perjanjian kinerja (PK) Kanreg III BKN Bandung tahun 2023.

# Visi

Dalam rangka mengemban amanah mandat Undang-Undang, visi BKN Tahun 2020- 2024: adalah melaksanakan Visi Presiden Nomor 8 (delapan) yaitu “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih Efektif, dan Terpercaya” dengan melaksanakan arahan presiden nomor 4 (empat) yaitu “Penyederhanaan Birokrasi” dan Agenda pembangunan nomor 7 (tujuh) yaitu “Memperkuat stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik” dengan:



*Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong*

# Misi

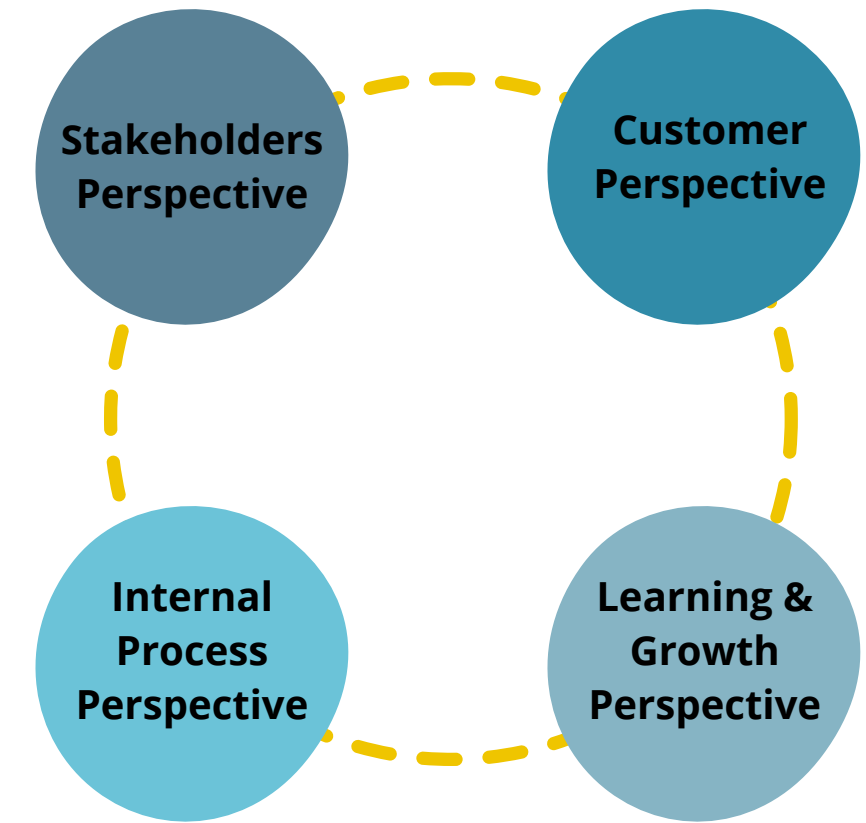
Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, serta Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada Badan Kepegawaian negara dan penjabaran dari misi Memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang aparatur sipil negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN, serta pengembangan sistem informasi ASN berdasarkan sistem merit, maka terdapat 5 pilar yang menjadi misi Badan Kepegawaian negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

- 01 Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN
- 02 Penyelenggaraan manajemen ASN
- 03 Penyimpanan informasi pegawai ASN
- 04 Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN
- 05 Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN

## 2.2 Tujuan dan Perencanaan Strategis

Sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada stakeholders. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengacu hal tersebut di atas dan dalam rangka implementasi SAKIP di lingkungan Badan Kepegawaian Negara maka sejak Tahun 2020, Badan Kepegawaian Negara telah menggunakan metode *Balanced Score Card (BSC)* dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja. Penggunaan metode BSC membentuk peta strategi dengan empat perspektif yang saling terkait, yaitu perspektif pengguna layanan (stakeholders), perspektif customer, perspektif internal process, dan perspektif learn and growth.



Penjelasan dari setiap indikator kinerja per Sasaran Strategis Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara tahun 2023. akan dijelaskan pada bagian selanjutnya

## 2.3 Perencanaan Kinerja 2020 – 2024

Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2020 - 2024

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
<b>SASARAN STRATEGIS 1</b> Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	<b>IKU 1.</b> Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di Wilayah Kantor Regional III BKN	5%	25%	50%	100%	100%
	<b>IKU 2.</b> Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kantor Regional III BKN	85%	90%	100%	100%	100%
<b>SASARAN STRATEGIS 2</b> Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	<b>IKU 3.</b> Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan Kantor Regional III BKN	85	88	95	97	97
	<b>IKU 4.</b> Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung	85	88	95	95	95
<b>SASARAN STRATEGIS 3</b> Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN sesuai Undang Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN	<b>IKU 5.</b> Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional III BKN Bandung	100%	100%	100%	100%	100%
<b>SASARAN STRATEGIS 4</b> Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	<b>IKU 6.</b> Persentase Sistem Informasi Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SIASN di Wilayah Kantor Regional III BKN.	90%	94%	96%	100%	100%
<b>SASARAN STRATEGIS 5</b> Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN	<b>IKU 7.</b> Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional III BKN	90%	93%	95%	100%	100%
<b>SASARAN STRATEGIS 6</b> Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN	<b>IKU 8.</b> Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditindaklanjuti di Kantor Regional III BKN.	30%	65%	85%	100%	100%
	<b>IKU 9.</b> Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional III BKN	77	77	80	80	88
<b>SASARAN STRATEGIS 7</b> Terwujudnya Manajemen Internal Kantor Regional III BKN yang efektif, efisien dan akuntabel	<b>IKU 10.</b> Persentase unit kerja dilingkungan Kantor Regional III BKN yang menerapkan sistem informasi yang terstandar	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>IKU 11.</b> Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional III BKN	80	81	82	83	85
	<b>IKU 12.</b> Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional III BKN	80	81	82	80	80
	<b>IKU 13.</b> Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional III BKN Bandung	97%	98%	91%	93	94
	<b>IKU 14.</b> Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat.	100%	100%	100%	100%	100%

## 2.4 Perjanjian Kinerja 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya

KODE SS	SASARAN STRATEGIS	KODE IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>				
SS.1	Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	IKU.1	Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN	100
		IKU.2	Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja Kantor Regional III BKN	100
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>				
SS.2	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	IKU.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional III BKN	97
		IKU.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional III BKN	95
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>				
SS.3	Terwujudnya Pemenuhan Kebijakan Teknis Manajemen ASN	IKU.5	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional III BKN	100
SS.4	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN	IKU.6	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN	100
SS.5	Terwujudnya Peningkatan Digitalisasi Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN	IKU.7	Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional III BKN	100
SS.6	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN	IKU.8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN	100
<b>LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE</b>				
SS.7	Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	IKU.9	Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional III BKN	80
		IKU.10	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar di Kantor Regional III BKN	100
		IKU.11	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional III BKN Bandung	83
		IKU.12	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional III BKN	80
		IKU.13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional III BKN	93
		IKU.14	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional III BKN	100

## 2.5 Rencana Kerja dan Anggaran 2023

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2023, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023, yang terdiri dari program sebagai berikut:


Kode/ KRO	Kegiatan	Pagu Alokasi	
4842	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp.	50.000.000
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Rp.	25.000.000
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	Rp.	25.000.000
4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp.	15.616.432.000
EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp.	15.300.467.000
EBB.951	Layanan Sarana Internal	Rp.	200.000.000
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	Rp.	15.000.000
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp.	60.000.000
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp.	40.965.000
4846	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN	Rp.	315.000.000
BAB.010	Nota Persetujuan CLTN dan Pertimbangan Teknis Pengaktifan PNS	Rp.	15.000.000
BAB.008	Penetapan Mutasi Lainnya	Rp.	40.000.000
BAB.003	Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pejabat Negara	Rp.	90.000.000
BAB.002	Penetapan Kenaikan Pangkat	Rp.	90.000.000
BAB.001	Penetapan NIP	Rp.	80.000.000
4847	Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi ASN	Rp.	155.000.000
FAA.002	Dokumen Arsip Kepegawaian ASN	Rp.	155.000.000
4848	Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN	Rp.	575.000.000
BDB.004	Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Wilayah IV	Rp.	575.000.000
<b>TOTAL PAGU ALOKASI</b>		Rp.	<b>16.711.432.000</b>

Jakarta, 19 Desember 2022

Pihak Kedua  
Pit. Kepala Badan Kepegawaian Negara

  
Bima Haria Wibisana  
NIP.196107191989031001

Pihak Pertama  
Kepala Kantor Regional BKN III Bandung

  
Heri Susilowati  
NIP.196410091991032001

# Tabel Capaian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2023	REALISASI 2023	KINERJA 2023	NSS	NKP	
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>							
<b>SASARAN STRATEGIS 1</b> Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	<b>IKU 1.</b> Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di Wilayah Kantor Regional III BKN	100%	91.89%	91.89%	95.95	31.66	
	<b>IKU 2.</b> Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kantor Regional III BKN	100%	100%	100%			
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>							
<b>SASARAN STRATEGIS 2</b> Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	<b>IKU 3.</b> Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan Kantor Regional III BKN	97	96.34	99.32%	98.13	32.28	
	<b>IKU 4.</b> Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung	95	92.10	96.95%			
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>							
<b>SASARAN STRATEGIS 3</b> Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN sesuai Undang Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN	<b>IKU 5.</b> Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional III BKN Bandung	100%	100%	100%	100	32.31	
<b>SASARAN STRATEGIS 4</b> Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	<b>IKU 6.</b> Persentase Sistem Informasi Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SIASN di Wilayah Kantor Regional III BKN.	100%	100%	100%	100		
<b>SASARAN STRATEGIS 5</b> Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN	<b>IKU 7.</b> Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional III BKN	100%	91.60%	91.60%	91.60		
<b>SASARAN STRATEGIS 6</b> Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN	<b>IKU 8.</b> Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditindaklanjuti di Kantor Regional III BKN.	100%	100%	100%	100		
<b>LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE</b>							
<b>SASARAN STRATEGIS 7</b> Terwujudnya Manajemen Internal Kantor Regional III BKN yang efektif, efisien dan akuntabel	<b>IKU 9.</b> Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional III BKN	80	87.72	109.65	97.94		32.19
	<b>IKU 10.</b> Persentase unit kerja dilingkungan Kantor Regional III BKN yang menerapkan sistem informasi yang terstandar	100%	95%	94.63%			
	<b>IKU 11.</b> Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional III BKN	83	77.29	93.12%			
	<b>IKU 12.</b> Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional III BKN	80	70	87.50%			
	<b>IKU 13.</b> Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional III BKN Bandung	93	93	100.37%			
	<b>IKU 14.</b> Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat.	100%	100%	100%			

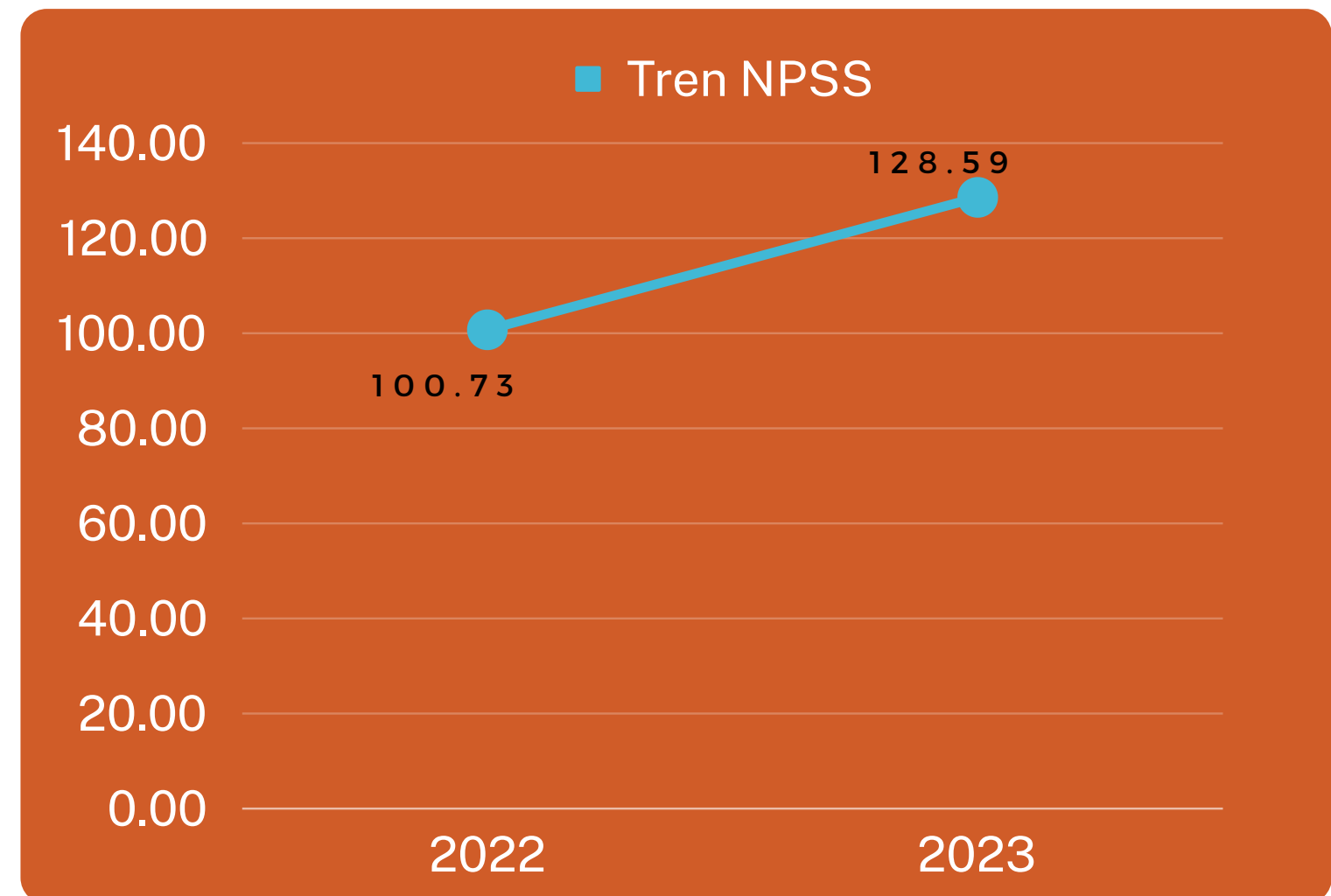
# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



## 3.1 Capaian Kinerja 2023

Secara umum formula dalam pengukuran kinerja mengacu pada Keputusan Kepala BKN Nomor 1.8/KEP/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan BKN. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Dari seluruh capaian kinerja dari setiap indikator diperoleh Nilai Kerja Perspektif (NKP) dan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang NPSS merupakan akumulasi NKP yang memiliki bobot masing-masing 25%.

Pada tahun 2023 Kantor Regional III BKN Bandung memperoleh NPSS sebesar 128,59. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 dengan positif gap sebesar 27.86, seperti tergambar pada grafik berikut ini.



Grafik 3.1 Perbandingan Tren NPSS Tahun 2021 dan 2022

## 3.2 Pengukuran Kinerja 2023

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2023, Kantor Regional III BKN Bandung menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) indikator kinerja utama yang perlu dicapai pada tahun 2023. Kantor Regional III BKN berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada stakeholders.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut penjelasan setiap indikator kinerja per Sasaran Strategis Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara tahun 2023.

### SS. 1 Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN

**IKU 1.** *Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN Sesuai NSPK di Kantor Regional III BKN*

**IKU 2.** *Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Kantor Regional III BKN*

## Stakeholder Perspective

### Sasaran Strategis 1 (SS. 1)

Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme diperlukan indikator dalam bentuk penilaian indeks implementasi NSPK Manajemen ASN sebagai bentuk kendali agar terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN bermakna bahwa diharapkan instansi pemerintah di Indonesia mampu menerapkan manajemen ASN yang profesional sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Selain NSPK, dalam mencapai sasaran ini, diperlukan juga indikator yang menandakan bahwa ASN di instansi-instansi pemerintahan termasuk dalam kriteria profesional, maka ditetapkan juga ukuran persentase yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif jumlah instansi pemerintah yang telah melakukan pengukuran indeks profesionalitas pegawai ASN.





# IKU 1

*Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di Wilayah Kantor Regional III BKN Bandung*

Pelaksanaan penilaian Indeks NSPK Manajemen ASN merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BKN berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta merupakan upaya untuk mendorong perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di instansi pemerintah dalam implementasi Manajemen ASN.

Penilaian Indeks NSPK Manajemen ASN ini memiliki 18 elemen dalam pelaksanaan manajemen ASN, yaitu:

- 1) Penyusunan dan penetapan kebutuhan,
- 2) Pengadaan ASN,
- 3) Pengangkatan ASN,
- 4) Pangkat,
- 5) Jabatan,
- 6) Pola Karir,
- 7) Pengembangan Karier ASN,
- 8) Mutasi,
- 9) Penilaian Kinerja,
- 10) Penggajian, Tunjangan dan Fasilitas,
- 11) Penghargaan,
- 12) Displin,
- 13) Cuti,
- 14) Kode Etik,
- 15) Pemberhentian,
- 16) Jaminan Pensiun dan Hari Tua,
- 17) Pensiun,
- 18) Perlindungan.

## FORMULA CAPAIAN IKU 1

$$IKU\ 1 = \frac{n}{N} \times 100\%$$

n= Jumlah instansi yang mendapatkan nilai A dan B pada penilaian indeks implementasi NSPK manajemen ASN

N= Jumlah instansi pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional III BKN

## Analisis Capaian IKU 1

Indikator ini merupakan suatu ukuran persentase jumlah instansi pemerintah yang telah melaksanakan manajemen ASN sesuai dengan NSPK (dengan nilai minimal A & B) yang diukur melalui indeks implementasi NSPK manajemen ASN. Indikator ini bertujuan sebagai instrumen utama pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan manajemen ASN pada instansi pemerintah,

Secara umum, penilaian indeks NSPK Manajemen ASN untuk tahun berjalan akan diterbitkan pada akhir bulan Februari tahun berikutnya. Hal ini disebabkan bahwa selama tahun penilaian, objek penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN dari instansi dilakukan sampai dengan akhir bulan Desember tahun berjalan. Sehingga diperlukan waktu kurang lebih 2 bulan untuk melakukan proses verifikasi, validasi, dan penetapan nilai akhir indeks NSPK. Dari penilaian indeks NSPK untuk tahun penilaian 2023, secara garis besar dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

- Penilaian audiwan/man.
- Panel Penilaian Audiwan/man untuk menyepakati hasil penilaian di tingkat Kantor Regional dan Pusat
- Panel JPT Pratama untuk memastikan kesamaan perlakuan penilaian pada setiap elemen.
- Panel instansi/akhir, untuk harmonisasi penilaian indeks NSPK dengan penilaian lain seperti indeks sistem merit, LHP BPK, dan penilaian lain sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 116 tahun 2022.

Dari hasil penilaian indeks NSPK Manajemen ASN tahun penilaian 2023, saat ini telah masuk pada Panel tingkat 2. Capaian IKU 1 selama periode renstra 2020 - 2024 disajikan melalui tabel berikut

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Jumlah instansi bernilai A &amp; B (Baik)</b>	N/A	3	18	34	N/A	37
<b>Target</b>	N/A	5%	25%	50%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	N/A	8.11%	48.64%	91.89%	100%	-
<b>Kinerja</b>	N/A	162.2%	194.6%	184%	100%	-

Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1 Tahun 2023

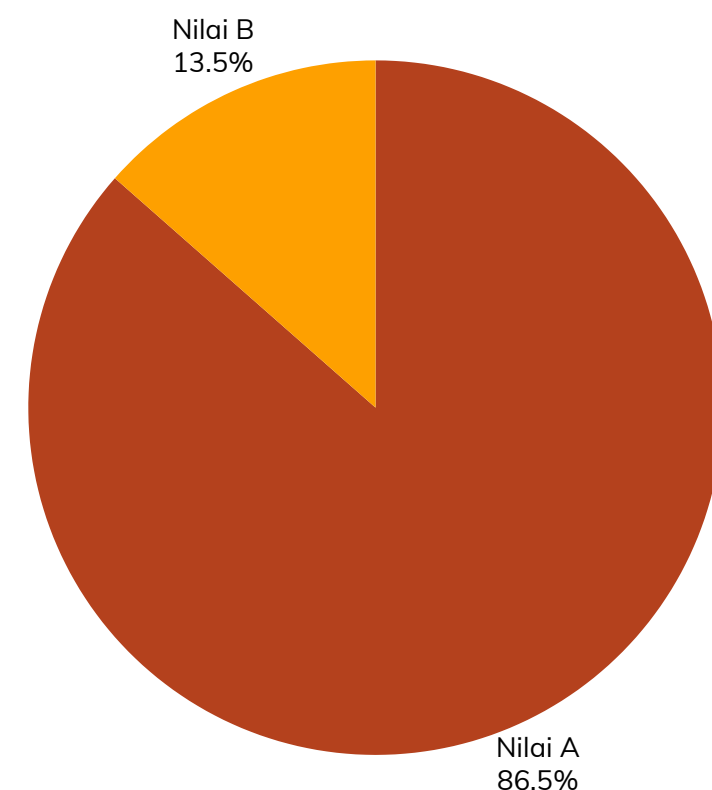
Capaian indeks NSPK pada instansi pemerintah dibawah wilayah kerja Kanreg III BKN Bandung diterangkan pada Tabel 3.2 berikut

No	Nama Instansi	Kategori Indeks NSPK
1	Pemerintah Prov. Jawa barat	A
2	Pemerintah Kab. Ciamis	A
3	Pemerintah Kab. Karawang	A
4	Pemerintah Kab. Kuningan	A
5	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	A
6	Pemerintah Kota Bandung	A
7	Pemerintah Kota Depok	A
8	Pemerintah Kota Sukabumi	A
9	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	A
10	Pemerintah Kab. Cianjur	A
11	Pemerintah Kab.Garut	A
12	Pemerintah Kota Banjar	B
13	Pemerintah Kab. Serang	B
14	Pemerintah Kota Serang	A
15	Pemerintah Kota Cirebon	A
16	Pemerintah Kab. Cirebon	A
17	Pemerintah Kab. Bandung	A
18	Pemerintah Kab. Lebak	B
19	Pemerintah Kab. Cimahi	A
20	Pemerintah Kab. Sumedang	A
21	Pemerintah Kab. Purwakarta	A
22	Pemerintah Kab. Subang	A
23	Pemerintah Kota Cilegon	A
24	Pemerintah Kota Bogor	A
25	Pemerintah Kota Bekasi	A

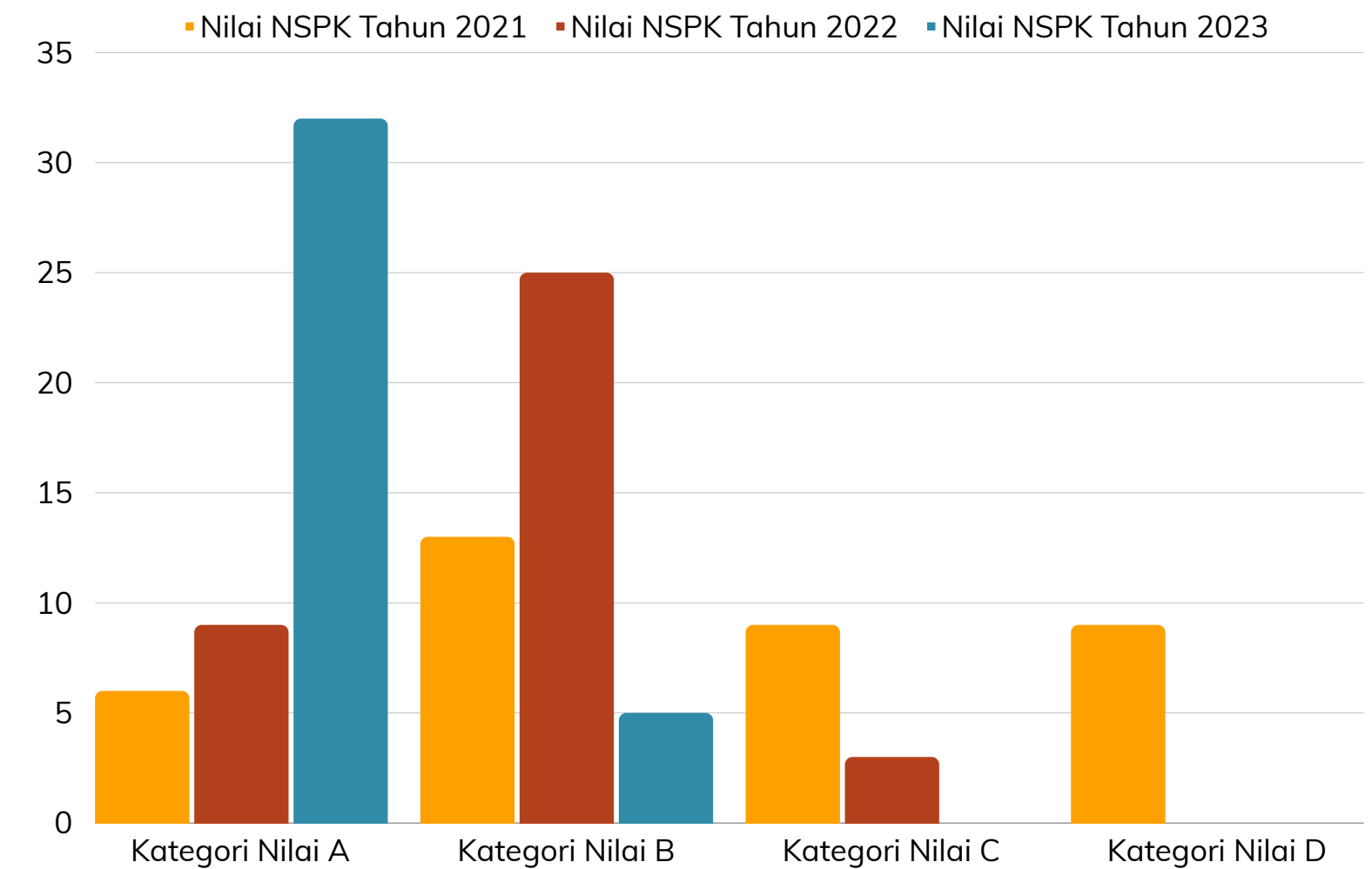
No	Nama Instansi	Kategori Indeks NSPK
26	Pemerintah Kab. Majalengka	A
27	Pemerintah Kab. Pandeglang	A
28	Pemerintah Kab. Bogor	A
29	Pemerintah Kab. Bandung Barat	B
30	Pemerintah Kab. Pangandaran	A
31	Pemerintah Kota Tangerang	A
32	Pemerintah Kab. Bekasi	A
33	Pemerintah Kab. Tangerang	A
34	Pemerintah Kab. Sukabumi	A
35	Pemerintah Prov. Banten	B
36	Pemerintah Kota Tasikmalaya	A
37	Pemerintah Kab. Indramayu	B

Tabel 3.2 Capaian indeks NSPK pada Instansi

Berdasarkan penilaian dari audiwan Kanreg III BKN, terdapat 32 instansi berkategori nilai A (Unggul) dan 5 Instansi bernilai B (Baik), Oleh karena itu, dengan target yang ditentukan sebanyak 37 instansi bernilai A & B, maka realisasi capaian IKU 1 adalah 100%. Perbandingan capaian indeks NSPK instansi pemerintah dibawah wilayah kerja Kanreg III BKN berdasarkan kategori nilainya dapat dilihat pada bagan berikut ini



Dengan target yang diberikan sebesar 100% maka persentase kinerja tahun 2022 terhadap IKU 1 adalah 100%. terdapat kenaikan target dan capaian yang cukup signifikan dari tahun ke tahun dimulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Koordinasi secara intens antara audiwan Kanreg III BKN, audiwan BKN Pusat, bersama dengan PIC Indeks NSPK pemerintah daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pencapaian IKU ini. Adapun laporan review pengisian indeks NSPK dapat diakses pada tautan sebagai berikut: <http://bit.ly/NSPKKanreg3tahun2023>



Upaya yang dilakukan oleh Kanreg III BKN Bandung untuk mencapai target pada IKU 1 ini adalah sebagai berikut:

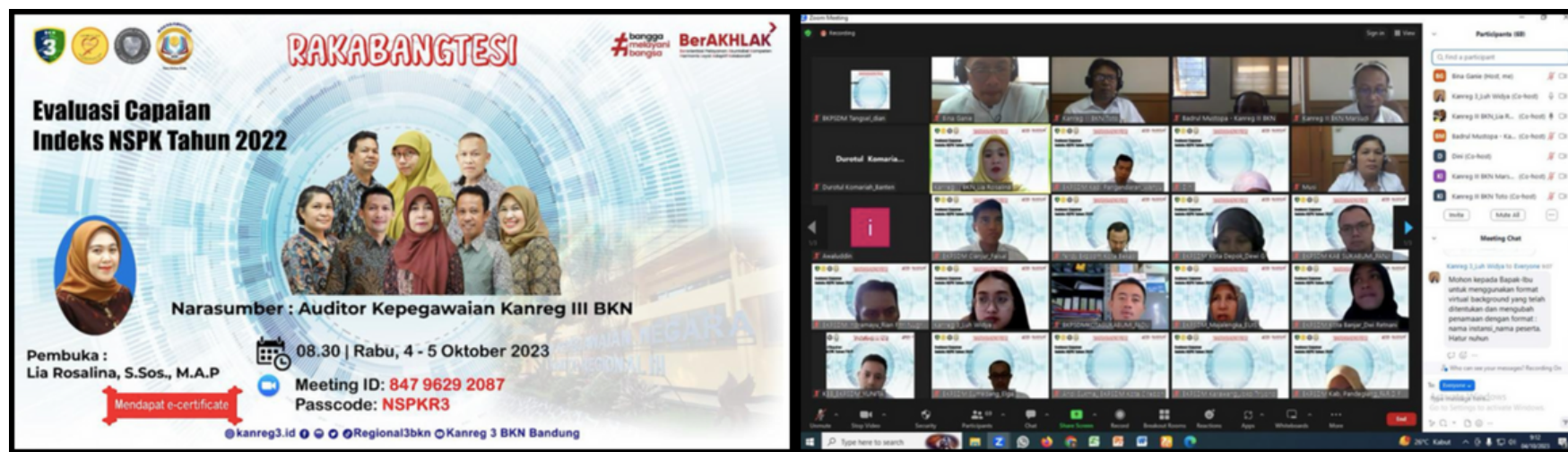
- Melakukan koordinasi dan dialog kinerja secara internal yaitu dengan para audiwan Kantor Regional III BKN Bandung melalui rapat koordinasi dan rapat evaluasi kinerja untuk menyamakan persepsi dan mengevaluasi permasalahan ataupun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode tertentu.



Gambar 3.1 Rapat Evaluasi Kinerja Internal Bidang PDSK Tahun 2023

- Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi pada pelaporan kinerja tahun 2022, yaitu mengoptimalkan kolaborasi dengan BKN Pusat dan terus melaksanakan pembinaan, pengawasan, terhadap seluruh instansi di wilayah kerja Kantor Regional III BKN secara intensif seperti halnya koordinasi, layanan konsultasi, bimtek dan sosialisasi terkait aplikasi yang digunakan untuk penilaian Indeks NSPK, maka Kanreg III BKN melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:
  - Evaluasi capaian indeks NSPK Tahun 2022 yang dihadiri oleh perwakilan seluruh instansi dibawah wilayah kerja Kanreg III BKN dan materi disampaikan langsung oleh audiwan Kanreg III BKN. Acara tersebut dilaksanakan tanggal 4 -5 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting.
  - Kegiatan pengawasan dan pengendalian NSPK ManASN 2023 dengan mengundang PIC NSPK daerah ke Kanreg III BKN pada tanggal 11-12 Desember 2023 dengan agenda kegiatan yaitu reu NSPK 2022 dan reu dokumen untuk penilaian NSPK tahun 2023.

- Membuka stand pembinaan kepegawaian pada acara beberapa acara yang diadakan oleh Kanreg III BKN, Pembukaan stand pembinaan telah dilakukan sebanyak 5 kali, salah satunya saat Rapat Evaluasi Layanan Kepegawaian Tahun 2022 dan Outlook Tahun 2023 di Aula Multatuli Pemerintah Kabupaten Lebak, pada tanggal 6 s.d 7 Februari 2023 agar instansi dapat berkonsultasi terkait penilaian NSPK. Selain itu, pada acara yang sama juga instansi diberikan materi berkaitan dengan penguatan implementasi NSPK manajemen ASN dalam menghadapi Pilkada yang dinarasumberi oleh Deputi Pengawasan dan Pengendalian BKN, Bapak Otok Kuswandaru, M.Si



Gambar 3.2 Kegiatan Evaluasi capaian Indeks NSPK Tahun 2022



Gambar 3. 4 Stand Pembinaan Kepegawaian dan Pemberian Materi Terkait Penguatan NSPK

Hasil evaluasi nilai NSPK pada tahun 2021 dan 2022 mengindikasikan bahwa adanya kesulitan dari daerah untuk meingkatkan nilai NSPK dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu:

- Asistensi terkait NSPK kepada instansi Wilayah Kerja Kantor Regional

- Kurangnya SDM yang memang khusus menangani nilai NSPK instansi.
- Instansi telah mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk keperluan penilaian NSPK, hanya saja masih terdapat beberapa dokumen yang kurang (contohnya, diperlukan dokumen untuk dua tahun terakhir, namun yang diunggah hanya satu tahun terakhir).



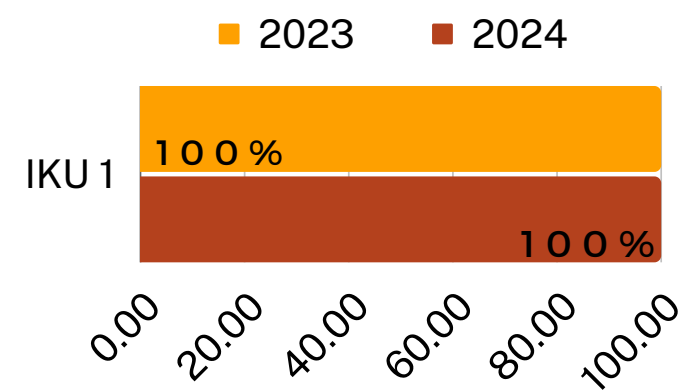
Gambar 3.3 Asistensi terkait NSPK kepada instansi Wilayah Kerja Kantor Regional

Atas dasar tersebut, maka pada tahun 2023 dibentuk strategi agar kekurangan yang terjadi pada tahun 2021 tidak terjadi kembali. Oleh karena itu, audiwan Kanreg III BKN Bandung membantu dalam melakukan penelaahan dokumen sebelum instansi mengunggah dokumen ke sistem. Penelaahan dilakukan melalui Zoom dan Whatsapp. Strategi ini dianggap cukup berhasil karena dapat meningkatkan presentasi nilai NSPK instansi dibawah wilayah kerja Kanreg III BKN Bandung secara cukup signifikan.

Adapun penyebab ketidakberhasilan dalam mencapai target IKU ini diantaranya:

- Keterbatasan SDM pada instansi daerah.
- Terbatasnya waktu penginputan dokumen
- Seringnya terjadi rotasi/mutasi pada instansi daerah tanpa diiringi dengan *transfer knowledge* sehingga informasi terputus.
- Beberapa instansi yang belum mencapai nilai A memiliki kendala sebagai berikut:
  - a.Prov. Banten: masih belum sepenuhnya memahami eviden yang diperlukan untuk penilaian indeks NSPK.
  - b.Kab. Indramayu: masih belum sepenuhnya memahami eviden yang diperlukan untuk penilaian indeks NSPK.

Jika dibandingkan dengan target menengah IKU 1 yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 100%, maka capaian saat ini sudah sesuai dengan target tahun 2024. Data tersebut disajikan melalui grafik 3.1 berikut ini



Grafik 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1 Tahun 2023 & 2024

Capaian tahun 2023 sudah sesuai dengan target pada renstra yang perlu dicapai di tahun 2024. Untuk mempertahankan capaian yang sudah ada, maka berikut rencana rekomendasi yang dapat dilakukan kedepannya. Berikut rencana rekomendasi yang akan dilakukan guna mempertahankan capaian kinerja dan memudahkan instansi pemerintah dalam melaksanakan tata kelola manajemen ASN yaitu sebagai berikut:

1. Menyarankan agar instansi membuat tim kerja.
2. Mengingatkan instansi secara berkala terkait penginputan dokumen

3. Menghimbau agar setiap terjadi rotasi/mutasi untuk dilakukan estafet pekerjaan serta sharing informasi berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dijalani oleh pegawai yang mengampu pekerjaan sebelumnya.

4. Terus mengoptimalkan kolaborasi dan koordinasi dengan BKN Pusat.

# IKU 2

*Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Kantor Regional III BKN Bandung*

Sesuai dengan PermenPANRB No. 38 Tahun 2018 disebutkan bahwa Indeks Profesionalitas merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Selain itu, berdasarkan Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, BKN melaporkan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN ke KemenPANRB dengan membuat aplikasi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang dapat diakses pada website <https://ip-jasn.bkn.go.id>

## FORMULA CAPAIAN IKU 2

$$IKU\ 2 = \frac{N}{X} \times 100\%$$

$N = \sum$  Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas pegawai ASN  
 $X = \sum$  Instansi Pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional III BKN



# Analisis Capaian IKU 2

Indeks Profesionalitas ASN diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat sipil negara dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Indeks ini menjadi ukuran sejauh mana aparatur sipil negara telah memenuhi standar-standar profesionalitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Standar profesionalitas terdiri dari beberapa dimensi yakni kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan disiplin. Kantor Regional III BKN Bandung berperan dalam mendorong instansi pemerintah dibawah wilayah kerjanya untuk mengukur indeks profesionalitas ASN (IPASN) serta meningkatkan kualitas dari IPASN tersebut.

Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas pegawai ASN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	N/A	35	37	37	37	37
<b>Target</b>	N/A	85%	90%	100%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	N/A	94.6%	100%	100%	100%	-
<b>Kinerja</b>	N/A	111%	111%	100%	100%	-

Tabel 3.3 Perbandingan Target, Realisasi, dan Kinerja IKU 2 Tahun 2023

Sejak tahun 2021 hingga saat ini, seluruh instansi dibawah wilayah kerja Kanreg III BKN Bandung (37 instansi) telah melaksanakan pengukuran terhadap IPASN sehingga realisasi terhadap IKU 2 ini adalah 100%. Adapun terdapat penurunan kinerja disebabkan oleh meningkatkan target dari tahun ke tahun namun dikarenakan realisasi sudah maksimal hingga 100%, maka persentase kinerja menjadi menurun. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, yaitu tahun 2024, maka tidak ada jarak selisih pada capaian karena sampai dengan tahun ini sudah mencapai target yang diharapkan pada tahun 2024.

Hasil capaian yang baik ini tentunya perlu diikuti dengan upaya untuk meningkatkan nilai IPASN dari setiap instansi. Berdasarkan laporan hasil rekapitulasi, nilai rata-rata IPASN dibawah wilayah kerja Kanreg III BKN Bandung adalah 73.16 dengan kategori sedang. Rincian nilai per dimensi

untuk pengukuran IPASN tahun 2023 instansi dibawah wilayah kerja Kanreg III BKN adalah sebagai berikut:

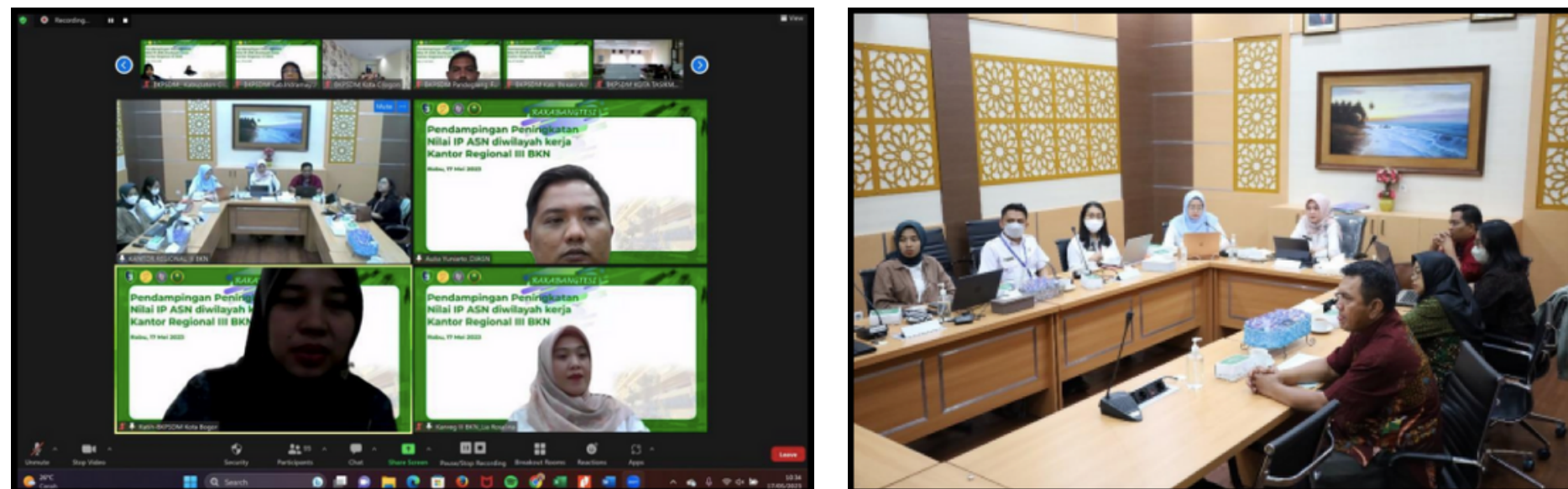
Jumlah Instansi	Kualifikasi (bobot 25%)	Kompetensi (bobot 40%)	Kinerja (bobot 30%)	Disiplin (bobot 5%)	Nilai Indeks	Keterangan
37	21.34	22.08	24.73	5.00	73.16	Sedang

Tabel 3.4 Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023

Pengukuran dan Penilaian Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan dengan mengukur 4 (empat) dimensi, yang meliputi dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Masing-masing dimensi memiliki bobot penilaian dan kategori. Pada bobot penilaian, terdapat komponen yang dinilai yakni Kualifikasi dengan porsi sebesar 25%, Kompetensi sebesar 40%, Kinerja sebesar 30%, dan Disiplin yang memiliki bobot 5%. Instansi dibawah wilayah kerja Kanreg III BKN dengan nilai IPASN tertinggi adalah Jawa Barat dengan nilai 94.03 (kategori sangat tinggi), sedangkan instansi dengan nilai IPASN terendah adalah Kota Tasikmalaya dengan nilai 60.27 (kategori sangat rendah).

Sejalan dengan capaian dari IKU 2 yang sudah sesuai dengan target yang ditentukan maka selanjutnya Kanreg III BKN perlu berupaya meningkatkan nilai IPASN instansi daerah. Upaya dalam meningkatkan nilai IPASN instansi pemerintah dibawah wilayah kerja Kanreg III BKN Bandung dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- Melaksanakan pendampingan peningkatan nilai IPASN dengan mengundang narasumber dari Direktorat Jabatan ASN dan dihadiri oleh instansi daerah di wilayah kerja Kanreg III BKN. Kegiatan ini dilaksanakan pada 17 Mei 2023.



Gambar 3.5 Kegiatan Pendampingan Peningkatan Nilai IPASN

- Melaksanakan kegiatan Rabu di Kampus Pengembangan Kompetensi (rakabangtesi). Rakabangtesi merupakan kegiatan seminar atau knowledge sharing terutama terkait bidang kepegawaian. Kemudian peserta yang telah mengikuti acara rakabangtesi akan diberikan sertifikat. Program rakabangtesi ini bertujuan untuk mengakomodir instansi daerah dalam meningkatkan nilai IPASN. Beberapa kegiatan rakabangtesi yang telah dilaksanakan mengangkat tema Sosialisasi Tata Cara Pengusulan Pencantuman Gelar Akademik, Peningkatan IP ASN Wilayah Kerja Kanreg III BKN, Upaya Peningkatan Nilai Indeks NSPK Tahun 2023.

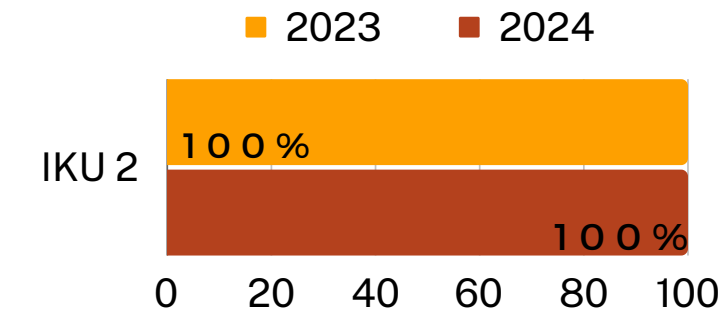


Gambar 3.6 Kegiatan RAKABANGTESI Tata Cara Pencantuman Gelar



Gambar 3.7 Kegiatan RAKABANGTESI 2023

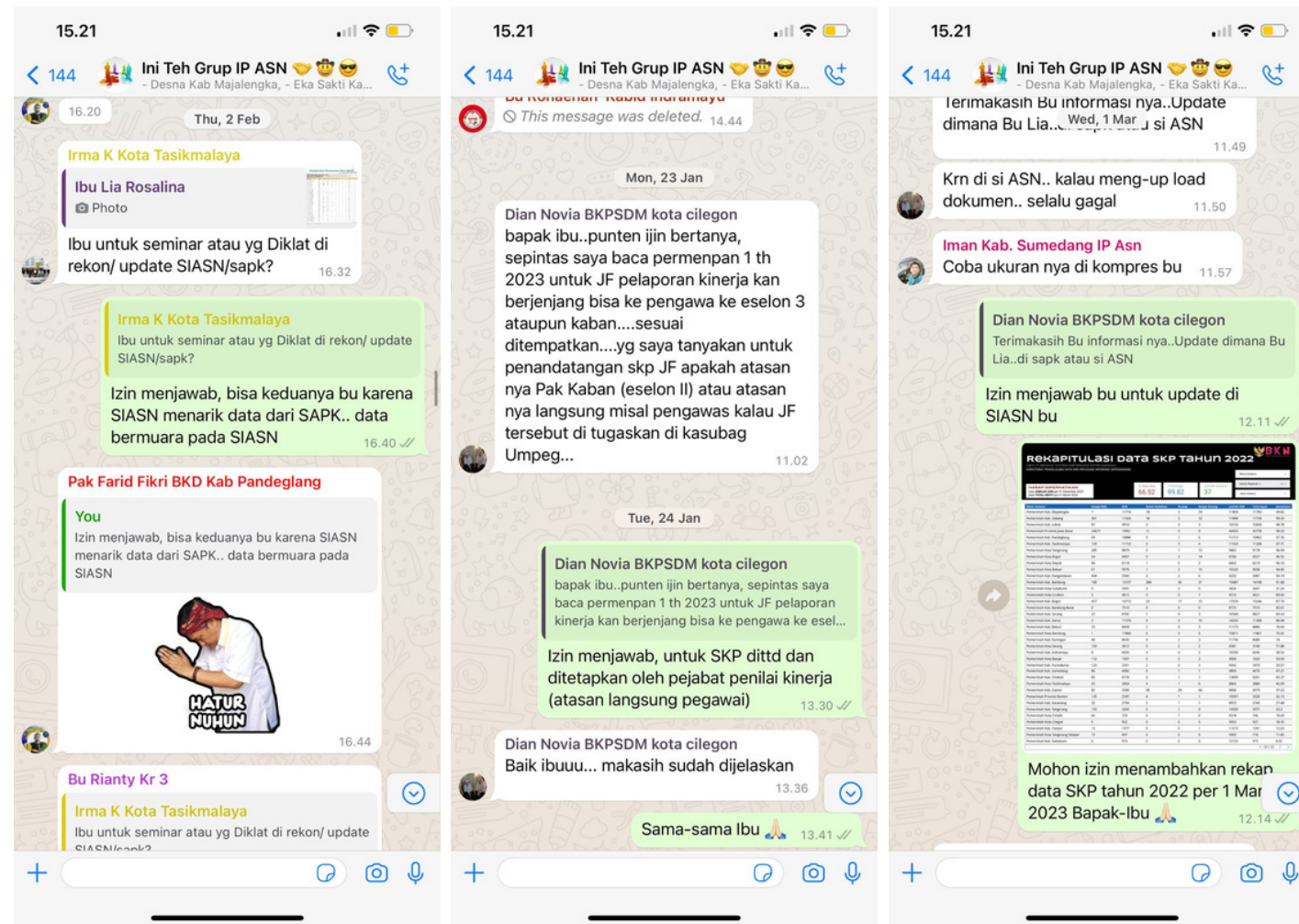
- Membentuk grup melalui Whatsapp bersama dengan instansi daerah di wilayah kerja Kanreg III BKN khusus untuk pembahasan, koordinasi, dan follow up kendala terkait IPASN. Melalui grup tersebut, PIC dari Kanreg III BKN juga melakukan beberapa hal seperti:
  - Mengingatkan instansi daerah untuk mempersiapkan pengukuran IPASN tahun depan
  - Mengarahkan agar instansi daerah lebih meningkatkan perolehan nilai IPASN.
  - Mengarahkan instansi menggunakan alternatif lain untuk pengembangan kompetensi minim budget seperti CMB, dan menghimbau agar setiap terjadi rotasi/mutasi agar melakukan estafet pekerjaan serta sharing informasi.



Grafik 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2 Tahun 2023 & 2024

Adapun upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mempertahankan tingkat pelaksanaan pengukuran dan meningkatkan nilai indeks sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi secara berkala dan follow up kendala untuk kemudian disampaikan kepada Direktorat Jabatan ASN sebagai bahan evaluasi perbaikan ke depannya.
2. Melakukan pendampingan atau memberikan pembinaan kepada ASN instansi daerah mengenai pentingnya IP ASN.



Gambar 3.8 Tangkapan Layar Group Whatsapp IPASN Intansi Wilker Kanreg III BKN

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKU 2 ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat kendala dalam pembaruan data pendukung dimensi IP ASN melalui SIASN.
2. Masih ditemukan ASN instansi daerah yang belum memahami pentingnya IP ASN.

Jika dibandingkan dengan target menengah IKU 2 yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 100%, maka capaian saat ini sudah berhasil mencapai target tahun 2024. Maka dari itu, capaian ini perlu dipertahankan. Data tersebut disajikan melalui grafik 3.2 berikut ini

# Customer Perspective

## Sasaran Strategis 2 (SS. 2)

### Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima

Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa Kantor Regional III BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima. Guna menciptakan suatu ukuran tertentu dalam mengukur kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan, khususnya yang



Gambar 3.9

berasal dari instansi pemerintah, Kanreg III BKN Bandung melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat. Diharapkan dengan adanya angka indeks ini dapat terpetakannya kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik serta hasil pengukuran indeks dapat menjadi dasar peningkatan kinerja dalam pelaksanaan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembinaan manajemen ASN dan Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional III BKN sesuai dengan Permenpan & RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

**IKU 3. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan di Kantor Regional III BKN**

**IKU 4. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepegawaian yang Diselenggarakan di Kantor Regional III BKN**

# IKU 3

*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung*

Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN, Kantor Regional III BKN Bandung berupaya untuk memberikan layanan pembinaan yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepegawaian.

Selama tahun 2022, Kanreg III BKN Bandung telah melaksanakan tugas dan fungsi pemberian layanan kepegawaian dan pembinaan. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN tersebut dapat berupa layanan konsultasi, penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis serta fasilitasi yang dilaksanakan oleh Bidang PDSK (Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian) Kantor Regional III BKN Bandung. Sebagai evaluasi dan kontrol terhadap kegiatan yang diselenggarakan, bidang PDSK membagikan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pembinaan kepada setiap penerima binaan di setiap akhir kegiatan. Pelaksanaan survei IKM pembinaan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

## FORMULA CAPAIAN IKU 3

Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
2,60 – 3,532	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
1,00 – 2,5966	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik

Adapun unsur-unsur Pelayanan yang dinilai terdiri dari:

- U1 Persyaratan
- U2 Sistem, mekanisme dan prosedur
- U3 Waktu pelaksanaan
- U4 Biaya/Tarif
- U5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- U6 Kompetensi Pelaksana
- U7 Perilaku Pelaksana
- U8 Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- U9 Sarana dan Prasarana

Keterangan :  
Terdapat pengembangan unsur penilaian sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk memastikan kegiatan pembinaan dapat memenuhi tujuan dari penyelenggaraan kegiatan pembinaan



# IKU 3

*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung*

## Analisis Capaian IKU 3

Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan untuk mengukur sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pembinaan manajemen ASN yang diselenggarakan oleh Kanreg III BKN sehingga hasil penilaian tersebut dapat menjadi hasil evaluasi agar kedepannya dapat meningkatkan pembinaan kepada instansi pemerintah.

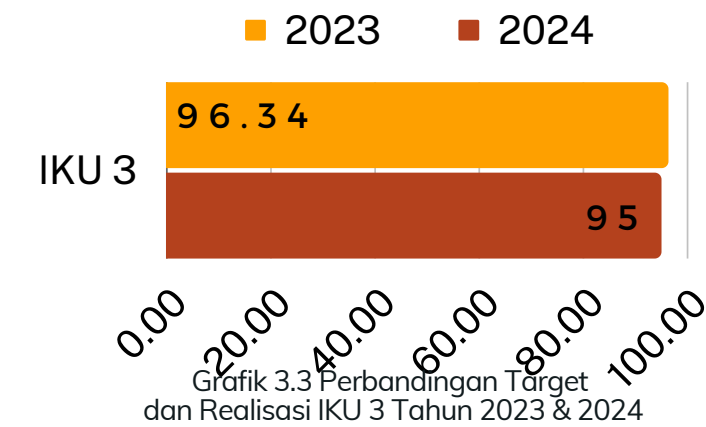
Survei diselenggarakan dengan menyebarkan kuesioner elektronik kepada responden yang merupakan penerima binaan Kanreg III BKN. Pengisian kuesioner dilakukan secara anonim untuk memberikan kenyamanan bagi responden dalam mengisi kuesioner yang sesuai sehingga diharapkan dapat menjamin objektivitas. Hasil capaian IKM pembinaan yang diperoleh Kanreg III BKN Bandung disajikan pada Tabel 3.5

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Target</b>	N/A	85	88	95	97	95
<b>Realisasi</b>	N/A	85.1	89.7	96.4	96.34	-
<b>Kinerja</b>	N/A	100.1%	102%	101.5%	99.32	-

Tabel 3.5 Perbandingan Target, Realisasi, dan Kinerja IKU 2 Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengolahan data survei, didapatkan bahwa nilai IKM pembinaan Kanreg III BKN Bandung tahun 2023 adalah sebesar 96.34. Meskipun tidak mencapai target, namun capaian ini sudah termasuk ke dalam kategori sangat baik. Hasil nilai IKM ini didapatkan dari rata-rata perolehan nilai IKM triwulan (TW) 1-4 tahun 2023. Diketahui bahwa nilai IKM TW 1 adalah sebesar 97.42, TW 2 sebesar 95.17, TW 3 sebesar 95.15, dan TW 4 sebesar 97.62.

Secara umum, nilai IKM pembinaan Kanreg III BKN mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Pada tahun 2023 ini, terdapat penurunan nilai yaitu sebesar 0.06 dibandingkan dengan tahun 2022. Namun jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertulis pada renstra, capaian IKM pembinaan Kanreg III BKN sudah melampaui target yang diharapkan dimana target yang tertulis pada renstra adalah 95. Perbandingan capaian IKM Kanreg III BKN dengan target renstra disajikan melalui Grafik 3.3 berikut



Berdasarkan hasil analisis perolehan nilai IKM pembinaan, diketahui bahwa unsur yang mendapatkan nilai tertinggi adalah U4 (Biaya/Tarif), sedangkan unsur dengan nilai terendah adalah U3 (Waktu Pelaksanaan Pembinaan). Beberapa upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai IKM pembinaan, yaitu sebagai berikut ini:

- Menjalankan program Pembinaan Deket Kanreg Tilu (PDKT), yaitu dengan membuka stand khusus pembinaan kepegawaian pada beberapa acara Kanreg yang dilakukan sebanyak 5 kali yaitu pada acara:
  - Rapat Evaluasi Layanan Kepegawaian Tahun 2022 dan Outlook Tahun 2023 di Aula Multatuli Pemerintah Kabupaten Lebak, pada tanggal 6 s.d 7 Februari 2023.
  - Rapat Evaluasi Layanan Kepegawaian di Garut pada tanggal 15 Mei 2023.
  - Rapat Evaluasi Layanan Kepegawaian pada tanggal 23 Juli 2023 di Cirebon.
  - Rapat Persiapan Ujian Seleksi CASN 2023 (telah dilaksanakan pada 11 - 13 Oktober 2023 di Garut.
  - Rapat Evaluasi Seleksi CASN 2023 (telah dilaksanakan pada 6 - 8 Desember 2023 di Tasikmalaya.
- Melakukan evaluasi secara internal terhadap capaian IKM pembinaan.
- Melakukan penyesuaian terhadap pertanyaan pada kuesioner agar lebih mudah dipahami oleh responden.



Gambar 3.10 Stand Pembinaan pada Acara Rapat Evaluasi Kepegawaian di Cirebon

Unsur nomor 4 (Biaya/Tarif) memperoleh nilai tertinggi dengan nilai NRR tertimbang/Unsur sebesar 0,425 hal tersebut berarti responden merasa puas atas pemberian pembinaan manajemen ASN oleh fasilitator Kantor Regional III BKN tidak pernah memasang biaya dan tarif di luar ketentuan. Sedangkan unsur nomor 3 (Waktu Pelaksanaan Pembinaan) memperoleh mendapatkan nilai terendah dengan nilai NRR tertimbang/unsur sebesar 0,412, hal tersebut karena menurut responden Waktu Penyampaian Materi Pembinaan dirasa belum cukup sesuai. Rata-rata waktu pembinaan adalah sekitar 2 jam. Namun terkadang beberapa instansi merasa bahwa durasi waktu pembinaan masih kurang. Maka dari itu, rekomendasi untuk dilakukan kedepannya adalah perlu dilakukannya evaluasi khususnya terkait dengan waktu pelaksanaan dan berkoordinasi dengan penyelenggara.



Gambar 3. 11 Konsultasi dan Asistensi Instansi Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN



Gambar 3. 12 Konsultasi dan Asistensi Instansi Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN

# IKU 4

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung

Kantor Regional III BKN Bandung terus berkomitmen untuk dapat memberikan pelayanan prima dengan profesionalitas terhadap masyarakat/PNS sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian melalui proses yang cepat, tepat, dan terintegrasi dengan didukung peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan sebagai respond atas tuntutan kinerja ASN yang terus meningkat. Untuk mengukur tingkat keberhasilan komitmen tersebut, maka digunakanlah metode pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kepegawaian yang diselenggarakan oleh Bidang, Pensiun, Mutasi, Informasi Kepegawaian dan PDSK.

## FORMULA CAPAIAN IKU 4

Berdasarkan Permenpan & RB Nomor 14 Tahun 2017

Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
2,60 – 3,532	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik

### Adapun unsur-unsur Pelayanan yang dinilai terdiri dari:

- U1 Persyaratan
- U2 Sistem, mekanisme dan prosedur
- U3 Waktu penyelesaian
- U4 Biaya/Tarif
- U5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- U6 Kompetensi Pelaksana
- U7 Perilaku Pelaksana
- U8 Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- U9 Sarana dan Prasarana

## Analisis Capaian IKU 4

Layanan kepegawaian yang dinilai melalui capaian IKM ini meliputi layanan dari seluruh bidang yang ada di Kantor Regional III BKN. Penilaian terhadap nilai IKM ini dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner elektronik secara anonim sehingga responden dapat mengisi survei tanpa perlu mengisikan data diri. Hal tersebut dianggap efektif untuk memberikan kenyamanan dan menjamin objetifitas responden. Hasil capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan oleh Kantor Regional III BKN disajikan melalui Tabel 3.6 berikut ini

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Target</b>	N/A	85	88	95	95	95
<b>Realisasi</b>	82.60	96.75	86.4	92.40	92.10	-
<b>Kinerja</b>	N/A	113.8%	98.18%	97.2%	96.9%	-

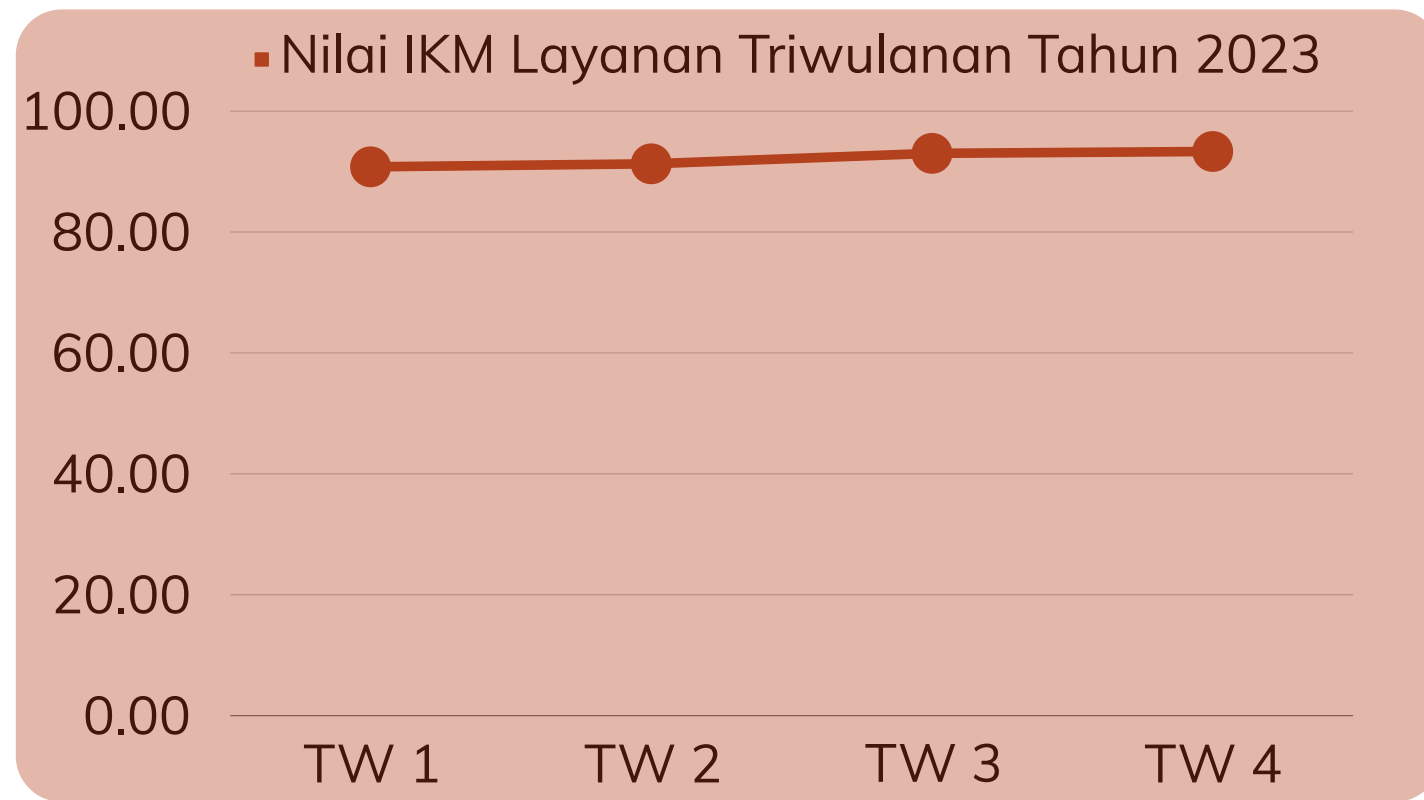
Tabel 3.6 Perbandingan Target, Realisasi, dan Kinerja IKU 4 Tahun 2023

Dengan target yang ditetapkan sebesar 95, maka kinerja IKU 4 ini adalah 96.9%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, maka terdapat penurunan nilai sebesar 0.3. Meskipun realisasi tahun 2023 ini belum dapat memenuhi target, namun sudah masuk ke dalam kategori sangat baik.

Meskipun terdapat jarak selisih antara realisasi dan target 2023, namun tingkat keberhasilan tercermin dari tidak adanya aduan dari masyarakat terkait dengan pelayanan di Kanreg III. Selain itu juga terdapat kenaikan nilai service level agreement (SLA) pelayanan kepegawaian, yaitu sebagai berikut:

1. SLA Layanan pemberhentian naik dari 91% menjadi 94.26% yang berarti 94.26% telah dikerjakan ≤ 1 hari
2. SLA Layanan pindah instansi naik dari 78% menjadi 78.6%, yang berarti 78.6% usulan telah dikerjakan ≤ 2 hari
3. SLA Layanan KP naik dari 98.21% menjadi 98.98%, yang berarti 98.98% usulan telah dikerjakan ≤ 2 hari

Selama tahun 2023 ini, sudah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai IKM pelayanan. Upaya tersebut menghasilkan capaian yang baik karena tercermin dari adanya kenaikan nilai IKM dari triwulan 1 hingga triwulan 4. Nilai IKM setiap triwulan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut: triwulan 1 90.78; triwulan 2 91.28; triwulan 3 93.01; triwulan 4 93.32. Data capaian IKM Kanreg III BKN dari triwulan ke triwulan disajikan melalui Grafik 3.4 berikut ini



Grafik 3.4 Nilai IKM Layanan Triwulanan Tahun 2023

Untuk meningkatkan capaian IKU 4 ini maka didukung dengan beberapa upaya yaitu sebagai berikut:

- Rapat Evaluasi Layanan Kepegawaian Tahun 2022 dan Outlook Tahun 2023 di Aula Multatuli Pemerintah Kabupaten Lebak, pada tanggal 6 s.d 7 Februari 2023.
- Rapat Evaluasi Layanan Kepegawaian di Garut pada tanggal 15 Mei 2023.
- Rapat Evaluasi Layanan Kepegawaian pada tanggal 23 Juli 2023 di Cirebon.



Gambar 3.14 Rapat Evaluasi Layanan Kepegawaian Kantor Regional III BKN

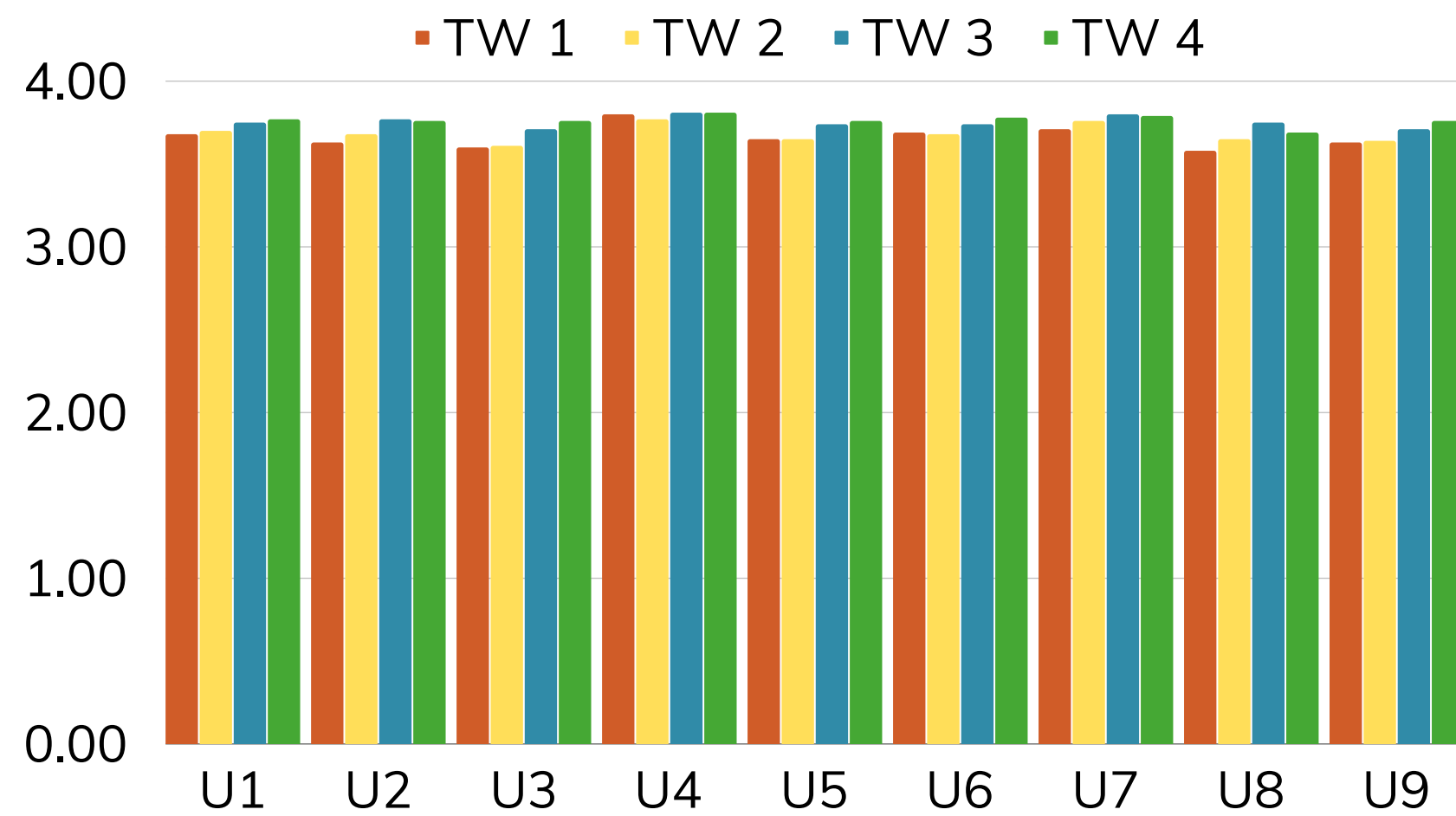
- Rapat Persiapan Ujian Seleksi CASN 2023 (telah dilaksanakan pada 11 - 13 Oktober 2023 di Garut).
- Rapat Evaluasi Seleksi CASN 2023 (telah dilaksanakan pada 6 - 8 Desember 2023 di Tasikmalaya).
- Dilakukan pengoptimalan program “SiOlin”, yaitu layanan konsultasi secara online sehingga tidak terjadi tatap muka langsung. Hal ini dilakukan untuk menghindari gratifikasi serta mengefisienkan anggaran pemerintah. Namun saat ini masih direspon kurang baik dikarenakan instansi lebih memilih tatap muka secara langsung.
- Program Riung (Ruang Informasi Umum Kanreg III BKN), selama tahun 2023 sudah berhasil direalisasikan hingga 60 video produk informasi publik (target awal 60 video).
- Layanan penetapan NIP CASN (dari 47.641 usulan masuk, keseluruhannya sudah selesai diproses sehingga capaiannya sebesar 100%).
- Layanan Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda/Dudanya (dari 12.785 usulan masuk, keseluruhannya sudah selesai diproses, sehingga capaiannya adalah 100%)
- Layanan penetapan nota persetujuan kenaikan pangkat (dari 54795 usul yang masuk, telah diselesaikan sebanyak 53.918 pertek kenaikan pangkat, sehingga capaiannya sebesar 98%).
- Layanan Penetapan Karis telah diselesaikan 4728 kartu dari 4908 usul masuk, sedangkan karsu sudah diselesaikan 4296 dari 4740 usulan masuk.
- Layanan Penetapan CLTN dan Pertek Pengaktifan PNS (dari 206 usulan masuk, keseluruhannya sudah selesai diproses, sehingga capaiannya sudah 100%)
- Layanan PMK (telah diselesaikan sebanyak 284 pertek dari 433 usulan yang masuk)
- Layanan pindah instansi (telah diselesaikan sebanyak 379 pertek dari 411 usulan yang masuk)

Layanan konsultasi pelayanan instansi di wilayah kerja Kanreg III BKN Bandung dilakukan di ruangan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) seperti disajikan pada Gambar 3.13



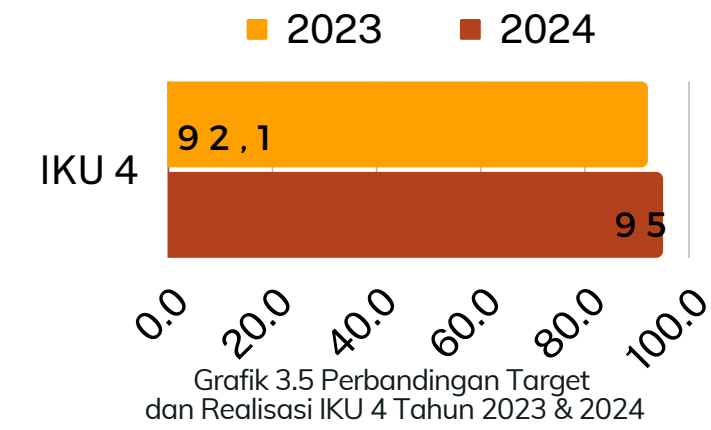
Gambar 3.13 Konsultasi Pelayanan Instansi Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN

Hasil nilai setiap unsur dari capaian nilai IKM per triwulan tahun 2023 disajikan pada Grafik 3.6 berikut



Grafik 3.6 Nilai Setiap Unsur IKM Layanan Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan target menengah IKU 4 yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 95, maka masih terdapat nilai yang harus dikejar karena masih terdapat selisih jarak sebesar 2.9. Perbedaan target 2024 dengan realisasi 2023 disajikan melalui grafik 3.5 berikut ini



Grafik 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 4 Tahun 2023 & 2024

Hasil nilai IKM pelayanan menunjukkan bahwa unsur "penanganan pengaduan, saran, dan masukan" mendapatkan nilai terendah. Hal tersebut disebabkan karena dalam beberapa waktu terakhir ini seringkali terjadi kendala pada SIASN, namun pegawai Kanreg III BKN tidak memiliki akses secara langsung menindaklanjuti keluhan terkait kendala pada SIASN. Oleh karena itu, penanganan terhadap pengaduan, saran, serta masukan, terutama berkaitan dengan SIASN, tidak dapat dikelola dengan cepat karena diperlukan koordinasi terlebih dahulu dengan BKN pusat.

Dikarenakan akses terhadap SIASN sejauh ini masih menjadi wewenang dari pusat, maka rekomendasi untuk dilakukan kedepannya adalah dengan terus meningkatkan koordinasi dengan SINKA BKN yaitu dengan cara menginventarisir kendala yang dihadapi kemudian menyampaikan kendala tersebut ke SINKA BKN secara lisan ketika sedang rapat ataupun melalui grup Whatsapp Messenger yang dibuat oleh BKN Pusat untuk penyampaian kendala mengenai SIASN. Anggota di dalam grup Whatsapp Messenger tersebut terdiri dari perwakilan dari SINKA BKN serta pegawai dari bidang pengangkatan dan pensiun serta mutasi dan status kepegawaian Kanreg III BKN sehingga dianggap efektif dalam penyampaian kendala mengenai SIASN.



## Internal Process Perspective

Dalam *internal process perspective*, instansi menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengukur poin ini, pemimpin harus senantiasa mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan. Apakah semuanya dijalankan sesuai dengan metode yang ditetapkan atau malah melenceng dari proses bisnis yang berlaku. Perspektif proses internal merefleksikan proses-proses kunci di instansi yang dapat dioptimalkan dan dapat meningkatkan value layanan yang dapat membuat publik puas. Dengan kondisi publik yang puas atas pelayanan instansi, maka kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah akan meningkat.



# IKU 5

*Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional III BKN*

Dalam menjalankan manajemen dan operasionalnya sehari-hari, setiap organisasi atau Lembaga tentu membutuhkan suatu regulasi. Demikian juga dengan Kantor Regional III BKN sebagai lembaga pemerintah non kementerian, telah membuat sejumlah regulasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal dan tentunya seluruh regulasi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Regulasi Teknis yang dibuat di Kantor Regional III BKN merupakan tidak lanjut dari Regulasi Teknis yang dibuat oleh BKN Pusat. Untuk regulasi yang bersifat internal, regulasi disampaikan dalam bentuk Nota Dinas yang ditujukan bagi pegawai di Lingkungan Kantor Regional III BKN. Seluruh regulasi internal yang telah dibuat tersebut, harus dipatuhi oleh seluruh pegawai yang berada di Lingkungan Kantor Regional III BKN.

Sedangkan untuk regulasi yang bersifat eksternal, regulasi disampaikan dalam bentuk surat dinas yang ditujukan kepada instansi pusat dan daerah di wilayah kerja Kantor Regional III BKN. Seluruh regulasi eksternal yang telah dibuat tersebut, harus dipatuhi oleh seluruh instansi pusat dan daerah yang berada di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN.

Dengan adanya penerapan regulasi ini, diharapkan dapat membantu pengendalian dan kontrol dinamika manajemen ASN di Kantor Regional III BKN sehingga kegiatan pelayanan kepegawaian dapat berjalan dengan baik.

## FORMULA CAPAIAN IKU 5

IKU ini mengukur perbandingan pemenuhan regulasi teknis manajemen ASN yang harmonis dengan aturan regulasi teknis manajemen ASN yang harmonis dengan aturan regulasi teknis pada saat ini (untuk mendukung peningkatan pelayanan di wilayah kerja kantor regional Kantor Regional III BKN) dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$IKU\ 5 = \frac{n}{N} \times 100\%$$

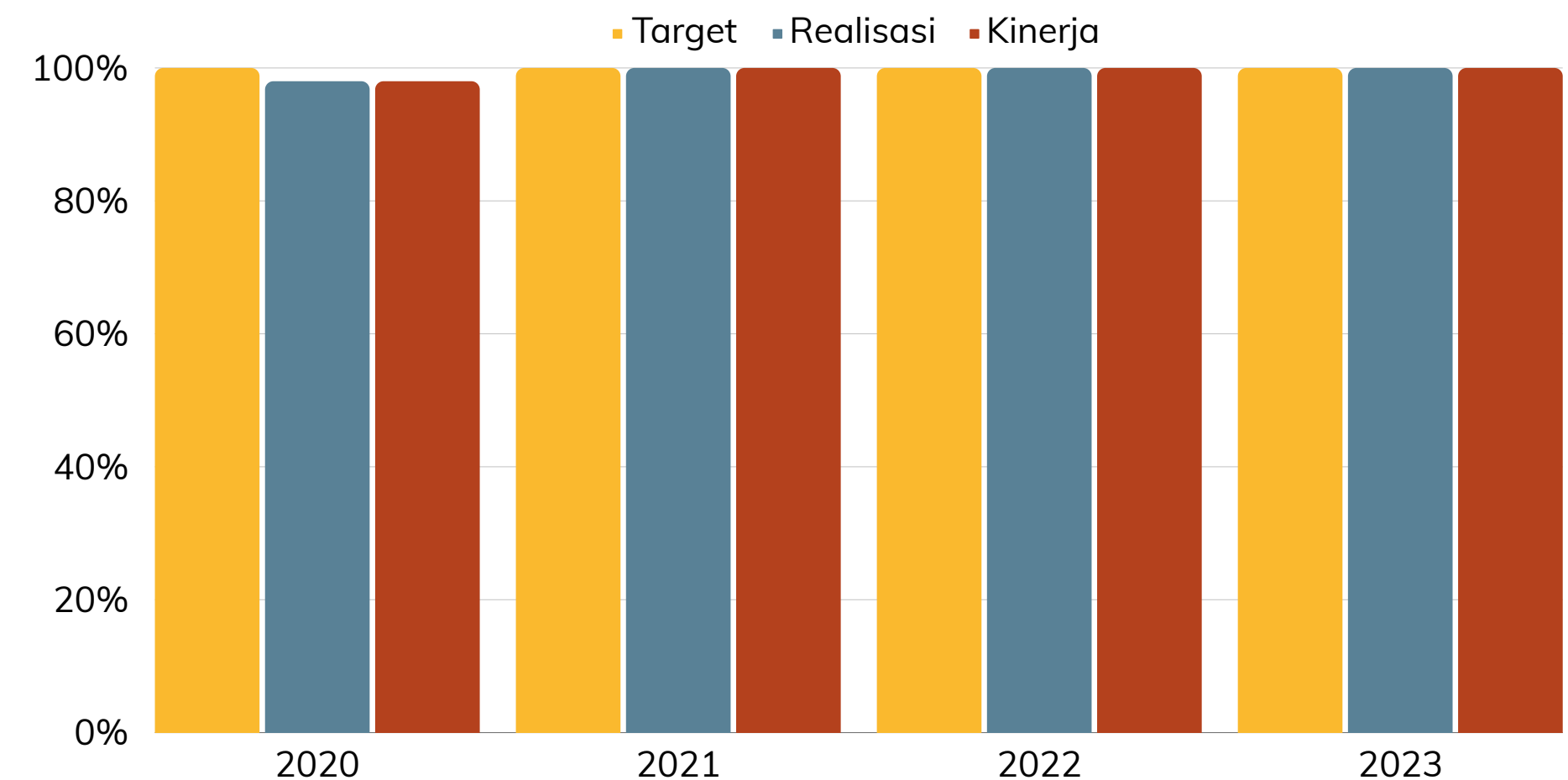
n= Jumlah regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN yang harmonis  
N= Jumlah Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional III BKN

# Analisis Capaian IKU 5

Regulasi teknis serta instrumen manajemen ASN merupakan hal yang esensial dalam menunjang kegiatan pada Kantor Regional III BKN. Kanreg III BKN merupakan perpanjangan tangan dari BKN Pusat di wilayah Jawa Barat, oleh karena itu diperlukan penyesuaian antara regulasi BKN Pusat dengan Kanreg III BKN

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Target</b>	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	N/A	98%	100%	100%	100%	-
<b>Kinerja</b>	N/A	98%	100%	100%	100%	-

Tabel 3.7 Perbandingan Target, Realisasi, dan Kinerja IKU 5 Tahun 2023



Dari tahun ke tahun, Kanreg III selalu menindaklanjuti regulasi teknis dari BKN Pusat. pada 2020, sempat terjadi ketidakcapaian target, namun tidak ditemui performance gap dari tahun 2021 hingga 2022, begitu pula dari tahun 2022 hingga 2023.

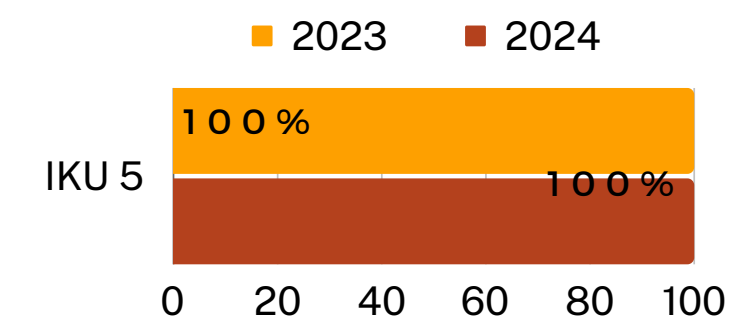
Capaian kinerja indikator ini untuk tahun 2023 terealisasi 100% dengan target sebesar 100%, dengan merealisasikan 4 regulasi teknis dan instrument manajemen ASN yang mendukung pelayanan di wilayah kerjanya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Rencana Regulasi Teknis Tahun 2023	Realisasi Regulasi Teknis	Rencana Waktu Realisasi	Tanggal Penetapan Regulasi	Keterangan
1	Nota Dinas Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor: 95/HM.06.01/ND/A/2023 tanggal 17 Mei 2023, yang merupakan tindak lanjut Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor:15722/A/TU.02.03/2023 tanggal 17 Mei 2023, tentang Pedoman penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni Tahun 2023	9/2/ND/KR.III/V/2023 tentang Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Kamis 01 Juni 2023.	Juni (TW II)	26 Mei 2023	Sudah ditetapkan, diedarkan dan dilaksanakan.
2	Nota Dinas Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor:165/HM.06.01/ND/A/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang merupakan tindak lanjut Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B761/M/S/TU.00.04/08/2023 tanggal 08 Agustus 2023, tentang Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2023	15/2/ND/KR.III/VIII/2023 tentang Pelaksanaan Upacara Bendera Dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Kamis 17 Agustus 2023.	Agustus (TW III)	14 Agustus 2023	Sudah ditetapkan, diedarkan dan dilaksanakan.
3	Memo Kepala Kantor Regional III BKN Nomor:21/1/ND/KR.III/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 perihal Tata Urusan Dalam Penggunaan Seragam Dinas dan atribut di Lingkungan Kantor Regional III BKN	17/1/ND/KR.III/IX/2023 tentang Penggunaan Seragam Dinas dan atribut di Lingkungan Kantor Regional III BKN	September 2023 (TW III)	4 September 2023	Sudah ditetapkan, diedarkan dan dilaksanakan.
4	Nota Dinas Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor: 208/HM.06.01/ND/A/2023 tanggal 26 September 2023, yang merupakan tindak lanjut Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 31328/MPK.F/TU.02.03/2023 tanggal 15 September 2023	21/2/ND/KR.III/IX/2023 tentang Pelaksanaan Upacara Bendera Dalam Rangka Memperingati Hari Kesaktian Pancasila Minggu 1 Oktober 2023.	Oktober (TW IV)	26 September 2023	26 September 2023

No	Rencana Regulasi Teknis Tahun 2023	Realisasi Regulasi Teknis	Rencana Waktu Realisasi	Tanggal Penetapan Regulasi	Keterangan
2	Nota Dinas Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor: 230/HM.06.01/ND/A/2023 tanggal 24 Oktober 2023, yang merupakan tindak lanjut Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor: 133 Tahun 2023 tanggal 12 Oktober 2023	27/2/ND/KR.III/X/2023 tentang Pelaksanaan Upacara Bendera Dalam Rangka Memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke-95 Tahun 2023 Senin 30 Oktober 2023.	Oktober (TW IV)	26 Oktober 2023	Sudah ditetapkan, diedarkan dan dilaksanakan.

Tabel 3.8 Perbandingan Target, Realisasi, dan Kinerja IKU 6 Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah IKU 5 yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 100%, maka capaian tahun ini sudah mencapai target yang diharapkan. Maka untuk kedepannya perlu untuk dipertahankan agar tidak terjadi penurunan. Data tersebut disajikan melalui grafik 3.7 berikut ini



Grafik 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 5 Tahun 2023 & 2024

Untuk mempertahankan capaian baik yang sudah dicapai pada tahun ini, maka seterusnya diperlukan monitoring atas surat-surat yang sudah dikeluarkan atau diterbitkan untuk para stakeholder serta membuat tetap konsisten untuk menindaklanjuti Surat Edaran atau Peraturan yang diterbitkan oleh BKN Pusat terkait pengelolaan internal.



# IKU 6

## Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di Kantor Regional III BKN Bandung



Persentase sistem informasi kepegawaian pengelola ASN yang terintegrasi dengan SIASN adalah perhitungan terintegrasinya aplikasi kepegawaian ASN secara menyeluruh berbasis teknologi dengan pengintegrasian SIMPEG dan SIASN melalui web service sehingga mewujudkan proses layanan manajemen kepegawaian yang efektif. Integrasi data merupakan proses menggabungkan atau menyatukan dua atau lebih sebuah data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data (data warehouse). Mekanisme integrasi data BKN sendiri menggunakan web service, di mana prosesnya adalah sistem berkomunikasi langsung dengan sistem lain melalui web service yang sudah disediakan oleh BKN. Web service adalah sebuah aplikasi lintas platform yang dapat diakses melalui sebuah jaringan di mana dalam aplikasi tersebut terdapat fungsi- fungsi yang digunakan untuk interaksi antara aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Untuk keamanan, BKN menggunakan oauth versi 2 dan authentication protocol menggunakan basic auth. Instansi sebagai pengguna web service harus meminta token terlebih dahulu sebelum dapat mengakses datanya.

### FORMULA CAPAIAN IKU 6

IKU ini tujuannya adalah untuk mengukur persentase integrasi SI ASN dengan SIMPEG di wilayah kerja Kantor Regional III BKN dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$IKU\ 6 = \frac{n}{X} \times 100\%$$

n = Instansi Pemerintah Daerah yang telah terintegrasi dengan SIASN baik melalui webservice maupun SIMPEGNAS  
X = Jumlah Instansi Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kantor Regional III BKN

# Analisis Capaian IKU 6

Sebagai upaya peningkatan integrasi antara BKN dengan instansi pemerintah, BKN terus melakukan penataan data dan sistem informasi kepegawaian untuk mewujudkan satu data ASN sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Terkait dengan penataan tersebut, BKN memulai dengan membangun sistem aplikasi induk kepegawaian yang di sebut Sistem Informasi ASN atau SIAN yang telah dirilis pada Desember 2020 dan melakukan berbagai perbaikan proses bisnis. Selain itu sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, maka IKU ini sesuai dikarenakan Kantor Regional memiliki fungsi penyelenggaraan dan pemeliharaan sistem informasi data kepegawaian PNS instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya.

Pada tahun 2023, sistem informasi kepegawaian pengelola ASN dianggap sudah terintegrasi apabila sudah terintegrasi secara dua arah dengan SIASN. Hasil capaian IKU 6 Kanreg III BKN disajikan pada Tabel 3.9 berikut

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Target</b>	N/A	90%	94%	96%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	N/A	78.4%	95%	92%	100%	-
<b>Kinerja</b>	N/A	87.1%	101.6%	95.83%	100%	-

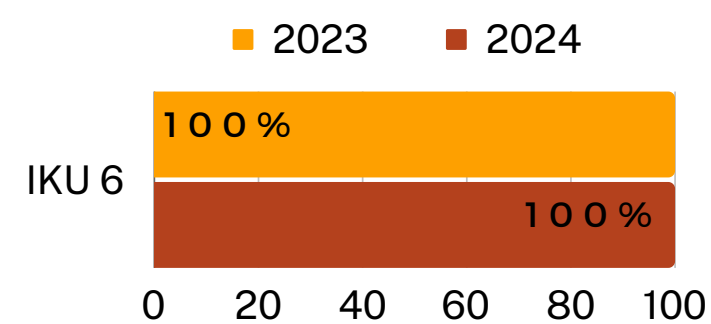
Tabel 3.9 Perbandingan Target, Realisasi, dan Kinerja IKU 6 Tahun 2023

Hingga bulan Desember 2023, seluruh sistem informasi pengelola kepegawaian instansi daerah di wilayah kerja Kanreg III BKN, yaitu terdapat 37 instansi, sudah terintegrasi dengan SIASN. Oleh karena itu, pencapaian pada IKU 6 ini adalah sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2022, terdapat kenaikan baik dari segi realisasi maupun kinerja dengan gap positif sebesar 8% dalam capaian realisasi. Capaian baik ini tentunya tidak dapat dicapai apabila tidak dilakukan upaya percepatan dalam mendorong instansi untuk melakukan integrasi 2 arah dengan SIASN. Beberapa kunci keberhasilan dari pencapaian pada IKU 6 ini adalah sebagai berikut:

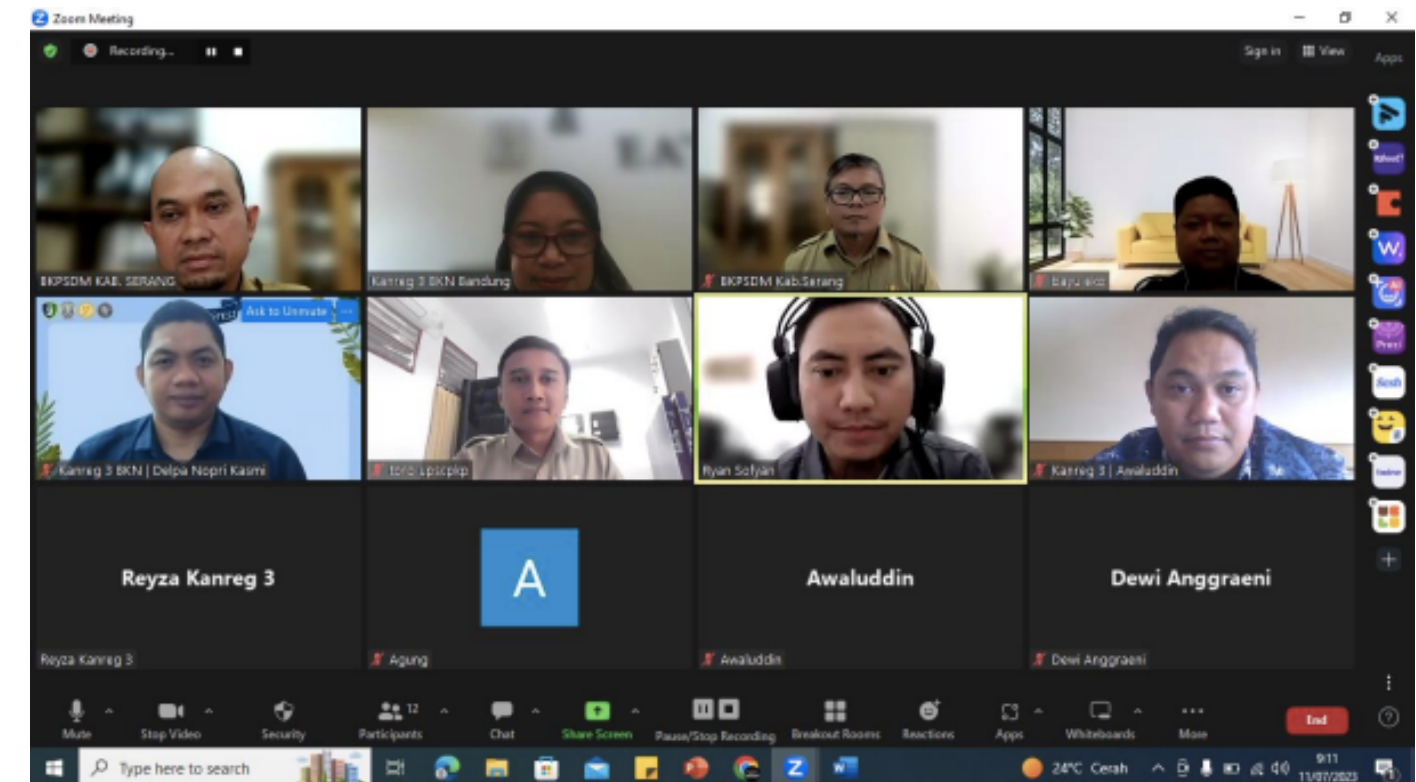
- Koordinasi dan konsultasi ke BKN Pusat (Direktorat PPSIASN, Direktorat PDPIK dan Direktorat INTI) terkait program kerja Bidang INKA Kanreg III BKN serta Pelatihan SIASN dalam rangka percepatan implementasi SIASN.
- Menginventarisir kendala dan melaporkan ke BKN Pusat untuk penyelesaian.
- Mengikuti review integrasi setiap minggu dan mengundang instansi di wilayah kerja untuk memaparkan progress integrasi.
- Menyediakan group WA konsultasi bersama dengan PIC instansi daerah
- Pendampingan langsung ke instansi daerah untuk membantu proses integrasi
- Mengundang instansi daerah untuk pendampingan instansi daerah di Kanreg III BKN

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, yaitu target pada Renstra 2020 - 2024, maka capaian pada tahun 2023 ini sudah memenuhi target yang perlu dicapai pada tahun 2024 nanti yaitu 100% seperti disajikan pada Grafik 3.8 berikut



Grafik 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 6 Tahun 2023 & 2024

Untuk rekomendasi kedepannya, mengingat seluruh instansi dibawah wilayah kerja Kanreg III BKN sudah terintegrasi secara dua arah dengan SIASN, maka selanjutnya perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan kedeputan SINKA BKN terkait dengan indikator yang perlu dicapai pada periode berikutnya dalam hal pengembangan integrasi SIASN-SIMPEG instansi.



Gambar 3.15 Pendampingan Integrasi SIASN dengan Kab. Serang



Gambar 3.16 Pendampingan Integrasi SIASN dengan Kab. Purwakarta



Gambar 3.17 Program PDKT: Stand Layanan Konsultasi Bidang INKA

# IKU 7

Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional III BKN Bandung

Kantor Regional III BKN berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai penyelenggara pelayanan publik, penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju *Good Governance*, salah satunya adalah membangun aplikasi-aplikasi yang digunakan sebagai sarana pendukung untuk memperbaiki proses pelayanan kepegawaian. Aplikasi-aplikasi tersebut dibangun dan dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian ASN melalui digitalisasi dokumen dalam proses pelayanan kepegawaian di Kantor Regional III BKN Bandung agar dapat menghasilkan data dan informasi pegawai ASN yang akurat, selalu up to date, dan komprehensif.

## FORMULA CAPAIAN IKU 7

$$IKU\ 7 = \frac{n}{12} \times 100\%$$

N =  $\sum$  Layanan Manajemen ASN berbasis digital di Kantor Regional III BKN  
 X =  $\sum$  Layanan Manajemen ASN di Kantor Regional III BKN

Pembangunan sistem pelayanan manajemen ASN berbasis digital tersebut dilaksanakan melalui pembuatan aplikasi-aplikasi yang diperlukan sebagai sarana pendukung untuk meningkatkan tingkat efektifitas dan efisiensi dalam pemberian layanan. Aplikasi yang dibangun dalam pelayanan manajemen ASN berbasis digital tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian ASN sehingga proses bisnis yang dilaksanakan dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur kepada *stakeholders* BKN.

Digitalisasi proses pelayanan kepegawaian Kantor Regional III BKN Bandung harus terus berkembang karena hal tersebut merupakan tuntutan di era globalisasi. Upaya ini tentu membutuhkan komitmen tinggi dengan berupaya untuk memberikan fasilitasi bimbingan teknis kepada pegawai sekaligus menyamakan persepsi bahwa pelayanan kepegawaian sudah beralih ke era digital untuk memperingkas dan mempercepat layanan agar mendukung pelayanan prima Kantor Regional III BKN.

# Analisis Capaian IKU 7

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan manajemen ASN di era digital ini, maka dalam indikator ini ditargetkan bahwa seluruh layanan manajemen ASN dapat tergitalisasi secara menyeluruh (*end-to-end*). Pada Tabel 3.10 berikut ini, disajikan data terkait dengan target, realisasi, serta kinerja dalam pencapaian IKU 7.

Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kanreg III BKN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		12	13	13	11	13
<b>Target</b>	N/A	90%	93%	96%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	N/A	90%	95%	100%	91.6%	-
<b>Kinerja</b>	N/A	100%	101.6%	104%	91.6%	-

Tabel 3.10 Perbandingan Target, Realisasi, dan Kinerja IKU 7 Tahun 2023

Awalnya capaian IKU 7 di Kanreg III BKN pada TW 2 tahun 2023 sudah 100%, dimana layanan manajemen ASN sudah terdigitalisasi melalui aplikasi yang dibuat oleh Kanreg III BKN, yaitu Mang Asep dan Mang Lapen, namun sebagai upaya BKN dalam meningkatkan digitalisasi terhadap layanan manajemen ASN, maka dilakukan peralihan agar layanan manajemen ASN dapat diimplementasikan secara digital dan terpusat melalui SIASN. Perubahan terhadap jumlah layanan yang sudah terdigitalisasi di Kanreg III BKN ini didasarkan oleh hasil penyamaan persepsi terkait perhitungan capaian target IKU 7 untuk BKN pusat dan kantor regional. Berdasarkan penyamaan persepsi tersebut, diketahui bahwa layanan manajemen ASN dianggap sudah terdigitalisasi apabila dalam keseluruhan prosesnya sudah digital atau dapat dikatakan tidak ada satupun tahapan dalam layanan yang masih menggunakan sistem konvensional/masih menggunakan berkas fisik.

Berdasarkan Nota Dinas Nomor 036/B-MP.03.01/ND/D/2023 dari Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian,

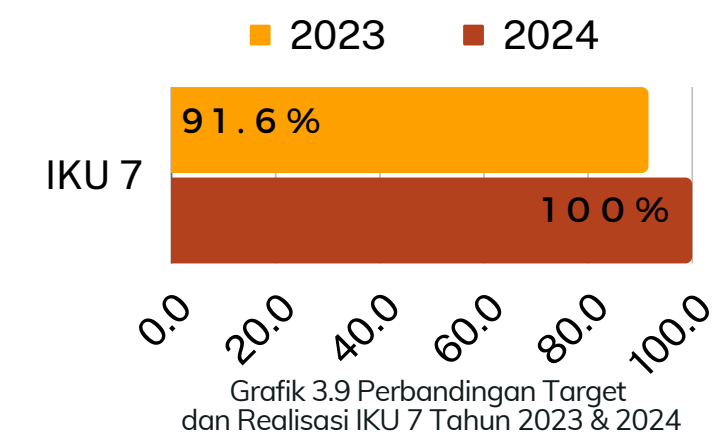
jumlah layanan manajemen ASN yang menjadi kewenangan kanreg adalah sebanyak 12 layanan sedangkan saat ini pencapaian layanan manajemen ASN yang sudah terdigitalisasi adalah sebanyak 11 layanan. Layanan yang belum terdigitalisasi adalah pengaktifan kembali setelah menjalankan pidana. Sedangkan untuk layanan pengaktifan kembali setelah CLTN sudah dilakukan melalui SIASN. Untuk pembaruan selanjutnya ke SIASN akan melalui peremajaan data riwayat hukuman disiplin. Dalam Tabel 3.11 disajikan data mengenai wewenang terhadap digitalisasi layanan manajemen ASN di Kanreg III BKN disertai dengan realisasinya.

No	Rekomendasi	Digitalisasi	Keterangan
1	Pengadaan CASN	✓	
2	Kenaikan Pangkat IV/b	✓	
3	Pencatuman gelar	✓	
4	Karpeg	✓	
5	Karis/ Karsu	✓	Menggunakan aplikasi MangAsep
6	Pindah Instansi	✓	
7	Penyesuaian Masa Kerja	✓	Dalam tahap <i>pilot project</i> .
8	Mutasi Lain - lain	-	
9	Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda Dudanya	✓	
10	Mutasi Keluarga	✓	
11	CLTN	✓	
12	Pengaktifan Kembali	✓	Pengaktifan kembali dalam konteks pengaktifan CLTN

Tabel 3.11 Daftar Layanan Manajemen ASN yang Terdigitalisasi

Apabila melihat capaian target IKU 7 Tahun 2023, meskipun belum mencapai target yang ditentukan, namun sisa capaian yang belum dicapai sudah dalam proses pengembangan selanjutnya oleh direktorat PPSIASN, yaitu layanan pengaktifan kembali melalui SIASN. Saat ini progressnya sudah dalam pembahasan proses bisnis. Untuk itu, rekomendasi kedepannya Kanreg III BKN akan menjaga konsistensi dalam penggunaan aplikasi layanan manajemen ASN yang telah terdigitalisasi, menginventarisir permasalahan yang dihadapi oleh instansi di wilker Kanreg III BKN agar selanjutnya dapat disampaikan ke PPSI ASN untuk evaluasi dan pengembangan selanjutnya, serta berkoordinasi dengan BKN Pusat untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan pembaruan layanan manajemen ASN pada SIASN.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, yaitu target pada Renstra 2020 - 2024, maka masih terdapat jarak selisih yang perlu dikejar yaitu sebesar 8.4 seperti disajikan pada Grafik 3.9 berikut



Faktor keberhasilan dalam pencapaian IKU 7 ini tidak terlepas dari kegigihan pimpinan serta pegawai untuk beradaptasi dengan perubahan sistem yang ada serta mendukung penuh pengembangan digitalisasi manajemen ASN yang terpusat melalui SIASN. Dengan kondisi komposisi pegawai Kanreg III BKN yang usianya 55% diatas 40 tahun, maka tidak mudah untuk beradaptasi dengan cepat pada peralihan sistem dari konvensional ke semi digital lalu hingga akhirnya kepada sistem yang keseluruhannya digital. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan baik hingga saat ini seluruh pegawai dapat mengaplikasikan sistem digital sesuai yang diharapkan untuk percepatan layanan.

# IKU 8

## Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di Kantor Regional III BKN Bandung

Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN bermakna bahwa kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN perlu diwujudkan oleh Kantor Regional III BKN sebagai salah satu cara mewujudkan manajemen ASN yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN

### FORMULA CAPAIAN IKU 8

$$IKU\ 8 = \frac{n}{X} \times 100\%$$

N = Σ Rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti  
 X = Σ Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kantor Regional III BKN

## Analisis Capaian IKU 8

Sesuai dengan amanat dari Presiden yang tercantum pada Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, bahwa BKN memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengendalikan implementasi NSPK manajemen ASN. Dalam IKU 8 ini menggambarkan tindak lanjut yang dilakukan oleh instansi pemerintah (sampai dengan dikeluarkannya surat keputusan oleh instansi yang bersangkutan) atas hasil pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan NSPK manajemen ASN. Pengawasan dan pengendalian yang dimaksud disini adalah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) manajemen ASN yang dilakukan melalui metode represif. Metode represif merupakan metode pengawasan dan pengendalian yang dilakukan melalui audit manajemen ASN. Audit manajemen ASN adalah seluruh proses kegiatan memeriksa, mengevaluasi, memantau, dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen ASN yang dapat dilakukan secara reguler dan investigasi.

Data hasil capaian IKU 8 dari tahun ke tahun di Kanreg III BKN disajikan melalui Tabel 3.12 berikut ini

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Target</b>	N/A	30%	65%	85%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	N/A	50%	54%	98.9%	100%	-
<b>Kinerja</b>	N/A	120%	83.1%	116%	100%	-

Tabel 3.12 Perbandingan Target, Realisasi, dan Kinerja IKU 8 Tahun 2023

Hasil capaian IKU 8 tahun 2023 adalah 100%, dimana target ini sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Dengan tercapainya target dari IKU ini, maka kinerja yang dihasilkan adalah 100%. Hasil perolehan Kanreg III BKN dalam IKU ini selalu meningkat sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 seperti disajikan pada Grafik 3.13 berikut ini



Tabel 3.13 Perbandingan Target, Realisasi, dan Kinerja IKU 8 Tahun 2023

selama tahun 2023, terdapat sejumlah 48 (empat puluh delapan) surat rekomendasi dari Kanreg III BKN kepada instansi daerah. Keseluruhan rekomendasi tersebut telah ditinlanjuti oleh instansi daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan perhitungan formula capaian IKU 8 yang dijelaskan sebelumnya maka capaian IKU 8 adalah 100%. Berikut ini adalah perhitungan capaian IKU 8.

$$\text{IKU 8} = \frac{48}{48} \times 100\%$$

$$\text{IKU 8} = 100\%$$

Laporan rekomendasi tersebut dapat dilihat melalui tautan berikut: <https://bit.ly/REKOMENDASIKR3TH2023>. Rekomendasi yang paling banyak diberikan adalah berkaitan dengan disiplin.

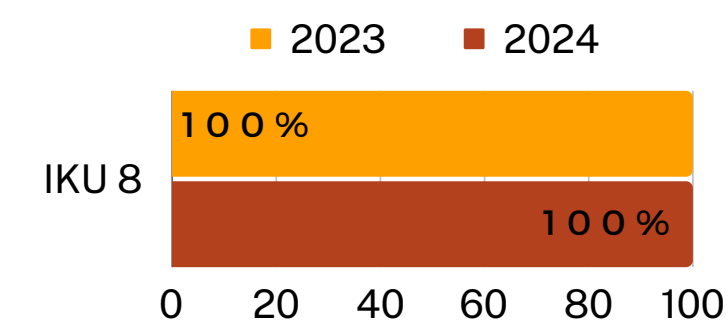
Faktor keberhasilan atas capaian dari IKU 8 ini adalah Kanreg III BKN melalui bidang pengembangan dan supervisi kepegawaian (PDSK) melakukan monitoring secara aktif terhadap rekomendasi yang telah diberikan kepada instansi dan dilakukannya diskusi secara internal terhadap permasalahan kepegawaian. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan konfirmasi kembali khususnya bagi instansi yang belum melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan.

Selain itu, dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terutama dalam periode tahun politik ini, Kanreg III BKN juga melakukan kegiatan sosialisasi aplikasi i'dis untuk daerah dalam rangka menjaga netralitas ASN serta melakukan pembacaan ikrar netralitas dalam beberapa acara yang melibatkan instansi daerah seperti pada acara rapat evaluasi seleksi CASN tahun 2023 di Tasikmalaya pada 6 - 8 Desember 2023 dan di Serang pada 18 - 20 Desember 2023.



Gambar 3. 19 Diskusi Internal Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah IKU 8 yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 100%, maka capaian tahun ini sudah mencapai target yang diharapkan. Maka untuk kedepannya perlu untuk dipertahankan agar tidak terjadi penurunan. Data tersebut disajikan melalui grafik 3.10 berikut ini



Grafik 3.10 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1 Tahun 2022 & 2024

Secara umum kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU 8 ini adalah beberapa instansi kurang responsif dalam menindaklanjuti rekomendasi ataupun permasalahan kepegawaian. Oleh karena itu, untuk menjaga perolehan yang sudah dicapai saat ini, maka kedepannya akan terus dilakukan monitoring dan follow up tindaklanjut kepada instansi yang belum menindaklanjuti rekomendasi ataupun permasalahan kepegawaian.



Gambar 3. 18 Sosialisasi Aplikasi ildis untuk Daerah

# Learning and Growth Perspective

Perspektif *Learning And Growth* merupakan salah satu perspektif yang bersifat intangible, namun merupakan perspektif mendasar yang dapat mendukung ketiga perspektif lainnya. Dengan kata lain, pengetahuan, kemampuan serta keahlian yang dimiliki oleh karyawan dalam sebuah Instansi merupakan aset yang tidak dapat dinilai dengan hanya dengan nominal, namun sangat berperan penting dalam menghasilkan sebuah output dan outcome yang diharapkan oleh suatu instansi dalam mencapai visinya.



*Learning and Growth Perspective* merefleksikan kapabilitas instansi dalam mengembangkan 3 jenis sumber daya atau capital sebagai berikut:

- a. *Human capital*, yaitu sumber daya manusia.
- b. *Organizational capital*, yaitu sumber daya organisasi.
- c. *Information capital*, yaitu sumber daya informasi.

Dalam perspektif ini instansi dituntut untuk mampu membangun sistem yang memungkinkan adanya pengembangan SDM, sistem organisasi dan sistem informasi sebagai kunci peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Dalam perspektif ini, BKN mencanangkan Sasaran strategis 7 (tujuh) yang ingin dicapai dalam tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel”, adalah Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

# Sasaran Strategis 2 (SS. 2)

## Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel

Terwujudnya manajemen BKN yang efektif, efisien dan akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan manajemen internal Kantor Regional III BKN diharapkan dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu mendukung tugas dan fungsi Kantor Regional III BKN

### IKU 9

Indeks Profesionalitas ASN BKN Kanreg III BKN Bandung

### IKU 10

Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang tertetandar di Kantor Regional III BKN Bandung

### IKU 11

Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Regional III BKN Bandung



### IKU 12

Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di Kantor Regional III BKN Bandung

### IKU 13

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional III BKN Bandung

### IKU 14

Persentase Tindak lanjut Temuan Hasil Audit Pemeriksaan BPK/ Inspektorat di Kantor Regional III BKN Bandung

# IKU 9

Indeks Profesionalitas ASN BKN Kanreg III BKN Bandung

Menurut UU No 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

## FORMULA CAPAIAN IKU 9

$$IKU\ 9 = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP1 + IP2 + IP3 + IP4$$

$$IP1 = W1j \times R1j$$

$$IP2 = W2k \times R2k$$

$$IP3 = W3i \times R3i$$

$$IP4 = W4m \times R4m$$

IP = Indeks Profesionalisme  
 IP<sub>i</sub> = Indeks Profesionalisme ke-i  
 IP1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi  
 IP2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi  
 IP3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja  
 IP4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin  
 IP1 = W1j \* R1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j \* Rating Jawaban Kualifikasi ke-j  
 IP2 = W2k \* R2k = Bobot Indikator Kualifikasi ke-k \* Rating Jawaban Kualifikasi ke-k  
 IP3 = W3i \* R3i = Bobot Indikator Kualifikasi ke-i \* Rating Jawaban Kualifikasi ke-i  
 IP4 = W4m \* R4m = Bobot Indikator Kualifikasi ke-m \* Rating Jawaban Kualifikasi ke-m

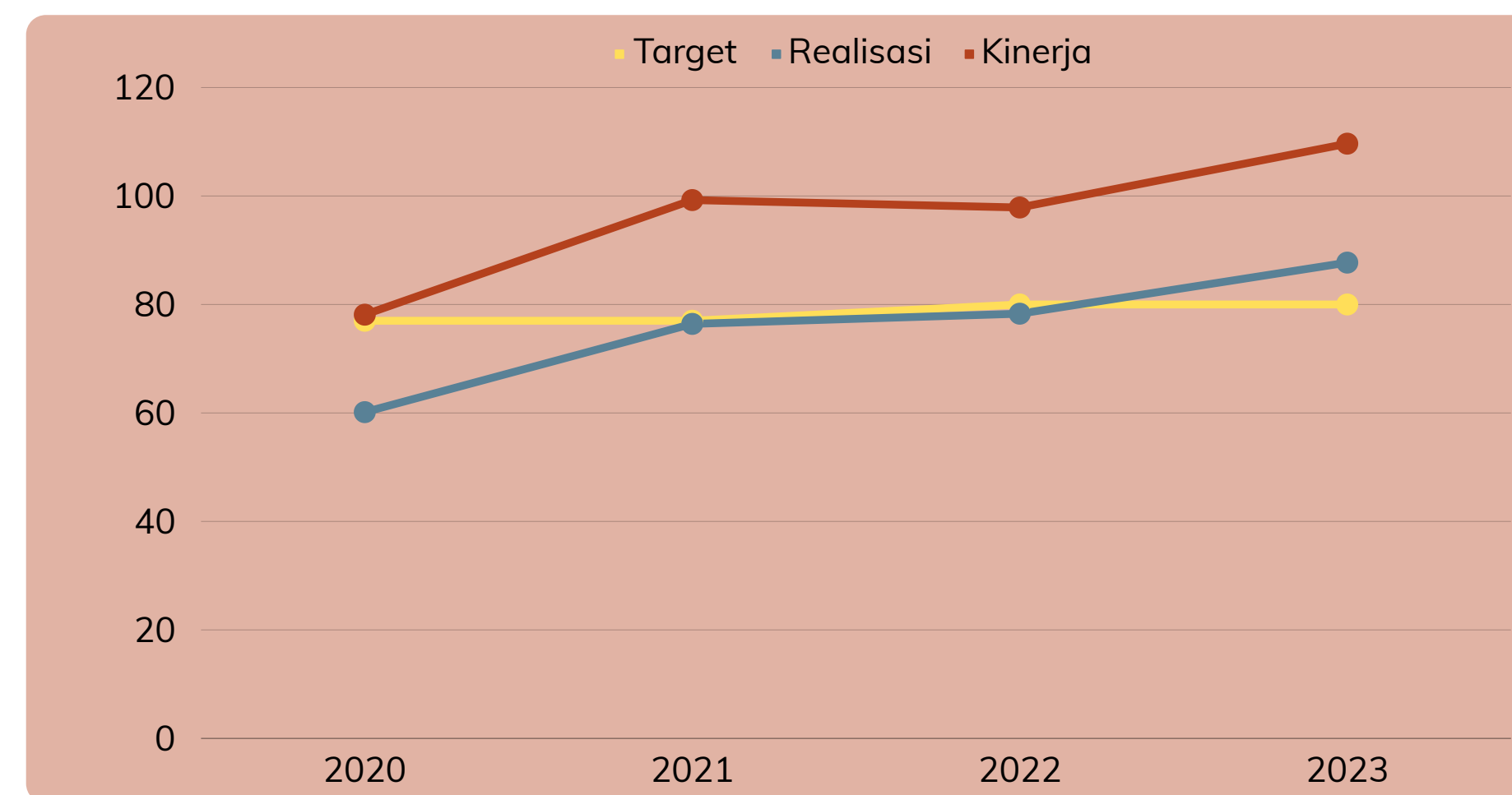
## Analisis Capaian IKU 9

Berdasarkan hasil perolehan kinerja Kanreg III BKN untuk pemenuhan IKU 9, maka didapati data sebagai berikut:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Target</b>	N/A	77	77	80	80	80
<b>Realisasi</b>	N/A	60.15	76.42	78.30	87.72	-
<b>Kinerja</b>	N/A	78.12%	99.25%	97.88%	109.65%	-

Tabel 3.14 Perbandingan Target, Realisasi, dan Kinerja IKU 9 Tahun 2023

Secara umum, realisasi serta kinerja dalam pemenuhan IKU 9 ini meningkat dari tahun ke tahun. Artinya, tingkat profesionalitas ASN di Kanreg III BKN semakin membaik dari waktu ke waktu. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2024, maka capaian saat ini sudah melampaui target sehingga harus dipertahankan serta ditingkatkan kembali. Visualisasi peningkatan capaian IKU 9 disajikan melalui bagan berikut:



Tabel 3.15 Perbandingan Target, Realisasi, dan Kinerja IKU 9 Tahun 2023



Nilai capaian IPASN yang diraih oleh Kanreg III BKN berdasarkan Surat dari Biro Sumber Daya Manusia BKN Nomor 330/B-KP .05.02/SD/A.II/2023 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023 Atas Dasar Penilaian Tahun 2022 adalah 87,72 (kategori tinggi) dengan rincian nilai per dimensi sebagai berikut:

Kualifikasi (bobot 25%)	Kompetensi (bobot 40%)	Kinerja (bobot 30%)	Disiplin (bobot 5%)	Keterangan
10,96	25,12	27,55	4,67	LHE IPASN 2022 atas dasar penilaian tahun 2021
20,47	37,17	25,10	4,98	LHE IPASN 2023 atas dasar penilaian tahun 2022

Tabel 3.16 Perbandingan Target, Realisasi, dan Kinerja IKU 9 Tahun 2023

Secara umum, nilai IPASN Kanreg III BKN mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian terhadap peraturan terbaru terkait dengan IPASN dimana dimensi kualifikasi pengukurannya berdasarkan kualifikasi pendidikan pegawai yang disesuaikan dengan jabatannya. Sedangkan nilai kompetensi dapat meningkat dengan adanya program pemenuhan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran (JP) per tahun bagi setiap pegawai. Untuk mengakomodir pegawai dalam memenuhi kewajiban mendapatkan 20 JP tersebut, Kanreg III BKN Bandung mengadakan kegiatan Rabu di Kampus Pengembangan Kompetensi (Rakabangtes) dan mendorong pegawai menggunakan aplikasi coaching, mentoring, dan belajar mandiri (CMB).

Rakabangtes merupakan kegiatan seminar atau *knowledge sharing* terutama terkait bidang kepegawaian dengan mengundang pegawai Kanreg III BKN ataupun pihak eksternal sebagai peserta. Kemudian peserta yang telah mengikuti acara rakabangtes akan diberikan sertifikat. Program rakabangtes ini bertujuan untuk mengakomodir pegawai Kanreg III BKN dan instansi daerah dalam meningkatkan nilai IPASN dengan biaya yang minim. Beberapa kegiatan rakabangtes yang diadakan untuk

pegawai Kanreg III BKN mengangkat tema sebagai berikut:

1. Sosialisasi PERMENPAN RB Nomor 1 Tahun 2023 (24 Januari 2023)
2. Coaching, Mentoring Dan Belajar Mandiri (CMB) (10 Mei 2023)
3. Focus Group Discussion Permasalahan Kepegawaian (7 Juni 2023)
4. Sharing Ilmu Kepegawaian (21 Juni 2023)
5. Sosialisasi Whistle Blowing System (WBS) (12 Juli 2023)
6. Sosialisasi Tata Cara Pengusulan Pencantuman Gelar Akademik (16 Agustus 2023)

Faktor keberhasilan lainnya yaitu selain mendorong pegawai untuk mengikuti seminar, rakabangtes, dan juga CMB, Kanreg III BKN melalui subbag kepegawaian terus memotivasi pegawai untuk mengikuti pendidikan formal yang dilakukan secara lisan serta seluruh pejabat struktural tiada henti mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja.



Gambar 3.19 Kegiatan RAKABANGTESI: Sosialisasi Coaching, Mentoring, dan Belajar Mandiri (CMB)



Gambar 3. 20 Kegiatan RAKABANGTESI: Sharing Ilmu Kepegawaian

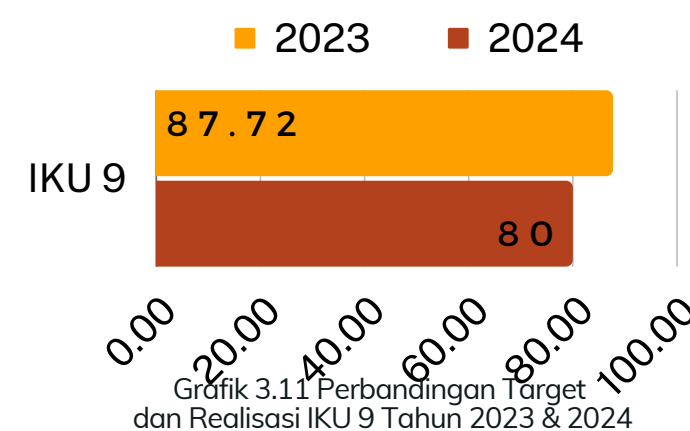


Gambar 3. 21 Kegiatan RAKABANGTESI: Sosialisasi Whistle Blowing System (WBS)

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah dalam meningkatkan dimensi kompetensi, khususnya dalam memfasilitasi pegawai untuk mengikuti diklat teknis dan struktural, hanya menyesuaikan dengan pengusulan dari biro SDM sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan pemenuhan minimal 20 JP bagi setiap pegawai pertahunnya. Untuk itu, rekomendasi yang dapat dilaksanakan selanjutnya adalah terus melaksanakan kegiatan rakabangtesI dan mendorong pegawai untuk memenuhi kewajiban persyaratan mendapatkan 20 JP pertahun.

Jika dilihat dari sisi gap nilai yang dicapai oleh Kanreg III BKN dibandingkan dengan nilai maksimal yang dapat diperoleh di masing-masing dimensi, maka pada dimensi kinerja masih terdapat gap yang cukup tinggi dibanding dimensi yang lain. Faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain dikarenakan perhitungan terhadap dimensi kinerja berdasarkan dengan perhitungan nilai pada SKP. Nilai pada SKP dengan predikat "baik" mempunyai bobot penilaian 25, sedangkan nilai tertinggi yaitu predikat "sangat baik" memiliki bobot penilaian 30. Berdasarkan penilaian terhadap SKP pegawai, didapatkan data penilaian periode 2022 sebanyak 99% mendapatkan predikat "baik", sedangkan 1% pegawai mendapatkan predikat "sangat baik"

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah IKU 9 yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 80, maka capaian tahun ini sudah melampaui target dengan positif gap sebesar 7.72.. Maka untuk kedepannya perlu untuk dipertahankan agar tidak terjadi penurunan dan mengevaluasi kekurangan yang ada agar nilainya dapat meningkat kembali. Data tersebut disajikan melalui grafik 3.11 berikut ini



Grafik 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 9 Tahun 2023 & 2024

# IKU 10 *Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional III BKN Bandung*

Kebijakan Pemerintah tahun 2003 tentang implementasi *e-government* menekankan untuk memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah, yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengolahan data dan pengelolaan informasi sehingga mampu memberikan **elayanan publik yang lebih baik, transparan dan akuntabel.**

Dalam rangka menuju digitalisasi manajemen ASN, demi tercapainya pelayanan kepegawaian yang prima, maka penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi di Kantor Regional III BKN menjadi suatu keniscayaan bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

Dalam hal lingkup pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang dimaksud yaitu Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Regional III BKN. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Regional III BKN, perlu dilakukan perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis Komputer.

## FORMULA CAPAIAN IKU 10

$$Realisasi = (a1/b1 + a2/b2 + a3/b3 + \dots + a23/b23) / 23 \times 100\%$$

a = Sistem informasi yang dimanfaatkan Kantor Regional III BKN

b = Responden Sistem Informasi

n = Σ Jumlah sistem informasi yang telah dimanfaatkan Kantor Regional III BKN.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menekankan kepada instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan SPBE sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu diperlukan tata Kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional guna meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan SPBE yang terpadu diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Birokrasi yang berkinerja tinggi dengan karakteristik integratif, dinamis, transparan dan inovatif. Sehingga dapat mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Kantor Regional BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan. Untuk itu, pada indikator ini diukur mengenai sejauh mana pemanfaatan sistem informasi di Kanreg III BKN.

## Analisis Capaian IKU 10

Berdasarkan hasil capaian IKU 10 seperti pada Tabel 3.17 diketahui bahwa terdapat penurunan pada capaian realisasi maupun kinerja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, hampir seluruh aplikasi terstandar telah digunakan, adapun penurunan capaian disebabkan karena beberapa responden pada survey ini merupakan pegawai yang baru masuk sehingga belum sempat mendapatkan sosialisasi terkait beberapa aplikasi terstandar.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Target</b>	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	N/A	100%	100%	100%	94.63%	-
<b>Kinerja</b>	N/A	100%	100%	100%	94.63%	-

Tabel 3.17 Perbandingan Target, Realisasi, dan Kinerja IKU 10 Tahun 2023

Dalam melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara tersebut, Kantor Regional III BKN telah memanfaatkan sistem informasi yang terstandar dan sistem informasi yang dibangun oleh Kantor Regional III BKN guna mendukung pelayanan kepegawaian lainnya di Kantor Regional III BKN. Seluruh sistem informasi tersebut bersifat online sehingga dapat dimanfaatkan kapanpun dan dimanapun. Adapun sistem informasi yang dimanfaatkan tersebut ialah sebagai berikut :

- 1.SAKTI merupakan Sistem Informasi yang dibangun oleh Kementerian Keuangan dan digunakan oleh petugas untuk melakukan pengelolaan anggaran di Kantor Regional III BKN.
- 2.SMART merupakan Sistem Informasi yang dibangun oleh Kementerian Keuangan dan digunakan oleh petugas untuk melakukan monitoring capaian kegiatan dan anggaran di Kantor Regional III BKN.
- 3.E-Monev merupakan Sistem Informasi yang dibangun oleh BAPENAS dan digunakan oleh petugas untuk melakukan monitoring capaian kegiatan dan anggaran di Kantor Regional III BKN.
- 4.KRISNA merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh BKN dan digunakan oleh petugas untuk melakukan pengisian Rencana Kertas Kerja atau Perunjuk Operasional Kerja (POK).
- 5.OM SPAN merupakan Sistem Informasi yang dibangun oleh Kementerian Keuangan dan digunakan oleh petugas untuk melakukan tugas perbendaharaan.
- 6.SPEKTRA merupakan Sistem Informasi yang dibangun oleh Kementerian Keuangan dan digunakan oleh petugas untuk melakukan monitoring pengelolaan anggaran di Kantor Regional III BKN.
- 7.E-Travel merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh BKN dan digunakan oleh petugas untuk mengelola administrasi perjalanan dinas.
- 8.SIKAP merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh BKN dan digunakan oleh petugas untuk melakukan upload data kehadiran pegawai sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja pegawai Kantor Regional III BKN.
- 9.EDMS merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh BKN dan digunakan oleh petugas untuk melakukan upload pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Kantor Regional III BKN.

10. Location Based Presence (LBP) merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh BKN dan digunakan oleh pegawai untuk melakukan absensi harian di Kantor Regional III BKN.
11. Presensi merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh BKN dan digunakan oleh pegawai untuk melihat rekapitulasi kehadiran, mengajukan izin dan cuti di Kantor Regional III BKN.
12. Kinerja BKN merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh BKN dan digunakan oleh pegawai untuk mengelola pelaporan kinerja individu di Kantor Regional III BKN.
13. E-DUPAK merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh BKN dan digunakan oleh Pejabat Analis Kepegawaian untuk mengajukan PAK serta digunakan oleh Tim Penilai PAK Analis
14. Kepegawaian untuk melakukan Penilaian Angka Kredit.
15. Simpeg BKN merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh BKN dan digunakan oleh pegawai untuk mengakses arsip kepegawaian di BKN Pusat.
16. Teken Dijital merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh BKN dan digunakan oleh pegawai untuk melakukan penandatanganan digital pada dokumen.
17. email BKN merupakan email yang dimiliki oleh pegawai BKN untuk mengelola pesan kepegawaian elektronik.
18. Loker BKN merupakan media penyimpanan yang dimiliki oleh pegawai BKN untuk mengelola file dokumen digital kepegawaian.
19. SRIKANDI merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh ANRI dan digunakan oleh pegawai untuk mengelola surat masuk dan surat keluar di Kantor Regional III BKN.
20. Mang Udin Sistem informasi yang dibangun oleh Kantor Regional III BKN dan digunakan oleh petugas untuk membuat laporan pelaksanaan CAT di Kantor Regional III BKN.
21. SIRAVI merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh Kantor Regional III BKN dan digunakan oleh pegawai untuk mengisi kehadiran pada kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kantor Regional III BKN.
22. SIWAREGTILU merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh Kantor Regional III BKN dan digunakan oleh pegawai untuk mengakses arsip kepegawaian di Kantor Regional III BKN dan digunakan oleh petugas untuk mengelola administrasi Kenaikan Gaji Berkala (KGB).
23. SIMAIL merupakan Sistem informasi yang dibangun oleh Kantor Regional III BKN dan digunakan oleh petugas untuk menerima surat masuk dari instansi di Wilayah kerja Kantor Regional III BKN.

Berdasarkan hasil perhitungan survey pemanfaatan sistem informasi yang dilakukan melalui <https://forms.gle/JKCGajeB2JVTjD188>. Setelah dilakukan analisis data, nilai diperoleh dari jumlah jawaban “Ya” lalu dibagi jumlah responden dari setiap pertanyaan. Lalu hasil pembagian dari setiap pertanyaan tersebut dijumlahkan Kembali dan dibagi jumlah pertanyaan dan dikalikan 100%. Adapun rekapitulasi survey pemanfaatan sistem informasi dari setiap pertanyaan ialah sebagai berikut :

No	Pertanyaan	Jawaban “Ya”	Jawaban “Tidak”	Jumlah Responden	%
1	Jika anda petugas pengelola keuangan, apakah anda telah memanfaatkan aplikasi SAKTI dalam melakukan pengelolaan anggaran ?	3	0	3	100%
2	Jika anda petugas pengelola keuangan, apakah anda telah memanfaatkan aplikasi SMART dalam melakukan monitoring capaian kegiatan dan anggaran ?	3	0	3	100%
3	Jika anda petugas pengelola keuangan, apakah anda telah memanfaatkan aplikasi E-Monev dalam melakukan monitoring capaian kegiatan dan anggaran ?	3	0	3	100%
4	Jika anda petugas pengelola keuangan, apakah anda telah memanfaatkan aplikasi KRISNA dalam melakukan pengisian Rencana Kertas Kerja atau POK (Perunjuk Operasional Kerja) ?	3	0	3	100%
5	Jika anda petugas pengelola keuangan, apakah anda telah memanfaatkan aplikasi Om Span dalam melakukan tugas perbendaharaan ?	3	0	3	100%
6	Jika anda petugas pengelola keuangan, apakah anda telah memanfaatkan aplikasi SPEKTRA dalam melakukan monitoring pengelolaan anggaran ?	3	0	3	100%
7	Jika anda petugas pengelola keuangan, apakah anda telah memanfaatkan aplikasi E-Travel dalam mengelola administrasi perjalanan dinas ?	4	0	4	100%

8	Jika anda petugas kehadiran, apakah anda telah memanfaatkan aplikasi SIKAP untuk mengupload data kehadiran pegawai ?	1	0	1	100%
9	Jika anda petugas pengelola keuangan, apakah anda telah memanfaatkan aplikasi EDMS untuk mengupload pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ?	2	0	2	100%
10	Apakah anda telah memanfaatkan aplikasi LOCATION BASED PRESENCE (LBP) dalam melakukan absensi harian?	50	0	50	100%
11	Apakah anda telah memanfaatkan aplikasi Presensi dalam mengelola administrasi kehadiran seperti pengajuan izin?	44	0	44	100%
12	Apakah anda telah memanfaatkan aplikasi Presensi dalam mengelola administrasi kehadiran seperti pengajuan cuti?	47	0	47	100%
13	Apakah anda telah memanfaatkan aplikasi Kinerja BKN dalam pengelolaan kinerja individu?	50	0	50	100%
14	Jika anda Pejabat Analis Kepegawaian, apakah anda telah memanfaatkan aplikasi E-Dupak dalam pengajuan DUPAK Analis Kepegawaian?	22	0	22	100%
15	Jika anda Tim Penilai DUPAK Analis Kepegawaian, apakah anda telah memanfaatkan aplikasi E-Dupak dalam melakukan penilaian DUPAK Analis Kepegawaian?	5	0	5	100%
16	Apakah anda telah memanfaatkan aplikasi Simpeg BKN dalam mengakses arsip kepegawaian di BKN Pusat?	31	21	52	59.62%
17	Apakah anda telah memanfaatkan aplikasi CMB dalam mengajukan Coaching di Kantor Regional III BKN ?	27	0	27	100%
18	Apakah anda telah memanfaatkan aplikasi CMB dalam mengajukan Mentoring di Kantor Regional III BKN ?	21	0	21	100%

19	Apakah anda telah memanfaatkan aplikasi CMB dalam mengajukan Belajar Mandiri ?	16	0	16	100%
20	Jika anda Pejabat Struktural, apakah anda telah memanfaatkan aplikasi Teken Dijital dalam melakukan penandatanganan dokumen digital ?	8	0	8	100%
21	Apakah anda telah memanfaatkan email BKN dalam melakukan pengelolaan pesan kepegawaian elektronik ?	32	20	52	61.54%
22	Apakah anda telah memanfaatkan loker BKN dalam melakukan pengelolaan file dokumen digital kepegawaian ?	30	22	52	57.69%
23	Apakah anda telah memanfaatkan aplikasi SRIKANDI dalam menerima surat masuk ?	34	0	34	100%
24	Apakah anda telah memanfaatkan aplikasi SRIKANDI dalam membuat surat dinas/nota dinas/undangan internal/undangan eksternal/Surat Pengantar ?	28	0	28	100%
25	Jika anda petugas Mang Udin, Apakah anda telah memanfaatkan aplikasi Mang Udin dalam membuat laporan pelaksanaan CAT di Kanreg III BKN ?	10	0	10	100%
26	Apakah anda telah memanfaatkan aplikasi SIRAVI dalam mengisi kehadiran pada kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kanreg III BKN ?	26	0	26	100%
27	Apakah anda telah memanfaatkan aplikasi SIWAREGTILU dalam mengakses arsip kepegawaian di Kantor Regional III BKN ?	34	18	52	65.38%
28	Jika anda petugas KGB, apakah anda telah memanfaatkan aplikasi SIWAREGTILU dalam mengelola administrasi kenaikan gaji berkala (KGB)?	4	0	4	100%
29	Jika anda petugas SIMAIL di PPT, Apakah anda telah memanfaatkan aplikasi SIMAIL dalam menerima surat masuk dari instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN ?	2	0	2	100%

Tabel 3.18 Rekapitulasi survey pemanfaatan sistem informasi

Persentase hasil survey dari setiap pertanyaan tersebut selanjutnya dijumlahkan dan dibagi 29 (jumlah pertanyaan) untuk diperoleh nilai rata-ratanya. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$IKU = ((25 \times 100) + (1 \times 59,62) + (1 \times 61,54) + (1 \times 57,69) + (1 \times 65,38)/29) \times 100\%$$

$$IKU = (2744,23/29) \times 100\%$$

$$IKU = (94,63) \times 100\%$$

$$IKU = 94,63 \%$$

Aplikasi yang digunakan	Persentase
SAKTI	94,63 %
SMART	
E-Monev	
KRISNA	
OM SPAN	
SPEKTRA	
E-TRAVEL	
SIKAP	
EDMS	
Location Based Presence (LBP)	
Presensi	
Kinerja BKN	
E-DUPAK	
Simpeg BKN	
CMB	
Teken Dijital	
Email BKN	
Loker BKN	
SRIKANDI	
Mang Udin	
SIRAVI	
SIWAREGTILU	
SIMAIL	

Tabel 3.19 Perentase Sistem Aplikasi Terstandar Kanreg III BKN

Berdasarkan hasil perolehan survey, hampir seluruh sistem informasi yang terstandar di Kantor Regional III BKN telah dimanfaatkan oleh responden. Adapun responden yang tidak menjawab beberapa pertanyaan dikarenakan responden tersebut bukan pengguna dari aplikasi dimaksud. Namun terdapat 4 sistem informasi yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh responden dikarenakan terdapat kendala dalam menggunakan sistem informasi tersebut dan juga dikarenakan memang belum pernah menggunakannya sama sekali. Berikut rincian keterangan/kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan sistem informasi tersebut :

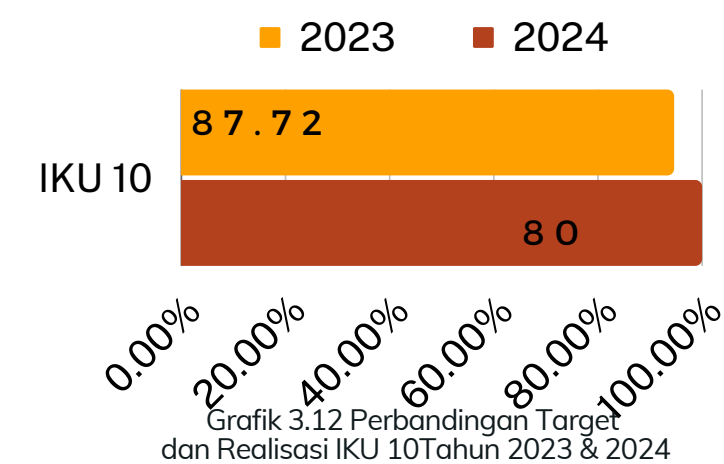
No	Aplikasi	Keterangan/Kendala
1	Simpeg BKN	Responden belum pernah memanfaatkan dalam mengakses arsip kepegawaian di BKN Pusat
2	Email BKN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responden belum mengetahui user dan passwordnya</li> <li>• Responden terkendala saat lupa password</li> <li>• Responden belum pernah memanfaatkan email BKN</li> <li>• Dalam melakukan pengelolaan pesan kepegawaian elektronik</li> </ul>
3	Loker BKN	Responden belum mengetahui user dan passwordnya
4	SIWAREGTILU	Responden belum pernah memanfaatkan dalam mengakses arsip kepegawaian di Kantor Regional III BKN

Tabel 3.20 Kendala dalam pemanfaatan sistem informasi terstandar

Berdasarkan kendala yang dihadapi oleh responden, bidang terkait sebaiknya memberikan sosialisasi kembali terkait sistem informasi tersebut, sehingga responden dapat lebih memahami cara penggunaan dan manfaat dari sistem informasi tersebut. Dengan memanfaatkan sistem informasi, tentu akan membantu tercapainya kinerja pegawai dengan lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan kinerja Kantor Regional III BKN. Kantor Regional III BKN pun akan terus berinovasi untuk mengembangkan sistem informasi yang sudah dibangun agar dapat terus memberikan pelayanan kepegawaian internal yang lebih baik lagi.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah IKU 10 yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 100, maka capaian tahun ini belum mencapai target yang diharapkan. Maka kedepannya

diharapkan untuk melaksanakan rekomendasi yang telah disebutkan sebelumnya agar dapat mengejar ketertinggalan capaian. Data tersebut disajikan melalui grafik berikut ini



Reformasi Birokrasi merupakan sebuah amanat yang disampaikan kepada seluruh Kementerian, Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

Sejak tahun 2020, pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki tahap ketiga atau tahap terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Maka untuk melaksanakan tahap ketiga ini, Kementerian PAN dan RB mengeluarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024, Road Map Reformasi Birokrasi inilah yang kemudian menjadi acuan bagi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi pada instansi masing-masing.

### FORMULA CAPAIAN IKU 11

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, capaian didapat dari hasil penilaian indeks RB BKN yang diperoleh dari KemenpanRB. Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya difokuskan pada data yang tertuang dalam dokumen formal semata, tetapi juga berdasarkan sumber lain yang akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Regional III BKN. Adapun penilaian dan penyimpulan penilaian atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Regional III BKN adalah sebagai berikut:

- A. Penilaian harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif Kantor Regional III BKN dalam melaksanakan program reformasi birokrasi sesuai dengan indikator masing-masing komponen yang terdapat dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE)
- B. Langkah-langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
  - 1) Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variabel, yaitu: komponen, sub-komponen, dan indikator
  - 2) Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Sub-komponen
1.	Pengungkit	60%	
	a. Aspek Pemenuhan	20%	a. Manajemen Perubahan (2%); b. Deregulasi Kebijakan (2%); c. Penataan Organisasi (3%); d. Penataan Tatalaksana (2,5%); e. Penataan Manajemen SDM (3%); f. Penguatan Akuntabilitas (2,5%); g. Penguatan Pengawasan (2,5%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%)
	b. Aspek Hasil Antara	10%	a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%); b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%); c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%); d. Kualitas Pengelolaan Aset (1%); e. Merit System (1%); f. ASN Profesional (1%); g. Kualitas Perencanaan (1%); h. Maturitas SPIP (1%); i. Kapabilitas APIP (1%); j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%)
	c. Aspek Reform	30%	a. Manajemen Perubahan (3%); b. Deregulasi Kebijakan (3%); c. Penataan Organisasi (4,5%); d. Penataan Tatalaksana (3,75%); e. Penataan Manajemen SDM (4,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%); g. Penguatan Pengawasan (3,75%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%);
2.	Hasil	40%	
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	a. Opini BPK (3%); b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%);
	b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)
	c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
	d. Kinerja Organisasi	10%	a. Capaian Kinerja (5%); b. Kinerja Lainnya (2%); c. Survei Internal Organisasi (3%)

- 3) Setiap sub-komponen pengungkit pada komponen pengungkit akan dibagi ke dalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan dapat dijawab dengan jawaban “ya/tidak” untuk pertanyaan-pertanyaan yang dapat langsung dijawab “ya” atau “tidak”, atau dengan jawaban pilihan ganda (“a/b/c/d/e” atau numerik) untuk pertanyaan-pertanyaan/pernyataan-pernyataan yang menggunakan skala ordinal/jawaban numerik yang dapat dihitung langsung ketercapaiannya. Khusus untuk jawaban “ya/tidak”, jawaban “ya” akan diberi nilai 1, sedangkan jawaban “tidak” akan diberi nilai 0.
- 4) Pemberian penilaian harus dilakukan dengan menggunakan professional judgement-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memengaruhi terhadap setiap indikator, dengan dukungan kertas kerja penilaian mandiri.



- 5) Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai, maka penyimpulan akan dilakukan dengan cara:
- Dijumlahkan terlebih dahulu nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen untuk menghasilkan suatu angka tertentu. Misalnya, sub-komponen Pengendalian Gratifikasi memiliki alokasi nilai 10% dari 10 (sepuluh) buah pertanyaan, di mana dari 10 pertanyaan tersebut, tiga di antaranya dijawab “ya” sehingga nilai untuk sub-komponen tersebut adalah:  $(3/10) \times 10 = 3$ ;
  - Untuk indikator yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan dikarenakan terdiri dari beberapa sub-indikator, maka penyimpulan tentang indikator dilakukan melalui nilai rata-rata;
  - Kemudian, tahap selanjutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga muncul jumlah nilai tertentu dengan range nilai antara 0 s. d. 100.
  - Selanjutnya, pertanyaan/ pernyataan yang telah dibuat dikategorikan ke dalam dua level, yaitu pertanyaan/ pernyataan untuk level instansi dan level unit kerja.

C. Setelah setiap pertanyaan diberikan penilaian, maka penyimpulan dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen, di mana nilai hasil akhir dari penjumlahan tersebut akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>90 - 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2.	A	>80 - 90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3.	BB	>70 - 80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4.	B	>60 - 70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5.	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6.	C	>30 - 50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7.	D	0 - 30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

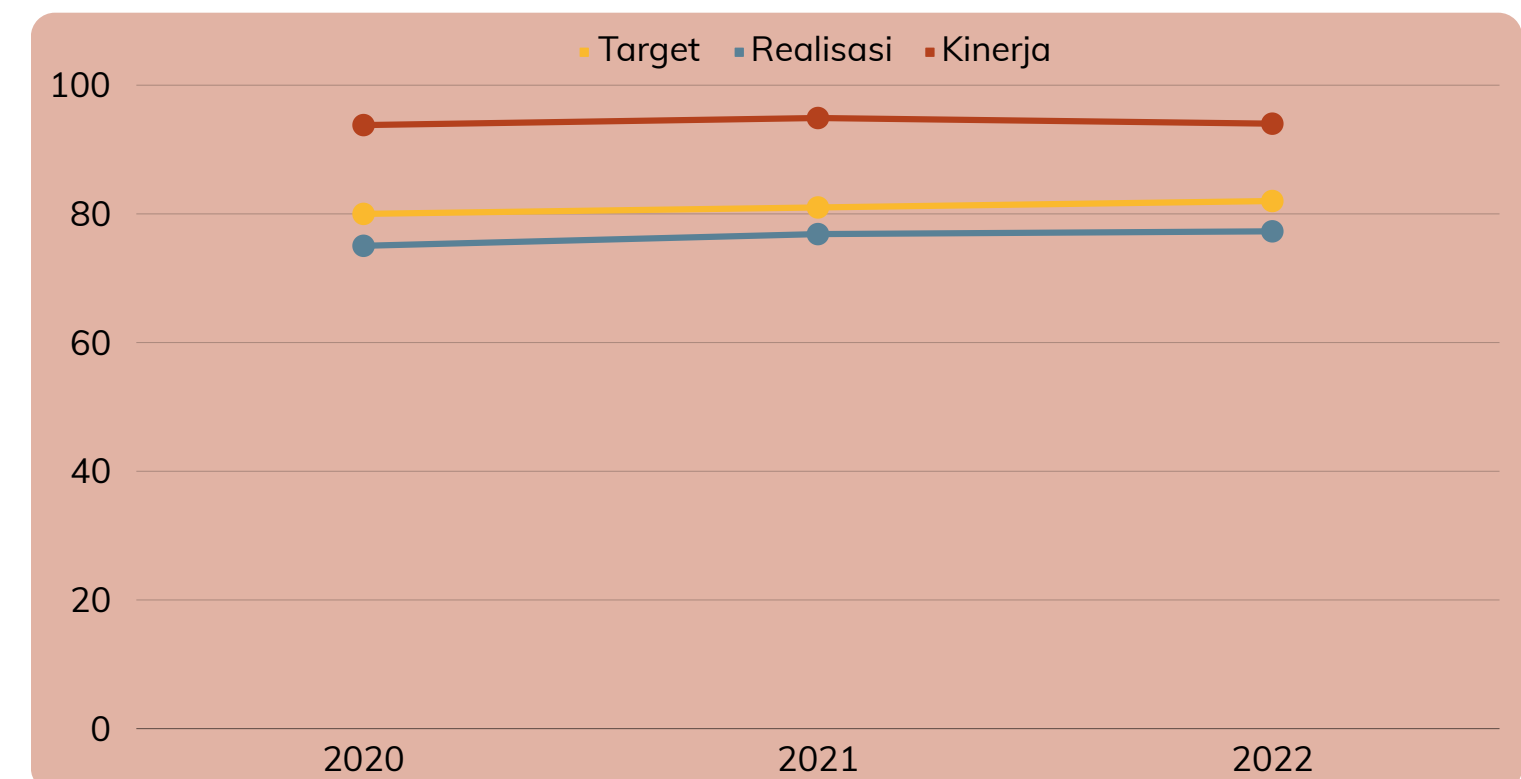
## Analisis Capaian IKU 11

Berdasarkan hasil perolehan kinerja Kanreg III BKN untuk pemenuhan IKU 11, maka didapati data sebagai berikut:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Target</b>	N/A	80	81	82	83	85
<b>Realisasi</b>	N/A	75.04	76.86	77.29	N/A	-
<b>Kinerja</b>	N/A	93.8%	94.9%	94.02%	N/A	-

Tabel 3.21 Perbandingan Target, Realisasi, dan Kinerja IKU 11 Tahun 2023

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kanreg III BKN masih mengacu pada indeks RB BKN Pusat. Indeks RB tahun 2022 adalah 77,29 atau kategori BB. Rincian penilaian dapat di lihat pada Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kemenpan dengan nomor : B/637/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022. Seperti data yang digambarkan pada Grafik 3.13 pada dasarnya nilai RB BKN mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hanya saja capaiannya belum dapat mencapai target yang ditentukan. Terdapat jarak selisih sebesar 4.71 antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan.



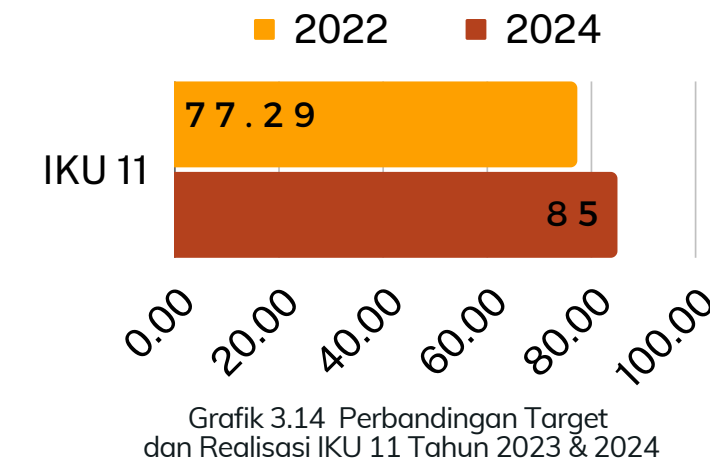
Grafik 3.13 Perbandingan Target, Realisasi, dan Kinerja IKU 11 Tahun 2023

Berdasarkan penilaian RB BKN tahun 2022, nilai terendah adalah unsur evaluasi Internal Kanreg III BKN. Dalam realitanya, dialog kinerja dan evaluasi internal pada masing-masing bidang telah dilaksanakan dalam jangka waktu minimal satu bulan sekali. Hanya saja, kegiatan tersebut belum terdokumentasikan dengan baik, sehingga bukti dukungnya belum dapat dicantumkan.

Adapun penilaian RB untuk tahun 2023 sementara ini belum disampaikan. Sejauh ini, progress yang telah dilakukan oleh Kanreg III BKN dalam pencapaian indeks RB adalah melakukan pelaporan terhadap monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan RB Kanreg III BKN yang disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi BKN. Monev terhadap program RB tematik Kanreg III BKN tahun 2023 juga telah dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. RIUNG (Ruang informasi Umum Kanreg III Bandung), program ini diciptakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Kanreg 3 yang mencakup pembuatan siaran langsung dan tanya jawab, video sosialisasi, dan media informasi publik lainnya mengenai layanan manajemen ASN yang disampaikan melalui platform Instagram dan Youtube. Selain itu, produk media informasi publik tersebut juga ditayangkan ketika pelaksanaan acara Kanreg III BKN. Hingga triwulan 3, program RIUNG sudah berhasil direalisasikan hingga 60 produk media informasi publik (target 40 produk media informasi publik)
2. PDKT (Pembinaan Deket Kanreg 3), program ini dalam rangka meningkatkan pembinaan di wilayah kerja Kanreg 3. Program ini dilakukan dengan membuka booth konsultasi di salah satu daerah di wilayah kerja Kanreg III BKN. Telah dilaksanakan program PDKT dengan memberikan pembinaan dan pelayanan kepegawaian pada acara Rapat Persiapan Seleksi CASN 2023 pada 11 - 13 Oktober 2023 dan Rapat Evaluasi Seleksi CASN 2023 pada 6 - 8 Desember 2023 di Tasikmalaya.
3. Simojang Tilu (Sistem Monitoring Kinerja Kanreg 3 Bandung), yang bertujuan untuk meningkatkan IKM dalam hal kecepatan dan ketepatan pelayanan di Kanreg 3. Program ini dilaksanakan dengan membangun aplikasi yang dapat memonitoring kinerja pegawai Kanreg III. Progress hingga saat ini sudah mencapai tahap soft launching dan pelatihan bagi user. Selain itu, sudah dilakukan implementasi SIMOJANG TILU bagi bidang di Kanreg III BKN Bandung yang dilakukan secara bertahap.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah IKU 11 yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 85, maka masih terdapat jarak selisih sebesar 7.71. Data tersebut disajikan melalui grafik 3.14 berikut ini



Untuk rekomendasi selanjutnya, diperlukan evaluasi rencana aksi agen perubahan, sehingga proyek perubahan yang dibangun benar-benar bermanfaat. Selanjutnya perlu didorong mekanisme pemberian penghargaan bagi agen perubahan yang telah berhasil membangun atau yang telah sesuai dengan target rencana kerjanya. Selain itu, diperlukan juga pendokumentasian proses evaluasi Internal di dalam Kanreg III agar dapat menjadi evidens, dan juga sebagai dasar dalam optimalisasi penilaian IKU 11



Gambar 3.22 Program RB tematik Kanreg III BKN tahun 2023



Gambar 3.23 Bukti Dukung Program PDKT



Gambar 3.5 Dialog Kinerja Bagian Tata Usaha

# IKU 12

Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di Kantor Regional III BKN Bandung

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Lembaga.

Mengacu hal tersebut di atas dan dalam rangka implementasi SAKIP di lingkungan Badan Kepegawaian Negara maka sejak Tahun 2018, Badan Kepegawaian Negara telah menggunakan metode Balanced Score Card (BSC) dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja.

## FORMULA CAPAIAN IKU 12

Penilaian Evaluasi SAKIP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan laporan Kinerja Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tanggal 31 Desember 2021. Tujuan evaluasi ini adalah:

- Memperoleh Informasi tentang Implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode tahun sebelumnya.

Adapun rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	30
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25

Hasil dari penilaian tersebut akan memunculkan kriteria penilaian sebagai berikut:

Kategori dan Range Nilai	Komponen yang Dinilai
AA (>90-100)	Sangat Memuaskan
A (>80-90)	Memuaskan
BB (>70-80)	Sangat Baik
B (>60-70)	Baik
CC (>50-60)	Cukup (Memadai)
C (>30-50)	Kurang
D (0-30)	Sangat Kurang

# Analisis Capaian IKU 12

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Target</b>	N/A	80	81	82	80	85
<b>Realisasi</b>	N/A	70.55	73.95	74.65	70	-
<b>Kinerja</b>	N/A	87.09%	91.29%	91.04%	87.5%	-

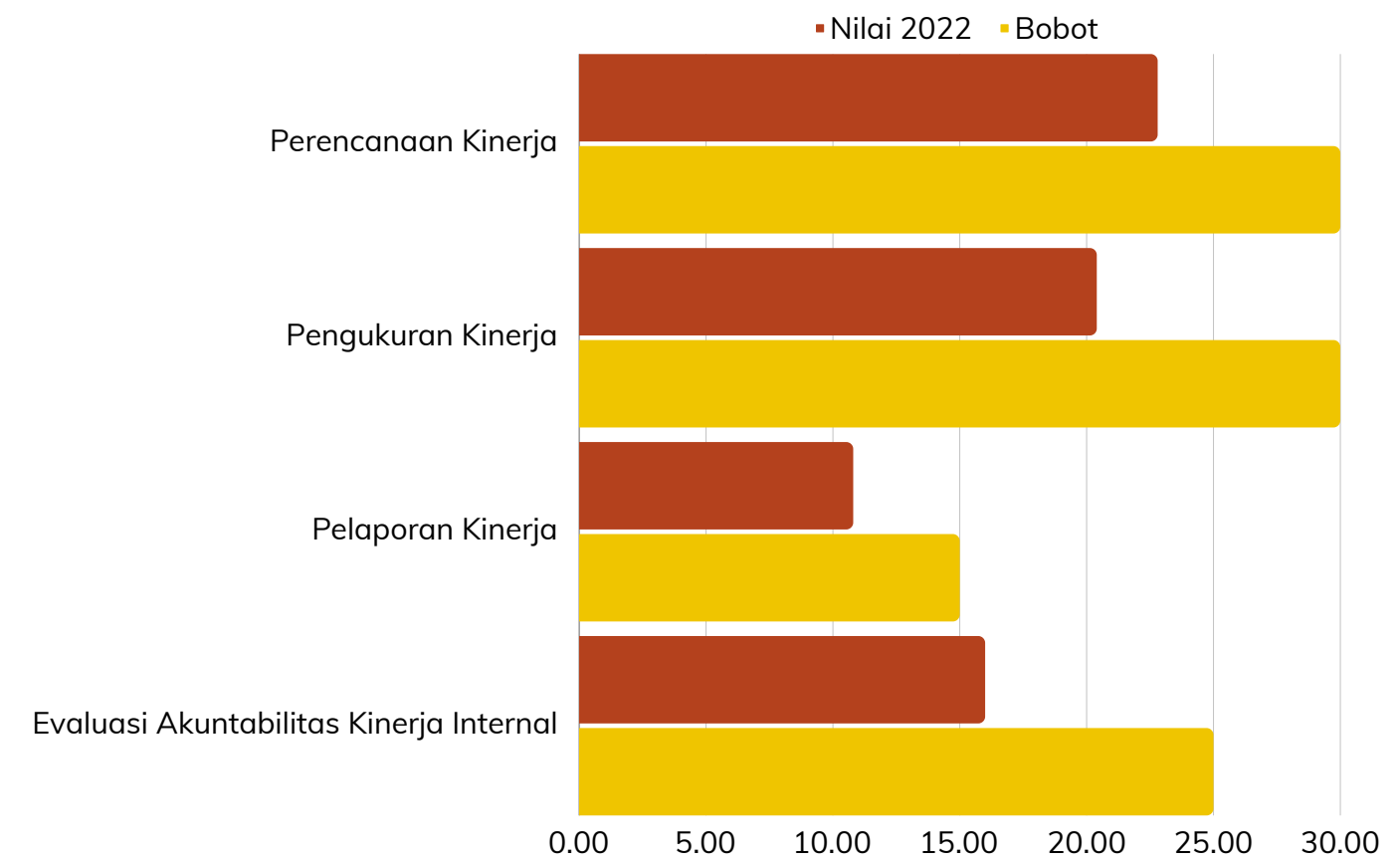
Tabel 3.22 Perbandingan Target, Realisasi, dan Kinerja IKU 12 Tahun 2023

Berdasarkan surat nomor 058/AI.03/LHE/H/2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP), diketahui bahwa perolehan nilai atas implementasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional III BKN Bandung adalah 70. Dengan target yang diberikan sebesar 80, maka kinerja yang dihasilkan adalah sebesar 87.5%. Secara nominal capaian ini terlihat menurun dibandingkan dengan sebelumnya namun berdasarkan surat nomor 058/AI.03/LHE/H/2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, nilai capaian SAKIP BKN tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan penilaian di tahun sebelumnya karena terdapat perubahan tolak ukur penilaian. Adapun jika dibandingkan dengan nilai SAKIP Kantor Regional BKN lainnya, Kanreg III BKN menempati posisi peringkat ke empat.

Pada tahun 2023, Badan Kepegawaian Negara telah mengakomodir untuk pengumpulan hasil perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja organisasi untuk tiap unit kerja dan kantor regional melalui aplikasi Manajemen Kinerja Organisasi (MAKO) yang dapat diakses melalui laman <http://s.id/MAKO-BKN>.

Adapun rincian atas penilaian SAKIP Kanreg III BKN adalah sebagai berikut:

- Perencanaan Kinerja: 22.80
- Pengukuran Kinerja: 20.40
- Pelaporan Kinerja: 10.80
- Evaluasi Akuntabilitas Internal: 16



Tabel 3.23 Perbandingan Nilai SAKIP per Unsur Dibandingkan dengan Bobot Nilai

Berdasarkan surat nomor 058/AI.03/LHE/H/2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diketahui bahwa perolehan nilai atas implementasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional III BKN Bandung adalah 70. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU 12 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja yang disusun belum memenuhi kualitas pelaporan yang baik karena masih terdapat perbedaan formula dan jenis perhitungan data antara manual IKU dengan LKj; perbedaan realisasi antara Laporan Kinerja dengan NPSS; serta perbedaan target kinerja antara tabel ringkasan eksekutif dengan penjelasan pada Bab Akuntabilitas Kinerja
2. Informasi kinerja pada laporan Kinerja belum seluruhnya menginformasikan mengenai kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.

Untuk mengatasi terjadinya kesalahan yang sama dan untuk meningkatkan nilai yang telah dicapai pada tahun 2022, maka dalam surat tersebut diberikan beberapa rekomendasi yang kemudian perlu ditindaklanjuti oleh Kanreg III BKN dalam pembuatan laporan kinerja pada periode 2023 ini, yaitu sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung
1	Menyelaraskan sasaran strategis, target, dan indikator kinerja utama pada dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan jangka pendek	Melakukan pengecekan kembali atas target, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama pada dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek dengan menggunakan daftar ceklis.	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uzvN4_1ZLfkAgR76m8T_GbRx1-AuQR4j8Z8r-mi36sik/edit#gid=17891062">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uzvN4_1ZLfkAgR76m8T_GbRx1-AuQR4j8Z8r-mi36sik/edit#gid=17891062</a>
2	Menetapkan target kinerja dengan mempertimbangkan realisasi capaian kinerja dan target yang ditetapkan pada PK BKN (inline) dan melihat capaian kinerja tahun sebelumnya	Menentukan target tahun 2024 dengan menyesuaikan capaian di tahun 2023 (dilakukan pengecekan kembali terhadap target yang ditentukan dengan mengacu pada target tahun sebelumnya)	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uzvN4_1ZLfkAgR76m8T_GbRx1-AuQR4j8Z8r-mi36sik/edit#gid=17891062">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uzvN4_1ZLfkAgR76m8T_GbRx1-AuQR4j8Z8r-mi36sik/edit#gid=17891062</a>
3	Menjelaskan pada Renja apabila terdapat perubahan target maupun nomenklatur yang tidak sesuai dengan perencanaan awal (Renstra) dan menjelaskan penyebab perubahannya	Sudah dilakukan	<a href="https://drive.google.com/file/d/1N2Q9lyz6xoaakZ_i6lvrQL3aRY3UT_QI9/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1N2Q9lyz6xoaakZ_i6lvrQL3aRY3UT_QI9/view?usp=sharing</a>
4	Agar menyusun rencana aksi yang sesuai dengan: • Jenis Perhitungan Data dan Periode Pelaporan didalam Manual IKU yang sudah diformalkan untuk target kerjanya. • Rekomendasi evaluasi internal tahun sebelumnya dan upaya perbaikan/penyempurnaan yang diuraikan di dalam Laporan Kinerja tahun sebelumnya untuk indikator kegiatan yang direncanakan.	Rekomendasi pada LKJ 2023 menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi 2024	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Bilf29UjvhNOGHpYFZBr7YFJWY44_o5OC/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1Bilf29UjvhNOGHpYFZBr7YFJWY44_o5OC/view?usp=drive_link</a>
5	Menyusun Sistem Operasional Prosedur mekanisme pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian indikator kinerja yang dapat diandalkan	Akan disusun kembali di tahun 2024	-
6	Menelaah ulang target kinerja yang akan dicapai dengan menyesuaikan formula dan jenis perhitungan data antara manual IKU dengan target capaian IKU yang ingin dicapai setiap periodenya	Dilakukan penelaahan dengan menggunakan tabel perbandingan untuk membandingkan jenis perhitungan data antara manual IKU dengan target capaian IKU yang ingin dicapai	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uzvN4_1ZLfkAgR76m8T_GbRx1-AuQR4j8Z8r-mi36sik/edit#gid=17891062">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uzvN4_1ZLfkAgR76m8T_GbRx1-AuQR4j8Z8r-mi36sik/edit#gid=17891062</a>
7	Agar memanfaatkan teknologi informasi di dalam pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Rencananya pada 2024 pengumpulan data kinerja akan memanfaatkan Simojang Tilu	-
8	Agar mengintensifkan dialog kinerja yang melibatkan seluruh pegawai	Akan lebih diintensifkan di 2024	-
9	Agar Laporan Kinerja menginformasikan keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya pada seluruh Indikator Kinerja Utama	Telah diinformasikan mengenai faktor keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya pada setiap IKU pada LKJ 2024	<a href="https://drive.google.com/file/d/1NbN87XO6-meSK72yFGjg8jMw7XSjc4Mx/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1NbN87XO6-meSK72yFGjg8jMw7XSjc4Mx/view?usp=drive_link</a>
10	Agar melakukan penyesuaian perencanaan kinerja dengan memanfaatkan informasi Laporan Kinerja	Menelaah kembali LKJ 2022 dan 2023 untuk menentukan rencana aksi 2024	-
11	Agar melaksanakan pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal serta menyusun laporan evaluasi tersebut sesuai standar dan analisis yang mendalam dengan melibatkan seluruh komponen organisasi dan pegawai di Lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung	-Melaksanakan rapat evaluasi kinerja internal tahun 2023 bersama dengan seluruh pegawai. -Melaksanakan rapat evaluasi kinerja bersama PIC pengukuran data kinerja bidang di Kanreg III BKN bersama dengan Kepala Kanreg III BKN dan Kepala Bidang. -Menyusun daftar kegiatan bidang agar analisis dalam penyusunan laporan kinerja dapat lebih mendalam.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1tgGlbWy6CtFRivVdR4MEqtMtAHUbT31?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1tgGlbWy6CtFRivVdR4MEqtMtAHUbT31?usp=drive_link</a>
12	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Menyusun daftar ceklis terhadap rekomendasi yang pernah diberikan pada pelaporan kinerja pada periode sebelumnya agar mengetahui tindak lanjut yang sudah terlaksana.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1d5vwPxF19H8WIVCBeNwGazv3gBWC9iVE?">https://drive.google.com/drive/folders/1d5vwPxF19H8WIVCBeNwGazv3gBWC9iVE?</a>
13	Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi untuk dilakukan pendampingan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kantor Regional III BKN Bandung	Koordinasi dan asistensi bersama dengan PIC pengukuran data kinerja bidang di Kanreg III BKN serta Biro Perencanaan dan Organisasi dilakukan minimal setiap triwulan (dilakukan secara <i>online</i> maupun <i>offline</i> ).	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1zOT2HvflB6guE5x8HxB-bMklueKkwwW?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1zOT2HvflB6guE5x8HxB-bMklueKkwwW?usp=sharing</a>

Tabel 3.24 Daftar Rekomendasi Berdasarkan LHE SAKIP 2022



Gambar 3.22 Program RB tematik Kanreg III BKN tahun 2023

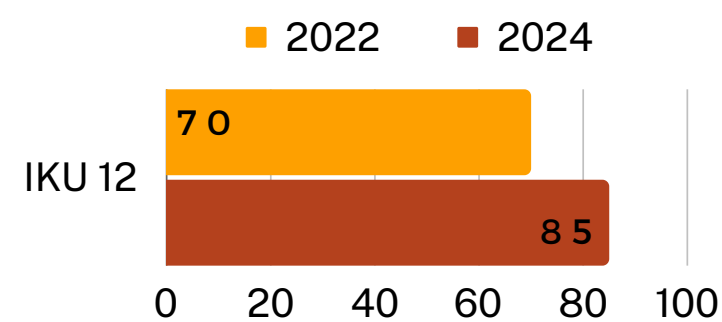


Gambar 3.22 Program RB tematik Kanreg III BKN tahun 2023

Maka untuk perbaikan kedepannya, Kanreg III BKN rencananya akan melakukan hal berikut ini:

1. Mengadakan evaluasi kinerja Kanreg III yang melibatkan seluruh pegawai pada setiap triwulannya.
2. Mengoptimalkan penggunaan “Simojang Tilu” dalam pelaporan kinerja pegawai secara digital.
3. Mendorong pimpinan serta pegawai agar mengintensifkan dialog kinerja yang melibatkan seluruh pegawai serta mendokumentasikannya dengan baik.
4. Menyusun Sistem Operasional Prosedur mekanisme pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian indikator kinerja yang dapat diandalkan

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah IKU 12 yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 85, maka masih terdapat jarak selisih sebesar 15. . Data tersebut disajikan melalui grafik 3.14 berikut ini. Diperlukan upaya yang kuat untuk meningkatkan nilai SAKIP Kanreg III BKN mengingat jarak selisih yang cukup besar.



Grafik 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 12 Tahun 2023 & 2024

Perhitungan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional III BKN Bandung digambarkan dengan hasil penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau yang disingkat dengan IKPA merupakan salah satu upaya Kantor Regional III BKN Bandung dalam rangka mewujudkan belanja Kementerian Negara/ Lembaga yang lebih berkualitas, lebih baik (spending better), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (good governance) serta memberikan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.

IKU pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran mengalami beberapa perubahan metode pengukuran di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 IKU ini dihitung menggunakan persentase penyerapan anggaran dan pada tahun 2021 menggunakan nilai SMART DJA, dan pada tahun 2022 metode pengukuran beralih menggunakan penilaian IKPA dimana komponen penilaiannya dinilai lebih mendekati penilaian pelaksanaan anggaran secara menyeluruh. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga terdapat perubahan aspek dan indikator penilaian dari tahun sebelumnya dari 4 aspek menjadi 3 aspek serta 13 indikator menjadi 8 indikator penilaian yang dapat dilihat pada matriks di bawah.

## FORMULA CAPAIAN IKU 13

Berdasarkan perolehan IKPA yang dilihat melalui aplikasi Om Span Kementerian Keuangan (<https://spanint.kemenkeu.go.id/>)

## Analisis Capaian IKU 13

Perolehan nilai IKPA Kanreg III BKN tahun 2023 adalah 93. Hasil capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu 93. Oleh karena itu, kinerja Kanreg III BKN dalam pemenuhan IKU 13 ini adalah 100.37%. Namun capaian saat ini tidak dapat disandingkan dengan target pada renstra dikarenakan pada tahun 2021 terdapat perubahan pengukuran capaian. Target pada renstra masih menyesuaikan dengan pengukuran yang berbeda dengan pengukuran saat ini (pengukuran saat ini menggunakan satuan indeks melalui nilai IKPA, sedangkan pada renstra menggunakan penilaian persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional III BKN. Capaian IKU 13 periode 2019-2023 disajikan melalui Tabel 3.26

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Target</b>	N/A	97%	98%	91*	93*	100%
<b>Realisasi</b>	N/A	92.56%	93.94%	91.73*	93.34*	-
<b>Kinerja</b>	N/A	95.42%	95.86%	100.8%	100.37%	-

\*Capaian tahun 2022 dan 2023 menggunakan indeks

Tabel 3.26 Perbandingan Target, Realisasi, dan Kinerja IKU 13 Tahun 2023

Hasil capaian IKPA diperoleh melalui aplikasi SAKTI. Berikut ini adalah tangkapan layar realisasi IKPA tahun 2023 yang diambil melalui aplikasi SAKTI.

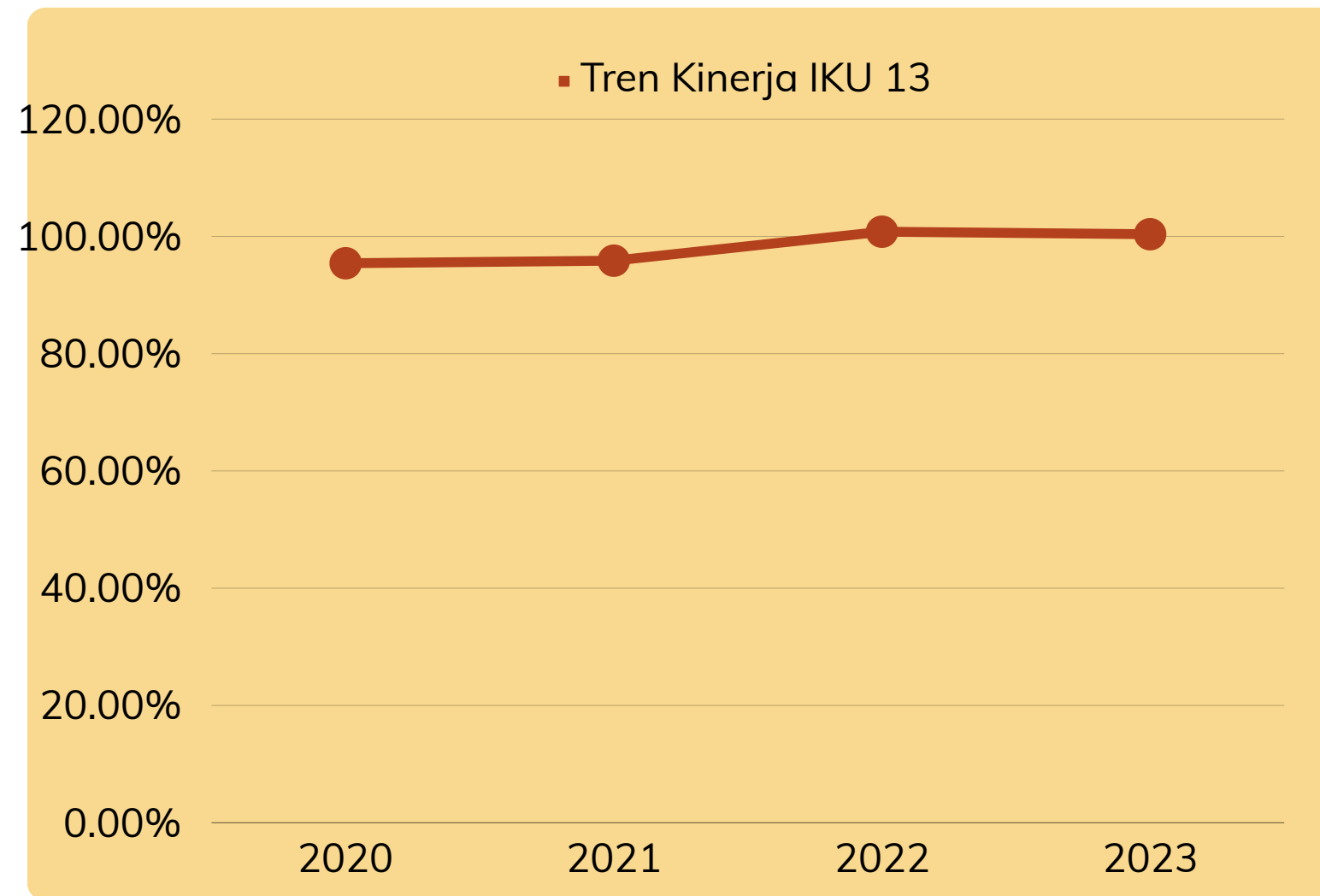
NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALSIAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				
1	095	088	017237	KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANDUNG	Nilai	100.00	56.43	95.38	92.62	100.00	99.99	100.00	97.46	93.34	100%	93.34
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	5.64	19.08	9.26	10.00	10.00	5.00	24.36			
					Nilai Aspek	78.22		97.60					97.46			

Gambar 3.22 Program RB tematik Kanreg III BKN tahun 2023

Dari grafik di bawah ini, dapat disimpulkan bahwa Kantor Regional III BKN telah melaksanakan pengelolaan anggaran yang optimal, terlihat dari kinerjanya yang terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2022 meskipun sempat terdapat penyesuaian dalam cara pengukuran capaian. Pada tahun 2023 ini, terdapat sedikit penurunan dalam hal capaian kinerja namun tetap terdapat kenaikan dalam realisasinya yaitu sebesar 1.61. Penurunan kinerja disebabkan karena adanya kenaikan target. Terdapat performance gap positif dari tahun ke tahun meski sempat ada penurunan capaian hasil realisasi, namun hal tersebut disebabkan penilaian pelaksanaan anggaran saat ini bukan hanya dari sisi penyerapan saja, namun lebih menyeluruh seperti yang sudah dijelaskan pada formula capaian sebelumnya. Pada tahun 2023 sendiri, terdapat performance gap sebesar 0.37% yang berarti kinerja yang direncanakan telah melampaui target pencapaian.

Faktor keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah komitmen dari pimpinan untuk selalu mendukung pelaksanaan anggaran di Kanreg III Bandung dengan membantu *follow up* jika terdapat kendala dan berdiskusi bersama dengan pengelola anggaran terkait hal-hal yang perlu dicari solusinya. Selain itu, koordinasi dengan biro keuangan BKN, inspektorat BKN, dan kementerian keuangan yang selalu terjaga juga menjadi faktor keberhasilan dalam pencapaian IKU ini.

Pada dasarnya capaian saat ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu yang tertulis pada renstra 2020-2024 dikarenakan adanya perbedaan satuan dalam pengukuran. Pada target renstra yang menjadi satuan dalam pengukuran adalah Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional III BKN sedangkan pengukuran saat ini menggunakan nilai IKPA.



Grafik 3.15 Tren Kinerja IKU 13

Sedangkan faktor yang menyebabkan nilai IKPA belum mencapai nilai yang sempurna sehingga masih perlu dievaluasi kembali kedepannya yaitu karena salah satu indikator IKPA, yaitu Deviasi Hal III DIPA nilainya masih rendah disebabkan oleh pemantauan Rencana Penarikan Dana (RPD) secara berkala belum dilakukan secara optimal, sehingga banyak realisasi belanja atau kegiatan yang berjalan tidak sesuai dengan rencana. Hal tersebut menyebabkan deviasi yang tinggi antara rencana dan realisasi.

Agar kedepannya nilai IKPA dapat ditingkatkan kembali, maka perlu dilakukan pemantauan (monitoring) secara berkala terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga realisasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan serta berusaha meningkatkan realisasi capaian output.



# IKU 14 *Persentase Tindak lanjut Temuan Hasil Audit Pemeriksaan BPK/ Inspektorat di Kantor Regional III BKN Bandung*

Indikator ini merupakan suatu upaya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pada Kantor Regional III BKN Bandung sebagai tindak lanjut hasil audit yang dilakukan BPK/Inspektorat di Kantor Regional III BKN Bandung dengan tujuan memperlihatkan kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan oleh Kantor Regional III berdasarkan aturan yang ada.

## FORMULA CAPAIAN IKU 14

$$IKU\ 14 = \frac{n}{X} \times 100\%$$

N = Σ Jumlah temuan yang ditindaklanjuti Kantor Regional III BKN  
 X = Σ Jumlah temuan dari BPK dan Inspektorat

## Analisis Capaian IKU 14

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Target</b>	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	N/A	100%	100%	100%	100%	-
<b>Kinerja</b>	N/A	100%	100%	100%	100%	-

Tabel 3.26 Perbandingan Target, Realisasi, dan Kinerja IKU 14 Tahun 2023

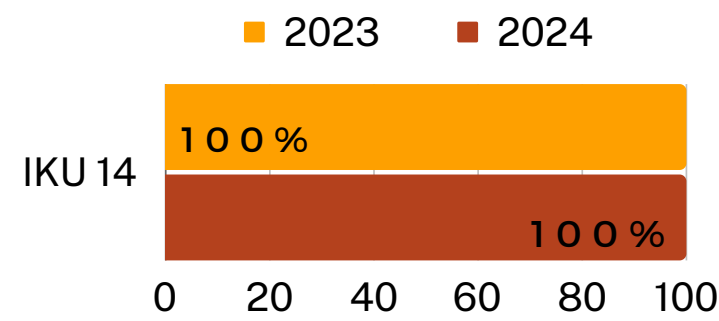
Sesuai dengan data yang disajikan pada Tabel 3.26 Capaian IKU 14 tahun 2023 adalah 100%. Kanreg III BKN secara konsisten berhasil mempertahankan realisasi pada IKU 14 ini sesuai dengan target yang diberikan yaitu 100%

Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2023 terhadap dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2022, terdapat beberapa catatan yang diberikan oleh BPK. Kanreg III BKN sudah menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK. Berikut ini adalah rincian catatan yang diberikan oleh BPK:

No	Temuan	Rekomendasi BPK	Rencana Aksi	Dokumen TL
1	Pembayaran Uang Lembur Tidak Didukung dengan Bukti Kehadiran Real Time dari Aplikasi Presensi LBP	BPK merekomendasikan Kepala BKN: Menginstruksikan Kepala Kanreg III BKN Bandung dan Pusbang ASN untuk berkoordinasi dengan Biro SDM dalam penggunaan LBP untuk presensi lembur di hari libur.	Kepala BKN menginstruksikan Kepala Kanreg III BKN Bandung dan Pusbang ASN untuk Berkoordinasi dengan Biro SDM dalam penggunaan LBP untuk presensi lembur di hari libur.	Dokumen bukti telah: Berkoordinasi dengan Biro SDM dalam penggunaan LBP untuk presensi lembur di hari libur.
2	Pengenaan Pajak atas Belanja Sewa Paket Meeting/Sewa Ruangan Hotel Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan: Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan BKN memastikan: 1) Bendahara pengeluaran di masing-masing satker dapat memahami aturan dan mengimplementasikan perpajakan sesuai ketentuan. 2) Berkoordinasi dengan KPP setempat untuk memastikan penyetoran PPh Pasal 23 oleh pihak hotel.	Kepala BKN menginstruksikan : Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan BKN untuk mensosialisasikan ketentuan perpajakan terkait Belanja Sewa Paket Meeting/Sewa Ruangan Hotel	Dokumen bukti telah: 1) Memastikan Bendahara pengeluaran di masing-masing Unit Kerja dapat memahami aturan dan mengimplementasikan perpajakan sesuai ketentuan. 2) Berkoordinasi dengan KPP setempat untuk memastikan penyetoran PPh Pasal 23 oleh pihak hotel.
3	Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal pada Dua Unit Kerja Belum Memadai	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan KPA BKN Kantor Pusat dan KPA Kanreg III BKN Bandung memerintahkan PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan perbaikan perencanaan dan pengadaan Belanja Modal dimasa mendatang sesuai ketentuan yang berlaku.	Kepala BKN menginstruksikan KPA BKN Kantor Pusat dan KPA Kanreg III BKN Bandung memerintahkan PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan perbaikan perencanaan dan pengadaan Belanja Modal dimasa mendatang sesuai ketentuan yang berlaku.	Dokumen bukti telah: Memerintahkan PPK dan Pejabat Pengadaan agar melakukan perbaikan perencanaan dan pengadaan Belanja Modal dimasa mendatang sesuai ketentuan yang berlaku.
4	Penatausahaan Persediaan Pada BKN Belum Sepenuhnya Tertib	BPK merekomendasikan kepada Kepala BKN agar menginstruksikan: Kepala Kanreg III BKN Bandung memerintahkan penanggung jawab persediaan obat Poliklinik untuk mengikuti kegiatan pelatihan pengelolaan barang persediaan.	Kepala BKN agar menginstruksikan: Kepala Kanreg III BKN Bandung memerintahkan penanggung jawab persediaan obat Poliklinik untuk mengikuti kegiatan pelatihan pengelolaan barang persediaan.	Dokumen bukti telah: Memerintahkan penanggung jawab persediaan obat Poliklinik untuk mengikuti kegiatan pelatihan pengelolaan barang persediaan.

Tabel 3.27 Daftar Rekomendasi dari BPK

Jika dibandingkan dengan target pada renstra yang perlu dicapai pada tahun 2024, maka target saat ini sudah sesuai dan harus dipertahankan agar kedepannya tidak terjadi penurunan. Hal tersebut sesuai dengan data yang disajikan pada grafik berikut



Grafik 3.16 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 14 Tahun 2023 & 2024

Faktor keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah komitmen dari pimpinan untuk selalu menyelesaikan tindak lanjut audit hasil pemeriksaan BPK ataupun inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didukung oleh pegawai pengelola anggaran dan barang yang berkompeten untuk menjalankan tugas fungsinya. Selain itu, koordinasi dengan biro keuangan BKN dan inspektorat BKN yang selalu terjaga juga menjadi faktor keberhasilan dalam pencapaian IKU ini.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU 14 ini adalah belum optimalnya refreshment bagi pegawai terkait dengan pengelolaan anggaran. Untuk itu, kedepannya diperlukan adanya sosialisasi untuk refreshment bagi pegawai terkait peraturan pengelolaan anggaran.

### 3.3 Perbandingan Kinerja dengan Sampel Kantor Regional BKN Lain

Unit kerja dapat melakukan perbandingan secara strategis agar dapat mengetahui bagian mana dari strategi pencapaian kinerja dari unit tersebut yang dapat diperbaiki dan ditingkatkan kembali. Selain itu, pembaruan strategi akan meningkatkan perkembangan unit kerja tersebut. Adanya benchmarking ini juga membantu unit kerja tersebut dalam penyesuaian dengan trend baru dan memantau keberhasilan dari unit tersebut untuk mencapai tujuannya. Selain itu, pentingnya benchmarking adalah unit tersebut mampu menentukan tujuan dan meningkatkan performance matrix untuk memperbaiki kinerjanya dari analisis benchmarking itu sendiri. Unit kerja dapat menetapkan target yang realistis dan lebih kompetitif daripada sebelumnya, dan dapat mengidentifikasi kekurangan atau kendalanya pada kinerja.

Hal ini sangat baik tentunya untuk unit kerja dan Stakeholder terkait, karena dapat merangsang inovasi yang akan membantu meningkatkan kualitas kinerja unit kerja tersebut. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas kinerja sesuai benchmarking maka unit kerja juga dituntut akan pengembangan strategis dari sisi SDM melalui pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Selain kinerja dalam manajemen, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pada industri terkait juga akan menambah keterampilan, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kinerja guna memberi pelayanan prima. Dalam hal benchmarking ini, Kanreg III melakukan perbandingan dengan dua Kanreg lainnya yaitu Kanreg I Yogyakarta dan Kanreg II Surabaya.

Berdasarkan data yang dapat dilihat pada Tabel 3.28 terlihat bahwa Kanreg III BKN Bandung memiliki nilai kinerja lebih besar dibanding Kanreg lain. Hal ini terjadi pada IKU:

- **IKU 3:** Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan Kantor Regional III BKN. Capaian Kanreg I Yogyakarta adalah sebesar 94.84 sedangkan Kanreg II Surabaya sebesar 96.10. Capaian IKU 3 ini didukung oleh beberapa kegiatan seperti membuka stand Pembinaan Deket Kanreg Tilu (PDKT) sebanyak 5 kali di beberapa daerah di Jawa Barat dan Serang serta melakukan evaluasi internal secara intens terhadap capaian IKM pembinaan.

Sedangkan dalam beberapa IKU terlihat bahwa Kanreg III BKN menduduki posisi peringkat kedua ataupun ketiga dibandingkan dengan Kanreg lainnya, yaitu sebagai berikut:

- **IKU 4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian.** Nilai IKM Layanan Kanreg Bandung adalah 92.1 sedangkan Kanreg I BKN Yogyakarta adalah 93.35 dan Kanreg II BKN Surabaya sebesar 96.10. Hasil nilai IKM pelayanan Kanreg III BKN menunjukkan bahwa unsur "penanganan pengaduan, saran, dan masukan" mendapatkan nilai terendah. Hal tersebut disebabkan karena dalam beberapa waktu terakhir ini seringkali terjadi kendala pada SIASN, namun pegawai Kanreg III BKN tidak memiliki akses menindaklanjuti keluhan terkait kendala pada SIASN tersebut sehingga hal yang dapat dilakukan adalah dengan menginventarisir kendala yang dihadapi kemudian menyampaikan kendala tersebut ke PPSI ASN. Baik Kanreg III Bandung maupun Kanreg I Yogyakarta menghadapi kendala yang sama, yaitu mendapatkan nilai terendah untuk unsur penanganan pengaduan yang disebabkan karena masa transisi dalam penggunaan SIASN dan dalam beberapa waktu terakhir ini seringkali terjadi kendala pada SIASN. Beberapa fungsi pada SIASN memang relatif masih baru sehingga masih terdapat pembaharuan. Strategi yang dapat dipelajari dari Kanreg I Yogyakarta untuk Kanreg III Bandung adalah adanya pelatihan pelayanan prima, pelayanan team building, serta Persyaratan kenaikan pangkat di publish melalui Web.
- **IKU 7. Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital.** Kanreg I Yogyakarta dan Kanreg III Bandung memiliki capaian yang sama dalam IKU ini yaitu sebesar 91.6%. Sedangkan Kanreg II Surabaya sudah mencapai 100%. Capaian Kanreg III Bandung belum mencapai 100% dikarenakan masih terdapat satu layanan manajemen ASN yang belum terdigitalisasi, yaitu layanan mutasi lain-lain. Rencananya mutasi lain-lain ini akan segera diakomodir melalui SIASN pada tahun 2024.
- **IKU 9. Indeks Profesionalitas ASN.** Capaian Kanreg I Yogyakarta adalah sebesar 88.85, Kanreg II Surabaya sebesar 90.44, sedangkan capaian Kanreg III Bandung adalah 87.72. Sama halnya dengan Kanreg II Surabaya, Kanreg III Bandung dalam mencapai IKU ini juga mengadakan kegiatan *knowledge sharing* melalui kegiatan Rakabangetsi. Selain itu juga Kanreg III BKN melalui subbag kepegawaian terus mendorong motivasi pegawai untuk mengikuti pendidikan formal yang dilakukan secara lisan serta seluruh pejabat struktural tiada henti mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja. Jika dilihat dari sisi gap nilai yang dicapai oleh Kanreg III BKN dibandingkan dengan nilai maksimal yang dapat diperoleh di masing-masing dimensi, maka pada dimensi kinerja masih terdapat gap yang cukup tinggi dibanding dimensi yang lain.
- **IKU 10. Persentase unit kerja di lingkungan kantor regional yang menerapkan sistem informasi yang terstandar.** Capaian Kanreg I Yogyakarta adalah sebesar 80%, sedangkan Kanreg II Surabaya sebesar 100%. Capaian Kanreg III Bandung adalah 94.63%, dimana aplikasi yang belum optimal penggunaannya adalah email BKN, loker BKN, Siwaregtilu, dan Simpeg.
- **IKU 12. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional.** Capaian Kanreg I Yogyakarta adalah sebesar 71.85, sedangkan Kanreg II Surabaya sebesar 69.05%. Capaian Kanreg III Bandung adalah 70, Terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan kepada Kanreg III BKN dalam upaya meningkatkan kualitas SAKIP. Beberapa rekomendasinya seperti melibatkan seluruh pegawai dalam pelaporan kinerja, menyelaraskan target yang ada pada seluruh dokumen SAKIP, memperkuat koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi BKN, mempertajam analisis pada LKJ, serta menyusun SOP pelaporan kinerja. Beberapa diantara rekomendasi tersebut telah diterapkan dalam pembuatan LKJ 2023, namun beberapa rekomendasi akan ditindaklanjuti di 2024.
- **IKU 13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional BKN.** Capaian Kanreg I Yogyakarta adalah sebesar 97.66, sedangkan Kanreg II Surabaya sebesar 97.31. Jika dibandingkan dengan Kanreg I dan II, Kanreg III BKN Bandung menududki posisi terakhir dengan capaian nilai IKPA sebesar 93.34. Faktor yang menyebabkan nilai IKPA Kanreg III BKN belum optimal nilai Deviasi Hal III DIPA yang masih rendah disebabkan oleh pemantauan Rencana Penarikan Dana (RPD) secara berkala belum dilakukan secara optimal, sehingga banyak realisasi belanja atau kegiatan yang berjalan tidak sesuai dengan rencana. Adapun Kanreg I Yogyakarta memiliki nilai tertinggi dibandingkan Kanreg II dan III. Dalam pemenuhan IKU 13. Kanreg I BKN mempunyai strategi seperti mengoptimalkan seluruh jaringan komunikasi untuk memantau setiap inputan SAKTI, menghitung rencana penarikan dana belanja barang lebih akurat dan melakukan konfirmasi terkait rencana kegiatan dan anggaran setiap bidang, melakukan monitoring setiap inputan dan feed back dari KPPN di aplikasi SAKTI. Strategi dari Kanreg I BKN tersebut dapat diadopsi oleh Kanreg III BKN agar dapat mengoptimalkan nilai IKPA.

Selain dari keenam IKU yang telah disebutkan sebelumnya, antara Kanreg I, II, dan III BKN memiliki kesamaan capaian, seperti pada beberapa IKU berikut ini:

- **IKU 2: Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.** Baik Kanreg I, II, maupun III memiliki capaian sebesar 100%. Salah satu strategis yang sama-sama dilakukan oleh Kanreg III Bandung dan Kanreg I Yogyakarta adalah mengadakan pendampingan peningkatan nilai IPASN bagi instansi daerah di wilayah kerja masing-masing.
- **IKU 5: Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN.** Baik Kanreg I, II, maupun III memiliki capaian sebesar 100%. Artinya dalam Kanreg I,II, dan III telah mencerminkan konsistensi dan ketertiban dalam menjaga harmonisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Manajemen ASN.
- **IKU 6: Persentase Sistem Informasi Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SIASN.** Baik Kanreg I, II, maupun III memiliki capaian sebesar 100%. Artinya upaya percepatan integrasi SIASN dengan sistem informasi pengelola ASN di lingkungan kerja Kanreg I,II, dan III sudah optimal dan sesuai dengan target yang diharapkan.
- **IKU 1. Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di Wilayah Kantor Regional BKN.** Capaian masih N/A.
- **IKU 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditindaklanjuti di Kantor Regional BKN.** Baik Kanreg I, II, maupun III memiliki capaian sebesar 100%. Artinya rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian pada Kanreg I,II,III BKN sudah ditindaklanjuti 100%.
- **IKU 11. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional BKN.** Baik Kanreg I, II, maupun III memiliki capaian sebesar 100%. Nilai ini pada dasarnya didapatkan dari nilai reformasi Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- **IKU 14. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat.** Baik Kanreg I, II, maupun III memiliki capaian sebesar 100%. Artinya Kanreg I,II,III secara umum sudah menindaklanjuti temuan hasil audit pemeriksaan BPK/inspektorat.

## 3.4 Kinerja Lainnya

- **Pelaksanaan Fasilitasi Computer Assisted Competency Test (CACT):**

Di tahun 2023, Kantor Regional III BKN melalui kolaborasi dengan Pusat Pengembangan Kompetensi BKN telah melaksanakan fasilitasi CACT terhadap 6 instansi daerah di wilayah kerja Kantor Regional III BKN. Laporan pelaksanaan dapat dilihat melalui tautan berikut: <https://bit.ly/CACTKR3TH2023>.

- **Pelaksanaan Fasilitasi Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023**

Sepanjang tahun 2023, Kantor Regional III BKN turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan seleksi CASN. Seluruh pegawai Kantor Regional III BKN menjadi bagian tim seleksi termasuk didalamnya personil bidang PDSK. Terdapat sejumlah pegawai PDSK yang ditugaskan sebagai tim pengawas maupun tim IT. Selain menjadi anggota tim seleksi, Audiman bidang PDSK juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan seleksi. Hasil pelaksanaan kegiatan dan monitoring kemudian dituangkan ke dalam laporan yang disampaikan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi dari bidang PDSK. Laporan pelaksanaan kegiatan serta hasil monitoring dan rekomendasi dapat diakses melalui tautan berikut: <https://bit.ly/CASNPDSK3TH2023>.

- **Pelaporan SKP 2022 dan Pemanfaatan Aplikasi Kinerja BKN**

Seluruh instansi daerah di wilayah kerja Kantor Regional III BKN telah melakukan penyusunan hingga penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Permanpan No 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pelaporan kinerja tahun 2022 tersebut mulai dilaporkan oleh instansi daerah pada awal tahun 2023 melalui updating data pada Sistem Informasi ASN (SIASN) BKN. Selain kegiatan rekonsiliasi data pelaporan kinerja tahun 2022, pada tahun 2023 juga dilakukan sosialisasi dan pendampingan pemanfaatan aplikasi kinerja BKN ([kinerja.bkn.go.id](http://kinerja.bkn.go.id)). Secara garis besar, terdapat 24 instansi daerah di wilayah kerja Kantor Regional III BKN yang aktif memanfaatkan aplikasi kinerja Instansi yang belum memanfaatkan aplikasi kinerja BKN dikarena instansi daerah telah memiliki aplikasi kinerja mandiri yang sudah dikaitkan dengan sistem pembayaran TPP. Laporan detil dapat diakses melalui: <https://bit.ly/EkinerjaKanreg3Tahun 2023>

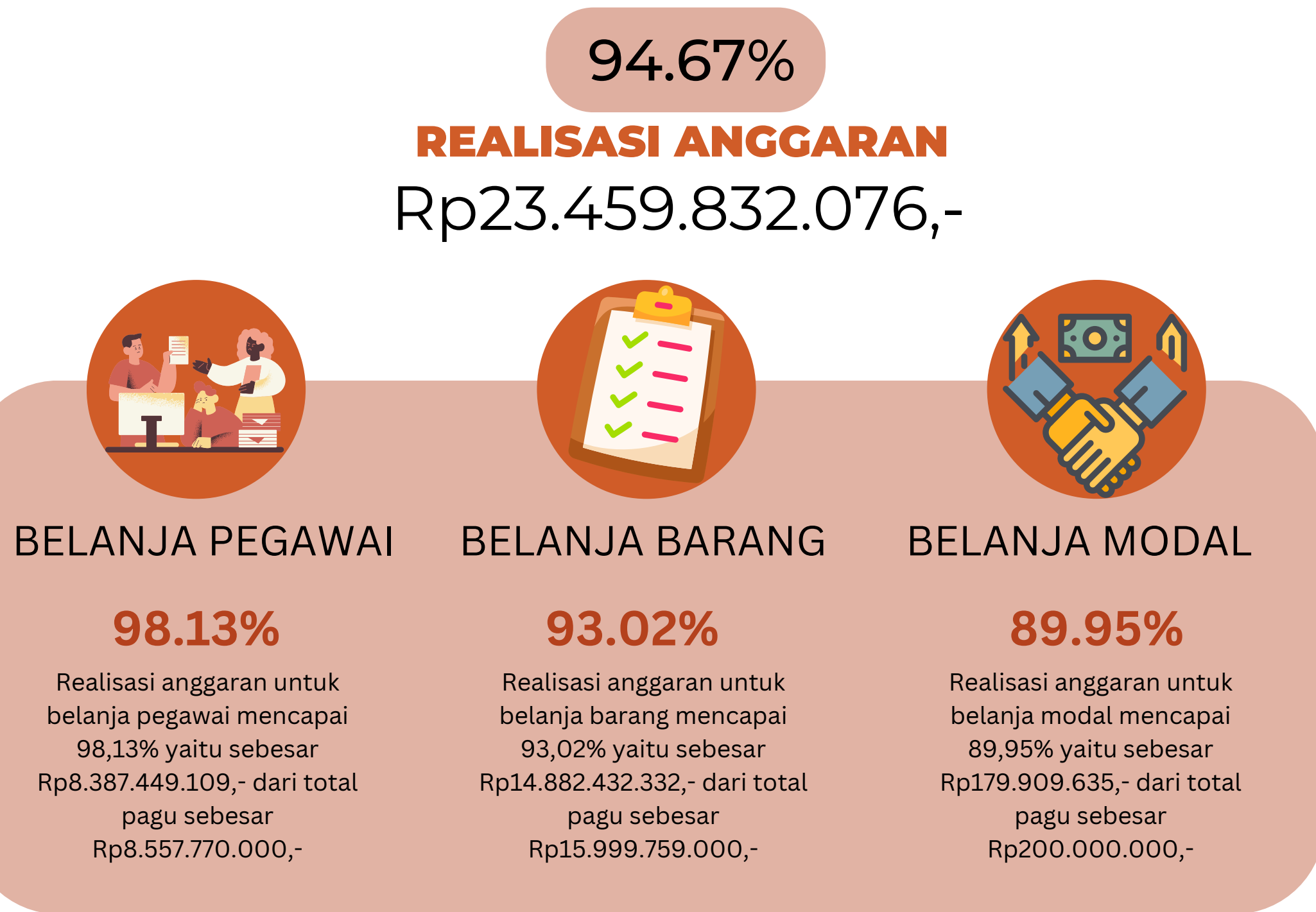
# TABEL BENCHMARKING KINERJA DENGAN KANTOR REGIONAL

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KANREG I BKN YOGYAKARTA	KANREG II BKN SURABAYA	KANREG III BANDUNG
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>				
<b>SASARAN STRATEGIS 1</b> Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	IKU 1. Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di Wilayah Kantor Regional III BKN	N/A	N/A	N/A
	IKU 2. Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kantor Regional III BKN	100%	100%	100%
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>				
<b>SASARAN STRATEGIS 2</b> Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	IKU 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan Kantor Regional III BKN	94.84	96.10	96.34
	IKU 4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung	93.35	96.21	92.10
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>				
<b>SASARAN STRATEGIS 3</b> Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN sesuai Undang Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN	IKU 5. Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional III BKN Bandung	100%	100%	100%
<b>SASARAN STRATEGIS 4</b> Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	IKU 6. Persentase Sistem Informasi Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SIASN di Wilayah Kantor Regional III BKN.	100%	100%	100%
<b>SASARAN STRATEGIS 5</b> Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN	IKU 7. Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional III BKN	100%	100%	91.6%
<b>SASARAN STRATEGIS 6</b> Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN	IKU 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditindaklanjuti di Kantor Regional III BKN.	100%	100%	100%
<b>LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE</b>				
<b>SASARAN STRATEGIS 7</b> Terwujudnya Manajemen Internal Kantor Regional III BKN yang efektif, efisien dan akuntabel	IKU 9. Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional III BKN	88.58	90.44	87.72
	IKU 10. Persentase unit kerja dilingkungan Kantor Regional III BKN yang menerapkan sistem informasi yang terstandar	100%	100%	94.63%
	IKU 11. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional III BKN	77.29	77.29	77.29
	IKU 12. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional III BKN	71.85	69.05	70
	IKU 13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional III BKN Bandung	97.66	97.31	93.34
	IKU 14. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat.	100%	100%	100%

Tabel 3.28 Tabel Benchmarking dengan Kanreg Sejenis

### 3.5 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023, Kantor Regional III BKN Bandung telah berhasil merealisasikan anggarannya sebesar 94.67% dari pagu yang didapat, yaitu Rp24.757.529.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Berikut rincian realisasi anggaran Kanreg III BKN Bandung tahun 2023:



Anggaran yang tidak terealisasi sebesar 5,24% yaitu sebesar Rp1.297.696.924,-

- 1,87% anggaran untuk belanja pegawai yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp160.270.891,-
- 6,98% anggaran untuk belanja barang yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp1.117.335.668,-
- 10,05% anggaran untuk belanja modal yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp20.090.365,-

Penyerapan anggaran kurang maksimal dikarenakan dua hal berikut ini, yaitu:

1. Minimnya waktu persiapan dan pelaksanaan kegiatan seleksi CASN 2023 yang dilakukan pada akhir tahun
2. Kurang optimalnya pemantauan terhadap rencana penarikan dana (RPD)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Regional III BKN Bandung didukung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp16.711.432.000,- (Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang tercantum dalam DIPA awal tahun anggaran 2023. Selanjutnya dalam rangka pemusatan kembali dan tambahan anggaran dari BKN Pusat, maka terdapat perubahan alokasi anggaran DIPA Tahun 2023 menjadi sebesar Rp24.757.529.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Melalui mekanisme revisi sebanyak 9 (sembilan) kali yang terdiri dari revisi 3 (tiga) kali revisi DJA dan 6 (enam) kali revisi tingkat Kanwil DJPB.

Pagu anggaran sebesar Rp24.757.529.000,- dialokasikan untuk membiayai 2 (dua) Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN (088.CO) sebesar Rp10.144.073.000,- (Sepuluh Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah). Anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi (3655) sebesar Rp9.395.376.000,- (Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN (4846) sebesar Rp225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
  - c. Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi ASN (4847) sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
  - d. Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN (4848) sebesar Rp433.697.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

2. Program Dukungan Manajemen (088.WA) sebesar Rp14.613.456.000,- (Empat Belas Milyar Enam Ratus Tiga Belas Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). Anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pengelolaan Organisasi dan SDM (4842) sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
  - b. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (4843) sebesar Rp14.563.456.000 (Empat Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan kegiatan operasional dan non operasional kantor, persentase capaian realisasi anggaran Kantor Regional III BKN Bandung yaitu 94,76% dari total anggaran.

#### 1. Belanja Pegawai (51)

Realisasi anggaran untuk belanja pegawai mencapai 98,13% yaitu sebesar Rp8.387.449.109,- dari total pagu sebesar Rp8.557.770.000,-

#### 2. Belanja Barang (52)

Realisasi anggaran untuk belanja barang mencapai 93,02% yaitu sebesar Rp14.882.432.332,- dari total pagu sebesar Rp15.999.759.000,-

#### 3. Belanja Modal (53)

Realisasi anggaran untuk belanja modal mencapai 89,95% yaitu sebesar Rp179.909.635,- dari total pagu sebesar Rp200.000.000,-

Anggaran yang tidak terealisasi sebesar 5,24% yaitu sebesar Rp1.297.696.924,-

- 1,87% anggaran untuk belanja pegawai yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp160.270.891,-
- 6,98% anggaran untuk belanja barang yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp1.117.335.668,-
- 10,05% anggaran untuk belanja modal yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp20.090.365,-

Untuk Pagu Anggaran 2023 terdapat 9 (sepuluh) kali revisi pagu yang dilakukan. Revisi-revisi tersebut antara lain:

- 1.Revisi 1 (26 Desember 2022): Karena adanya *automatic adjustment*
- 2.Revisi 2 (13 Maret 2023): Karena adanya pemutakhiran POK karena ada beberapa pergeseran dalam pagu hal tetap dan terdapat pergeseran antar rincian output.
- 3.Revisi 3 (16 Maret 2023): Dikarenakan adanya penambahan anggaran BA BUN terkait kegiatan seleksi CASN
- 4.Revisi 4 (8 Juni 2023): Karena adanya Pergeseran belanja modal
- 5.Revisi 5 (13 Juli 2023): Karena penambahan akun terkait rencana renovasi rumah dinas (akun belanja penambahan nilai gedung dan bangunan).
- 6.Revisi 6 (26 Oktober 2023): Dikarenakan pemutakhiran POK karena ada beberapa pergeseran dalam pagu hal tetap dan terdapat pergeseran antar rincian output.
- 7.Revisi 7 (3 November 2023): Dikarenakan ada penambahan anggaran BA BUN terkait kegiatan seleksi CASN.
- 8.Revisi 8 (16 November 2023): pemutakhiran POK karena ada beberapa pergeseran dalam pagu hal tetap dan terdapat pergeseran antar rincian output.
- 9.Revisi 9 (6 Desember 2023): Dikarenakan ada penambahan anggaran BA BUN/SABA II terkait kegiatan seleksi CASN

## 3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Konsep efisiensi merupakan konsep yang mendasar dan lahir dari konsep ekonomi. Meskipun demikian, konsep mengenai efisiensi dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang dan latar belakang. Pada umumnya, efisiensi dapat diarahkan kepada sebuah konsep tentang pencapaian suatu hasil dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Efisiensi adalah ukuran tingkat pemanfaatan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit pemanfaatan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efisiensi diartikan sebagai ketepatan cara dalam melaksanakan suatu usaha atau kerja, dalam menjalankan sesuatunya dengan tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya yang besar.

Efisiensi adalah pemanfaatan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara- cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Efisiensi yang dimaksud adalah pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk percepatan proses sehingga suatu kegiatan dapat dalam menghasilkan output kinerja yang maksimal.

Pada tahun anggaran 2023, terdapat beberapa IKU yang tingkat efisiensinya bernilai negatif, sehingga dapat diartikan bahwa penggunaan sumber daya (dalam hal ini adalah anggaran) belum tepat untuk memaksimalkan hasil kerja. Beberapa IKU dengan tingkat efisiensi negatif yaitu IKU 1, 10, 11, dan 12. Beberapa IKU yang dianggarkan namun belum mencapai kinerja yang diharapkan tersebut dikarenakan pada kenyataannya terdapat kendala-kendala yang terjadi.

Walaupun begitu, Kanreg III terus berupaya untuk mengoptimalkan kinerjanya dengan anggaran yang ada, namun senada dengan evaluasi SAKIP yang dilakukan Inspektorat BKN, Kanreg III harus lebih mencermati dan mematangkan perencanaannya agar terciptanya integrasi antara kinerja dengan anggaran menuju linearitas yang mendekati ideal dengan lebih mematangkan perencanaan dan mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja.

Dalam perhitungan nilai efisiensi ini, batas minimalnya adalah -20%, sedangkan batas maksimalnya adalah 20%. Pada halaman berikutnya dapat dilihat tabel efisiensi sumber daya Kanreg III BKN Bandung selama tahun 2023:

# TABEL ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
SS.1.Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	IKU 1. Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di Wilayah Kantor Regional III BKN Bandung	100%	91.89%	91.89%	Rp433.697.000	Rp403.375.766	-1.22%
	Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Kantor Regional III BKN Bandung	100%	100%	100%	Rp433.697.000	Rp403.375.766	6.99%
SS.2.Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	IKU 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung	97	96.34	99.32%	Rp433.697.000	Rp403.375.766	6.35%
	IKU 4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung	95	92.10	96.95%	Rp581.000.000	Rp531.659.400	5.61%
SS.3.Terwujudnya Pemenuhan Kebijakan Teknis Manajemen ASN	IKU 5. Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional III BKN Bandung	100%	100%	100%	Rp50.000.000	Rp46.726.649	6.55%
SS.4.Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN	IKU 6. Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di Kantor Regional III BKN Bandung	100%	100%	100%	Rp90.000.000	Rp81.593.241	9.34%
SS.5.Terwujudnya Peningkatan Digitalisasi Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN	IKU 7. Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional III BKN Bandung	100%	92%	91.60%	Rp90.000.000	Rp81.593.241	2.10%
SS.6.Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN	IKU 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di Kantor Regional III BKN Bandung	100%	100%	100%	Rp433.697.000	Rp403.375.766	6.99%
SS.7.Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel	IKU 9. Indeks Profesionalitas ASN BKN Kanreg III BKN Bandung	80	87.72	109.65%	Rp5.739.721.000	Rp5.464.027.755	13.18%
	IKU 10. Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang tersetandar di Kantor Regional III BKN Bandung	100%	94.63%	94.63%	Rp5.739.721.000	Rp5.464.027.755	-0.60%
	IKU 11. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Regional III BKN Bandung	83	77,29	93.12%	Rp5.739.721.000	Rp5.464.027.755	-2.23%
	IKU 12. Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di Kantor Regional III BKN Bandung	80	70	87.50%	Rp5.739.721.000	Rp5.464.027.755	-8.80%
	IKU 13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional III BKN Bandung	93	93	100.37%	Rp5.739.721.000	Rp5.464.027.755	4.80%
	IKU 14. Persentase Tindak lanjut Temuan Hasil Audit Pemeriksaan BPK/ Inspektorat di Kantor Regional III BKN Bandung	100%	100%	100%	Rp5.739.721.000	Rp5.464.027.755	4.80%

Tabel 3.29 Tabel Analisis Efisiensi Sumber Daya



Berikut ini adalah analisis terhadap capaian tingkat efisiensi dari setiap IKU di Kanreg III BKN sesuai dengan tertera pada Tabel 3.29:

- **IKU 1:** Tingkat efisiensi IKU 1 adalah -1.22%. Persentase anggaran yang telah dikeluarkan untuk IKU 1 adalah 93%, sedangkan capaian kinerja IKU 1 adalah 91.89%. Tingkat efisiensi yang negatif ini mencerminkan bahwa anggaran yang dikeluarkan belum secara tepat mendorong hasil yang maksimal dalam pencapaian target IKU yang telah ditetapkan. Namun tingkat efisiensi pada IKU 1 ini masih berada diatas batas minimal nilai efisiensi yang ditetapkan. Kendala yang menyebabkan capaian kinerja belum maksimal adalah keterbatasan SDM pada instansi daerah, terbatasnya waktu penginputan dokumen, dan seringnya terjadi rotasi/mutasi pada instansi daerah tanpa diiringi dengan transfer knowledge sehingga informasi terputus.
- **IKU 2:** Tingkat efisiensi IKU 2 adalah 6.99%. Persentase anggaran yang telah dikeluarkan untuk IKU 2 adalah 93%, sedangkan capaian kinerja IKU 1 adalah 100%. Tingkat efisiensi yang positif ini menggambarkan bahwa anggaran yang dikeluarkan sudah mampu mendorong hasil yang maksimal dalam pencapaian target IKU yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan capaian yang sudah sesuai target, masih terdapat anggaran yang tersisa. Dalam hal efisiensi, hal ini merupakan pertanda yang baik karena yang diharapkan adalah penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Namun dari sisi penyerapan anggaran dapat dianggap kurang optimal karena diasumsikan bahwa anggaran tidak digunakan sesuai dengan perencanaan. Tingkat efisiensi pada IKU 2 ini masih berada dibawah batas maksimal nilai efisiensi yang telah ditetapkan. Terdapat sisa anggaran disebabkan oleh pembelian ATK yang belum direalisasikan karena masih mengoptimalkan sisa ATK kantor regional III BKN yang sudah ada sebelumnya
- **IKU 3:** Tingkat efisiensi IKU 3 adalah 6.35%. Persentase anggaran yang telah dikeluarkan untuk IKU 3 adalah 93%, sedangkan capaian kinerja IKU 3 adalah 99.32%. Sama halnya seperti pada IKU 2, tingkat efisiensi yang positif ini mencerminkan bahwa anggaran yang dikeluarkan sudah tepat mendorong hasil yang maksimal dalam pencapaian target IKU yang telah ditetapkan.
- **IKU 4:** Tingkat efisiensi IKU 4 adalah 5.61%. Persentase anggaran yang telah dikeluarkan untuk IKU 4 adalah 91.5%, sedangkan capaian kinerja IKU 4 adalah 96.95%. Sama halnya seperti IKU 2, tingkat efisiensi yang positif ini mencerminkan bahwa anggaran yang dikeluarkan sudah mampu mendorong hasil yang maksimal dalam pencapaian target IKU yang telah ditetapkan. Sisa anggaran disebabkan pembelian ATK dan seminar kit yang belum optimal.

- **IKU 5:** Tingkat efisiensi IKU 5 adalah 6.55%. Persentase anggaran yang telah dikeluarkan untuk IKU 5 adalah 93.4%, sedangkan capaian kinerja IKU 5 adalah 100%. Tingkat efisiensi yang positif ini mencerminkan bahwa anggaran yang dikeluarkan sudah secara tepat mendorong hasil yang maksimal dalam pencapaian target IKU yang telah ditetapkan. Nilai positif terjadi karena masih adanya sisa anggaran ketika capaian sudah mencapai target.
- **IKU 6:** Tingkat efisiensi IKU 2 adalah 9.34%. Tingkat efisiensi yang cukup tinggi disebabkan oleh capaian IKU 6 yang sudah mencapai 100%, namun terdapat sisa anggaran karena anggaran yang terpakai hanya 90% dari anggaran yang diberikan. Tingkat efisiensi pada IKU 2 ini masih berada dibawah batas maksimal nilai efisiensi yang telah ditetapkan. Terdapat sisa anggaran disebabkan oleh pembelian ATK yang belum direalisasikan karena masih mengoptimalkan sisa ATK kantor regional III BKN yang sudah ada sebelumnya
- **IKU 7:** Tingkat efisiensi IKU 7 adalah 2.10%. Persentase anggaran yang telah dikeluarkan untuk IKU 7 adalah 90%, sedangkan capaian kinerja IKU 3 adalah 91.6%. Tingkat efisiensi yang positif ini mencerminkan bahwa penggunaan anggaran untuk menghasilkan output sudah cukup sesuai. Meskipun capaian belum mencapai target, namun penggunaan anggaran sebanding dengan hasil yang dicapai.
- **IKU 8:** Tingkat efisiensi IKU 8 adalah 6.99%. Persentase anggaran yang telah dikeluarkan untuk IKU 8 adalah 93%, sedangkan capaian kinerja IKU 8 adalah 100%. Tingkat efisiensi yang positif ini mencerminkan bahwa penggunaan anggaran untuk menghasilkan output sudah cukup sesuai. Meskipun capaian belum mencapai target, namun penggunaan anggaran sebanding dengan hasil yang dicapai.
- **Tingkat efisiensi IKU 9 adalah 13.18%.** Persentase anggaran yang telah dikeluarkan untuk IKU 9 adalah 95.1%, sedangkan capaian kinerja IKU 9 adalah 109.65%. Tingkat efisiensi yang positif ini menggambarkan bahwa anggaran yang dikeluarkan sudah mampu mendorong hasil yang maksimal dalam pencapaian target IKU yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan capaian yang melebihi target, masih terdapat anggaran yang tersisa menyebabkan tingkat efisiensi yang tinggi. Dalam hal efisiensi, hal ini merupakan pertanda yang baik karena yang diharapkan adalah penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Namun dari sisi penyerapan anggaran dapat dianggap kurang optimal karena diasumsikan bahwa anggaran tidak digunakan sesuai dengan perencanaan. Penyerapan anggaran tidak optimal karena pelaksanaan seleksi CASN di akhir tahun dan keterbatasan pegawai yang menyebabkan seluruh pegawai harus dilibatkan dalam kegiatan seleksi CASN dan hal tersebut menyebabkan penyerapan anggaran rutin menjadi tidak optimal.

- **IKU 10:** Tingkat efisiensi IKU 10 adalah -0.60%. Persentase anggaran yang telah dikeluarkan untuk IKU 10 adalah 95.1%, sedangkan capaian kinerja IKU 10 adalah 94.63%. Tingkat efisiensi yang negatif ini mencerminkan bahwa anggaran yang dikeluarkan belum secara tepat mendorong hasil yang maksimal dalam pencapaian target IKU yang telah ditetapkan. Namun tingkat efisiensi pada IKU 10 ini masih berada di atas batas minimal nilai efisiensi yang ditetapkan. Kendala yang menyebabkan capaian kinerja belum maksimal adalah belum optimalnya sosialisasi terhadap beberapa aplikasi terstandar sehingga terdapat pegawai yang belum memanfaatkan aplikasi yang dimaksud.
- **IKU 11:** Tingkat efisiensi IKU 11 adalah -2.23%. Persentase anggaran yang telah dikeluarkan untuk IKU 11 adalah 95.1%, sedangkan capaian kinerja IKU 11 adalah 93.12%. Tingkat efisiensi yang negatif ini mencerminkan bahwa anggaran yang dikeluarkan belum secara tepat mendorong hasil yang maksimal dalam pencapaian target IKU yang telah ditetapkan. Namun tingkat efisiensi pada IKU 10 ini masih berada di atas batas minimal nilai efisiensi yang ditetapkan.
- **IKU 12:** Tingkat efisiensi IKU 12 adalah -8.80%. Persentase anggaran yang telah dikeluarkan untuk IKU 12 adalah 95.1%, sedangkan capaian kinerja IKU 12 adalah 87.50%. Tingkat efisiensi yang negatif ini menggambarkan bahwa anggaran yang dikeluarkan belum secara tepat mendorong hasil yang maksimal dalam pencapaian target IKU yang telah ditetapkan. Nilai efisiensi yang kurang optimal ini disebabkan tidak sebandingnya anggaran yang telah dikeluarkan dengan capaian yang dihasilkan. Capaian yang belum optimal ini disebabkan oleh pembuatan laporan yang belum memenuhi kualitas pelaporan yang diharapkan. Namun tingkat efisiensi pada IKU 10 ini masih berada di atas batas minimal nilai efisiensi yang ditetapkan.
- **IKU 13:** Tingkat efisiensi IKU 13 adalah 4.80%. Persentase anggaran yang telah dikeluarkan untuk IKU 13 adalah 95.1%, sedangkan capaian kinerja IKU 13 adalah 100.37%. Tingkat efisiensi yang positif ini menggambarkan bahwa anggaran yang dikeluarkan sudah mampu mendorong hasil yang maksimal dalam pencapaian target IKU yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan capaian yang melebihi target, masih terdapat anggaran yang tersisa menyebabkan tingkat efisiensi yang tinggi. Dalam hal efisiensi, hal ini merupakan pertanda yang baik karena yang diharapkan adalah penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Namun dari sisi penyerapan anggaran dapat dianggap kurang optimal karena diasumsikan bahwa anggaran tidak digunakan sesuai dengan perencanaan.

- **IKU 14:** Tingkat efisiensi IKU 14 adalah 4.80%. Persentase anggaran yang telah dikeluarkan untuk IKU 14 adalah 95.1%, sedangkan capaian kinerja IKU 14 adalah 100%. Tingkat efisiensi yang positif ini menggambarkan bahwa anggaran yang dikeluarkan sudah mampu mendorong hasil yang maksimal dalam pencapaian target IKU yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan capaian yang melebihi target, masih terdapat anggaran yang tersisa menyebabkan tingkat efisiensi yang tinggi. Dalam hal efisiensi, hal ini merupakan pertanda yang baik karena yang diharapkan adalah penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Namun dari sisi penyerapan anggaran dapat dianggap kurang optimal karena diasumsikan bahwa anggaran tidak digunakan sesuai dengan perencanaan.

# BAB IV PENUTUP



## 4.1 KESIMPULAN

Pembuatan Laporan Kinerja (LKj) Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung tahun 2023 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan dibuat sebagai bukti pertanggungjawaban kinerja Kanreg III BKN atas pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah kerja Provinsi Jawa Barat dan Banten. Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ini dapat dilihat antara lain dari kuantitas dan kualitas pelayanan dalam bidang kepegawaian secara cepat, tepat dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kepuasan PNS dan instansi terkait serta mendorong semangat kerja PNS.

Dalam mewujudkan Visi BKN, Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) indikator kinerja utama. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti penerbitan kebijakan terkait pelayanan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga terwujudnya layanan yang bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada para stakeholder.

Dari total 14 IKU, sebanyak 7 IKU telah tercapai sesuai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Beberapa IKU yang belum dapat mencapai target, seperti Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di Wilayah Kantor Regional III BKN Bandung, Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional III BKN, Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional III BKN, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan di Kantor Regional III BKN Bandung, dan Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional III BKN. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan seluruh instansi di Wilayah Kerja Kanreg III BKN akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap stakeholders di Wilayah Kerja Kanreg III BKN dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

## 4.2 REKOMENDASI

Dengan capaian yang telah diraih selama tahun 2023, tentunya Kanreg III harus terus menerus melakukan perbaikan yang berkesinambungan, agar berbagai program Badan Kepegawaian Negara yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik dalam peranan Badan Kepegawaian untuk bangsa dan negara Indonesia pada terwujudnya Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas dapat dioptimalkan.

Dilihat dari trend capaian NPSS Kanreg III, terlihat bahwa terdapat peningkatan kinerja. Meskipun beberapa. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023 yang telah dijelaskan, terdapat beberapa rekomendasi yang akan dilakukan oleh Kantor Regional III BKN Bandung sebagai langkah-langkah dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan nilai capaian target indikator kinerja utama (IKU) di tahun 2023 yaitu dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melakukan Penerapan SAKIP dan tindak Lanjut Inspektorat pada LHE SAKIP guna meningkatkan akuntabilitas pada manajemen internal.
2. Memperkuat koordinasi baik secara internal maupun secara eksternal dengan stakeholders.
3. Terus melaksanakan kegiatan rakabangtesi dan mendorong pegawai untuk memenuhi kewajiban persyaratan mendapatkan 20 JP pertahun.
4. Mengoptimalkan implementasi "Simojang Tilu"
5. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi terstandar.